

Media Politik dan Dakwah

# al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

## MELAWAN IMPERIALISME BARAT

Saat Hari  
Keputusan Tiba

Pelajaran dari  
Keruntuhan  
Khilafah



M. Ismail Yusanto:  
**Kapitalisme:  
Ancaman Nyata**

Rp. 7.500,- (Luar Jawa Rp. 10.000,-)  
Edisi Jumadil Akhir, 1-31 Maret 2018/ 1439H

# AGENDA UMAT



Surabaya. Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Surabaya dalam acara Mudzakah Ulama mengajak ulama dan umat bersatu menjaga kemuliaan Islam. Berbagai problem yang menimpa umat Islam meniscayakan persatuan umat. Acara yang diselenggarakan pada ahad [28/1] di Masjid al Wahyu Rungkut Menanggal Harapan ini dihadiri lebih dari 70 orang ulama dan asatidz dari berbagai kalangan.



Kediri. Peduli dan simpati pada Palestina, itulah yang tampak pada pertemuan kyai, ulama, muhibbin, dan asatidz pada Sabtu [20/1]. Acara yang diisi istighosah di kediaman Kyai Muhaimin, Dusun Kalen, Kec. Wates – Kediri. Mereka pun menyerukan Jihad dan Khilafah sebagai solusi tuntas dan pas masalah Palestina.



Tangerang. Mudzakah Ulama Tangerang terlaksana pada Ahad [21/1] di Majelis Taklim Bari Halimi, Jambe Tangerang, yang diasuh Al Mukarom KH. Jaenul 'Arifin. Mudzakarrah ini, dihadiri Ulama, Kyai, Ustad serta tokoh masyarakat Tangerang.



Leuwiliang. Meski Uni Eropa mendukung Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestiana, justru ulama Bogor bersikap berbeda. Ahad [21/1] di Masjid Nurul Fatah, Ds. Barengkok, dilaksanakan Mudzakah Ulama. Dihadiri sekitar 50 orang ulama, kyai, asatidz, dan tokoh masyarakat. Ust. Umar Ismail, selaku ketua DKM, didapat sebagai shahibul bayt. "Mudzakah diadakan dalam rangka keprihatinan kita sebagai umat Islam, atas kondisi muslim di Palestina. .."



Gresik. Ratusan ulama, ustadz, santri dan muhibbin tumpuk di Gresik. Mudzakah Ulama bertema "Solusi Tuntas Masalah Palestina adalah Jihad dan Khilafah" dihelat pada Sabtu [13/1]. Tampak hadir tokoh dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, KH. Drs. Faiq Furqon dari Sidayu, Al Fadhil Al Ustadz Drs. Muhammad Haris, M.Pd dari Majelis Taklim Mata Hati, Gresik. Bertindak sebagai tuan rumah Sohbul Fadilah Ust. Drs. Rodi Masykur, M.Pd, serta Al Mukarram Kyai Bakir dari ulama Muhammadiyah kecamatan Dukun, Gresik.

## Daftar Isi

Hiwar: **40**

### Kapitalisme: Ancaman Nyata

Bukan Islam. Bukan syariah. Bukan pula Khilafah. Yang menjadi ancaman negeri ini, bahkan dunia, adalah ideologi Kapitalisme-Liberalisme. Itulah juga musuh sejati umat Islam saat ini. Karena itu jika ada yang justru menuding Islam, syariah dan Khilafah—yang pasti mendatangkan rahmat dan keberkahan—sebagai ancaman, tentu sangat aneh.

Siyasah-Dakwah:

**48**

### Pelajaran dari Keruntuhan Khilafah

Tanggal 3 Maret 1924—kurang-lebih 94 tahun lalu—Khilafah Islam terakhir yang berpusat di Turki resmi dibubarkan oleh Mustafa Kemal Attaturk, seorang agen Inggris keturunan Yahudi. Tentu banyak pelajaran dari peristiwa tragis yang menimpa umat Islam ini. Pelajaran ini penting dipahami, terutama agar umat bersungguh-sungguh dalam mengupayakan kehadiran kembali Khilafah di tengah-tengah mereka.

**52**

Tafsir:

### Saat Hari Keputusan Tiba

Di Akhirat nanti, semua manusia—tanpa kecuali—akan dihadapkan pada Mahkamah Ilahi. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan mereka saat di dunia di hadapan Zat Yang Mahaadil, Allah SWT. Saat itulah Hari Keputusan akan dialami oleh setiap manusia: apakah ia masuk surga atau masuk neraka; apakah nasibnya berujung bahagia atau sengsara.

|  |    |
|--|----|
| <i>Pengantar</i> .....   | 2  |
| <i>Dari Redaksi</i> : Terkait Pencabutan SK BHP HTI, Pemerintah Banyak Melanggar Hukum ..... | 3  |
| <i>Opini</i> .....   | 5  |
| <i>Muhasabah</i> : Teruslah Bicara Kebenaran! .....  | 7  |
| <i>Fokus</i> : Kapitalisme-Liberal: Musuh Sejati Umat ..                                     | 9  |
| <i>Analisis</i> : Melawan Imperialisme Barat .....   | 13 |
| <i>Iqtishadiyah</i> : Ketimpangan Kronis Bukti Kegagalan Kapitalisme .....                   | 17 |
| <i>Nisa</i> ': Kapitalisme Mendompleng Isu Perempuan .....                                   | 21 |
| <i>Telaah Kitab</i> : Baitul Mal .....   | 24 |
| <i>Soal Jawab</i> : Betulkah Dalil Khilafah Longgar? ..                                      | 28 |
| <i>Tsaqafah</i> : Sahkah Jual-beli Mesin Tanpa Serah-terima? .....                           | 33 |
| <i>Kilas Dunia</i> .....   | 36 |

|   |    |
|---|----|
| <i>Hiwar</i> : Ust. M. Ismail Yusanto: Kapitalisme: Ancaman Nyata .....         | 40 |
| <i>Catatan Dakwah</i> : Basis Teologi .....                                     | 45 |
| <i>Siyasah Dakwah</i> : Pelajaran Dari Keruntuhan Khilafah (3 Maret 1924) ..... | 48 |
| <i>Tafsir</i> : Saat Hari Keputusan Tiba .....                                  | 52 |
| <i>Ibrah</i> ': Abdullah Bin Al-Mubarak .....                                   | 56 |
| <i>Afkar</i> : Istinbath Hukum Kewajiban Menegakkan Khilafah .....              | 58 |
| <i>Dunia Islam</i> : Kebohongan 'Garis Merah' Mencekik Rakyat Suriah .....      | 62 |
| <i>Takrifat</i> : Klasifikasi As-Sunnah .....                                   | 65 |
| <i>Hadis Pilihan</i> : Mengutamakan Ridha Allah Di Atas Ridha Manusia .....     | 68 |
| <i>Sirah</i> ': "Ana Muslim...!" .....  | 70 |

# Pengantar

**Penerbit:** Pusat Studi Politik Dan Dakwah Islam  
**Alamat :** Jl. Pancoran Barat I, No. 12B, Pancoran, Jakarta Selatan. e-mail: redaksialwaie@gmail.com  
**Pemimpin Umum:** M. Anwari. Pemimpin Perusahaan dan Keuangan: M. Anwari  
**Pemimpin Redaksi:** Ibnu Faruq. Redaktur Pelaksana: M. Arief Billah. Redaktur: Abu Umam, Yahya Abdurrahman.  
**Layout:** reeun.  
**Pemasaran:** Tedi  
**Harga:** Rp. 7.500,- (P. Jawa) dan Rp. 10.000,- (Luar P. Jawa).

*Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*

Pembaca yang budiman, sebagai penguasa tunggal dunia saat ini, pengusung utama ideologi Kapitalisme global, yakni AS—juga Barat—selalu berusaha keras untuk menghalang-halangi ideologi apapun yang bisa mengancam eksistensi ideologi mereka. Di antara sekian banyak cara adalah dengan mengelabui warga dunia—khususnya Dunia Islam—tentang siapa musuh utama mereka. Mengapa Dunia Islam? Pasalnya, pasca Komunisme runtuh, yang paling mereka khawatirkan adalah kebangkitan kembali ideologi Islam di tengah-tengah kaum Muslim.

Untuk kepentingan tersebut, mereka menciptakan banyak isu di Dunia, seperti isu terorisme dan radikalisme. Tujuannya: *Pertama*, untuk menciptakan rasa takut warga dunia terhadap ‘musuh’ yang sesungguhnya mereka ciptakan, yakni terorisme dan radikalisme, yang selama ini identik dengan Islam. *Kedua*, untuk menipu umat Islam khususnya sehingga mereka tidak menyadari musuh mereka yang sebenarnya. Dengan begitu umat Islam terpedaya sehingga memusuhi sesama umat Islam sendiri—yang sudah mereka labeli sebagai teroris dan radikal—sembari melupakan musuh sejati mereka, yakni Kapitalisme-Liberalisme. Sekali lagi, musuh kaum Muslim yang sebenarnya saat ini—pasca Komunisme tumbang—adalah Kapitalisme-Liberalisme.

Karena itu, umat Islam penting untuk terus menjadikan ideologi Kapitalisme-Liberal dan para pengusungnya, khususnya AS dan Barat, sebagai musuh sejati mereka. Pada saat yang sama mereka harus terus berupaya keras untuk membangkitkan kembali ideologi Islam, di antaranya demi menghancurkan ideologi Kapitalisme-Liberalisme yang terbukti rusak dan merusak; menciptakan banyak kehancuran secara sosial, ekonomi, moral, kemanusiaan, dsb.

Itulah tema besar yang *al-wa'ie* edisi kali ini. Tema-tema lain yang pastinya penting tentu juga layak untuk dikaji. Selamat membaca!

*Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*



## Terkait Pencabutan SK BHP HTI PEMERINTAH BANYAK MELANGGAR HUKUM

**K**eputusan Menteri Hukum dan HAM yang mencabut SK BHP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih menyisakan banyak masalah. Hal ini tampak jelas dalam sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi dan PTUN yang masih berlangsung hingga saat ini. Poinnya sangat jelas. Tindakan Pemerintah melanggar hukum, tidak sah, penuh kebohongan dan zalim.

Pelanggaran hukum ini tampak jelas sebagaimana yang disampaikan kuasa hukum Penggugat dari Kantor Ihza & Ihza Law Firm dalam surat gugatannya. Pemerintah sebagai tergugat antara lain melanggar UU no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 55 ayat (1). Pasalnya, penerbitan objek sengketa tidak mencantumkan alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. Pemerintah juga melanggar Pasal 9 ayat (3). Pasalnya, Pemerintah tidak mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan. Pelanggaran juga terjadi karena Pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum keputusan atau tindakan diambil (pasal 7 huruf f).

Tergugat juga melanggar UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia karena tidak memperlakukan penggugat sama di hadapan hukum (pasal 4) dan menghilangkan hak penggugat untuk memperoleh keadilan (pasal 17). Tergugat

(Pemerintah) pun telah melanggar UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman karena: menghilangkan hak Penggugat untuk didengar keterangannya (Pasal 4 ayat 1) dan tidak memperlakukan Penggugat untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya (Pasal 8 ayat 1). Artinya, keberadaan Pengadilan dan prosesnya yang menjadi perkara penting bagi siapapun untuk mendapatkan keadilan justru dihilangkan berdasarkan Perpu No. 2 Tahun 2017.

Prinsip hukum penting, yakni “*due process of law*”, sebagai salah satu ciri negara hukum juga telah dilanggar. Hal ini ditegaskan Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., MH, salah satu saksi ahli. Menurut Zainal Arifin, ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 UU No. 17 Tahun 2013 yang mengedepankan “*due process of law*” justru dicabut oleh Perpu No. 2 Tahun 2017, yang menjadi dasar pencabutan SK BHP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut ia pula norma hukum prosedur itu haruslah bersifat fair. Artinya, ketentuan-ketentuan tentang prosedur tidak boleh menurut selera penyelenggara kekuasaan negara. Kalau ini terjadi, paparnya, akan membuka peluang selebar-lebarnya bagi penggunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Negara bisa jadi akan berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan yang dijalankan sesuai dengan kepentingan penguasa.

Tindakan Pemerintah jelas zalim. Kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Menkumham, mencabut status badan hukum sekaligus membubarkan ormas tanpa proses peradilan



adalah kewenangan yang diberikan oleh Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kontroversial. HTI memandang keputusan tersebut adalah bentuk kesewenang-wenangan yang nyata. Hingga saat ini tidak jelas pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh HTI karena tidak pernah ada surat peringatan atau penjelasan yang diberikan Pemerintah kepada pihak HTI.

Selain itu sangat nyata sekali bagaimana Pemerintah melakukan banyak kebohongan terkait dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Alasan Pemerintah bahwa HTI tidak memberikan kontribusi positif dan malah menimbulkan benturan adalah kebohongan besar. Secara faktual, HTI selama lebih dari 25 tahun telah terbukti mampu melaksanakan kegiatan dakwahnya secara tertib, santun dan damai, serta sesuai prosedur yang ada. Oleh karena itu, tudingan Pemerintah bahwa kegiatan HTI telah menimbulkan benturan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI adalah tudingan mengada-ada.

Melalui kegiatan dakwah yang dilakukan secara intensif di seluruh wilayah Indonesia, HTI telah memberikan kontribusi penting bagi pembangunan SDM negeri ini, yakni SDM yang bertakwa dan berkarakter mulia. Ini jelas sangat diperlukan bagi kemajuan negara ke depan di tengah berbagai krisis seperti korupsi yang berpangkal pada lemahnya integritas SDM yang ada. Selain itu HTI juga terlibat dalam usaha mengkritisi berbagai peraturan perundangan liberal yang bakal merugikan bangsa dan negara seperti UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal, juga UU Sisdiknas dan lainnya; sosialisasi anti narkoba; menentang gerakan separatisme dan upaya disintegrasi. HTI juga terlibat dalam usaha membantu para korban bencana alam di berbagai tempat, seperti tsunami Aceh (2004), gempa Jogjakarta (2006) dan lainnya. Oleh karena itu, tudingan bahwa HTI tidak memiliki peran positif tidaklah benar.

Lantas mengapa HTI dibubarkan? Jawabannya adalah sangat jelas, karena HTI memperjuangkan Islam, menginginkan tegaknya syariah Islam secara

totalitas di bawah naungan Khilafah Islamiyah '*al-minhâjan-nubuwwah*'. Jadi, pencabutan BHP HTI hanyalah sasaran antara. Sasaran sesungguhnya adalah untuk mencegah kebangkitan umat Islam dengan tegaknya syariah Islam secara total. Inilah yang sesungguhnya ditakuti oleh rezim-rezim boneka di negeri-negeri Islam sekarang ini. Ini mewakili ketakutan negara-negara imperialis akan tegaknya kembali Khilafah Islam.

Maka dari itu, tidak mengherankan kalau dalam sidang MK, PTUN, maupun propaganda rezim penguasa saat ini, melalui alat-alat kekuasaannya, maupun intelektual bayaran, berupaya membangun citra negatif terhadap Khilafah Islam dengan melakukan monsterisasi dan kriminalisasi. Padahal sangat jelas bahwa Khilafah merupakan ajaran Islam yang akan menerapkan seluruh syariah Islam yang membawa kebaikan pada seluruh umat manusia (rahmatan lil 'alamin).

Apa yang disampaikan Dr. Daud Rasyid Sitorus, MA, Lc, dalam sidang gugatan HTI atas kesewenang-wenangan Pemerintah mencabut SK Badan Hukum Perkumpulan (BHP) Kamis (8/2/2018) di Jakarta Timur sangat penting. Menurut peraih gelar doktor dalam bidang syariah di Fakultas Darul 'Ulum Universitas Kairo tersebut, Khilafah adalah ajaran Islam. Khilafah adalah istilah yang sudah populer sejak zaman Nabi Muhammad saw. Perkara ini (Khilafah) sudah tertuang di dalam hadis-hadisnya dan itu sampai sekarang bisa dirujuk ke dalam sumber-sumber utama Islam. Sumber utama Islam itu al-Quran al-Karim, Hadis Nabi, Ijmak dan Qiyas. Saksi Ahli ini menegaskan, jelas Khilafah adalah ajaran Islam. Adapun Hizbut Tahrir Indonesia hanya menyampaikan apa yang menjadi ajaran Islam, yang dilupakan oleh kaum Muslim.

Sebagai bagian dari ajaran Islam, Khilafah jelas bukan merupakan ancaman bagi Indonesia. Justru, Khilafah ingin menjaga dan menyelamatkan negeri Muslim terbesar ini, agar terbebas dari segala bentuk penjajahan yang hingga kini masih menderanya. *Allahu Akbar!*  
[Farid Wadjudi]

# Opini

Pembaca

Kritik Itu Baik

M. NurRakhmad, SH



nstitute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa jika nantinya Rancangan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan oleh DPR dan Pemerintah, akan berpotensi berat terhadap tindakan menyampaikan ekspresi. Contohnya, seperti kritik yang dilakukan oleh Ketua BEM UI dapat dikenakan pidana penjara.

*Managing Director* ICJR, Erasmus Napitupulu mengatakan RKUHP bisa memidanakan Ketua BEM UI Zaadit Taqwa yang memberi 'kartu kuning' pada Presiden. Dia bisa terjerat pasal 263 ayat 1. Pasal tersebut berbunyi: *Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.* (<http://republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/04/p3lcv384-rancangan-kuhp-baru-berpotensi-penjarakan-pengritik-presiden>)

Kritik itu baik. Penguasa janganlah *phobia* dengan kritik rakyat untuk meluruskan kesalahan mereka. Mengoreksi penguasa yang keliru termasuk perkara yang *ma'lûm* bagian dari agama Islam. Salah satu hadis yang mendorong untuk mengoreksi penguasa, menasihati mereka, adalah hadis dari Tamim ad-Dari ra. bahwa Nabi Muhammad saw. pernah bersabda: *"Agama itu adalah nasihat."* Para Sahabat bertanya, *"Untuk siapa?"* Nabi saw. bersabda, *"Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum Muslim dan kaum Muslimin pada umumnya."* (HR Muslim, Abu Dawud, Ahmad).

Rasulullah saw. pun secara khusus telah memuji aktivitas mengoreksi penguasa zalim dan menyampaikan kebenaran kepada dia, *"Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar kepada pemimpin yang zalim."* (HR Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud, al-Nasa'i, al-Hakim dan lainnya).

Beliau pun bersabda, *"Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin 'Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zalim, lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari keburukan), kemudian ia penguasa zalim itu membunuhnya."* (HR al-Hakim dan ath-Thabarani).

Hendaknya penguasa melaksanakan nasihat Umar ra. Ketika Umar bin Khatthab ra. berkhubah di hadapan kaum Muslim setelah beliau diangkat menjadi *Amirul Mukminin*, beliau berkata, *"Siapa saja di antara kalian melihatku bengkok, hendaklah dia meluruskannya."* Seorang laki-laki Arab berdiri dan berkata, *"Demi Allah, wahai Umar, jika kami melihatmu bengkok, kami akan meluruskannya dengan tajamnya pedang kami."*

Alhasil, penguasa jangan anti kritik dan nasihat, RKUHP pasal 263 ayat 1, UU ITE dan UU Ormas jangan jadi alat bungkam kritik rakyat. []

## Sikap Represif: Kemunduran Nyata

**Sudarmaji, S.E.I.**  
(Analisis di el Harokah  
Research Center)



Siapapun yang ingin  
m e n g e m b a l i k a n  
kepemimpinan Islam harus  
membentuk kelompok dakwah

sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. Kelompok itu harus merupakan partai yang mampu menenggelamkan seluruh pemikiran kapitalisme, komunisme dan semua yang bertentangan dengan Islam. Para anggotanya haruslah orang-orang yang pantas dan layak mengemban dakwah Islam dan mampu memikul beban dakwah.

Rasulullah saw. menjadikan para Sahabat mampu menahan beban berat yang menimpa mereka. Rasul saw. mengubah Sahabat Umar bin al-Khaththab ra. dari seseorang yang pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup hingga menjadi seseorang sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw., “*Jika Umar berjalan di sebuah sisi jalan, setan berjalan di sisi jalan yang lainnya.*”

Hizbut Tahrir yang mendapat tekanan dari Pemerintah saat ini, dalam langkah-langkah perjuangannya selalu berpegang pada metode Rasulullah saw. Siapa saja yang menjadikan Rasul sebagai teladan, akan dapat melihat bagaimana beliau beserta kelompoknya dari para Sahabatnya berjuang melawan seluruh kebatilan dan menghadapi segala rintangan dalam rangka meninggikan agama Allah SWT di mukabumi dengan mendirikan negara Islam di Madinah.

Siapapun yang membaca sejarah perjuangan Rasulullah saw. dan ingin mengikuti langkah-langkah beliau tidak akan mempersoalkan 13 tahun lamanya beliau berjuang. Mereka hanya akan melihat bagaimana beliau dengan partai politiknya yang beranggotakan para sahabat berhasil mendirikan Negara Islam. Metode inilah yang juga diadopsi oleh Hizbut Tahrir.

Dengan metode inilah kaum Muslim dapat menegakkan Daulah Islam atau Khilafah Islam selama 1400 tahun. Metode ini mampu mengguncang singgasana para raja/kepala negara yang zalim. Metode ini sekaligus mampu mendorong umat Islam berkeinginan mengembalikan kemuliaan mereka di tengah-tengah kehidupan di dunia dan akhirat. Mereka yang menginginkan kembali kemuliaan Islam dan perubahan secara radikal tentu harus mendedikasikan diri mereka untuk mempelajari dan mendalami metode ini serta menerapkannya tanpa penyimpangan sedikitpun.

Atas izin Allah, Rasulullah saw. telah membentuk gerakan dakwah yang kuat di tengah-tengah umat. Sesungguhnya aktivitas politik, yang berarti melayani urusan umat, bersumber dari Sunnah Rasulullah saw. Bukankah Rasulullah pernah berkata kepada orang-orang Quraisy, “Aku akan memberi kalian satu pernyataan yang akan menjadikan kalian penguasa bagi bangsa Arab dan orang-orang selain Arab.” Ketika ditanyakan pernyataan apa itu, Rasul saw. menjawab, “Katakan: *Lâ ilâha illâLLâh*, niscaya kalian akan mendapatkannya.”

Hari ini kaum Muslim harus menentang praktik-praktik ekonomi yang korup. Hizbut Tahrir pun menerbitkan berbagai selebaran, majalah, buku, booklet yang mengkritik kebijakan Pemerintah dan *booklet* yang menjelaskan latar belakang kehancuran ekonomi Indonesia beserta solusi yang komprehensif dan sempurna. Karena itu sikap represif terhadap gerakan dakwah ini merupakan kemunduran yang nyata. []



Muhammad Rahmat Kurnia

## TERUSLAH BICARA KEBENARAN!

Tahun 2018 sudah masuk tahun politik. Terdapat 171 daerah akan menyelenggarakan Pilkada serentak. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018. Tidak mengherankan suhu pun mulai terasa menghangat.

Sepak bola saja bisa digunakan bagi kepentingan politik. Tak lama setelah kemenangan Persija atas Bali United di ajang Piala Presiden 2018, viral video yang menggambarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicegah saat akan turun untuk mengucapkan selamat kepada Persija. Respon pun bermacam-macam. Seorang kawan uring-uringan, “Mengapa *sih* Gubernur DKI Jakarta tidak dipersilakan untuk turun ke lapangan untuk mengucapkan selamat kepada Persija, Jakarta? Tidak fair, *tuh*.”

Kawan lain menanggapi, “Itu *mahiri* tanda tak mampu.”

Ada lagi yang menimpali dengan sedikit berargumen, “Menurut UU nomor 2 tahun 2010, Gubernur wajib mendampingi Presiden dalam acara yang diselenggarakan di wilayahnya. *Iki ono opa?*”

Yang lain berpendapat lain lagi, “Wah nama Pak Anies akan naik nih. Dia ‘kan dizalimi.”

Lepas dari apa yang sebenarnya terjadi, satu pelajaran yang dapat dipetik adalah sepak bola saja dapat dijadikan alat politik. Kejadian di lapangan bola pun dapat dianggap sebagai

permainan politik. Hal ini menambah hangatnya suhu politik di tengah masyarakat.

Setelah sebelumnya (Juli 2017) khalayak diramaikan dengan penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, pada awal Februari 2018 ramai diperbincangan terkait rencana Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan menarik zakat 2,5 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim. Kebijakan tersebut akan diperkuat lewat Peraturan Presiden (Perpres). “Sedang dipersiapkan perpres tentang pungutan zakat bagi ASN Muslim. Diberlakukan hanya ASN Muslim/Kewajiban zakat hanya pada umat Islam,” ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (5/2/2018).

“Dana dari APBD dan APBN masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di berbagai bidang,” tambahnya (7/2/2018).

Potensi zakat PNS dia akui cukup besar, sekitar Rp10 Triliun. “Kalau masalah uang diurus,” ujar seorang kawan kesal.

Ada juga yang menantang, “Bagus juga *tuh*. Namun, jangan tanggung. Jangan hanya menerapkan syariah Islam yang ada duitnya saja. Terapkan *dong* secara menyeluruh, *kâffah*.”

Kondisi ini pun menambah hangatnya suhu perpolitikan. Hal ini wajar belaka. Pasalnya, sebagaimana dirilis oleh Koran *Radar Bogor* edisi Selasa, 14 Juni 2016, terdapat sejumlah

Perda yang bernafaskan Islam dihapus. Di antaranya, Instruksi Bupati Lombok Timur No.4/2003 tentang pemotongan gaji PNS/Guru 2,5% setiap bulan. “*Kok* yang itu dihapus, sekarang malah dibuat Peraturan Presidennya. Dasar politik,” tambah kawan tadi.

Kasus teror dan pembunuhan terhadap ustadz dan ulama menambah panasnya situasi. Sebagaimana diberitakan beberapa media massa, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka, Kabupaten Bandung, KH Umar Basri (Mama Santiong) menjadi korban penganiayaan usai shalat subuh di masjid. Pelakunya disebutkan sebagai gila. Komando Brigade PP Persis, Ustaz Prawoto, dipukul dengan linggis hingga meninggal dunia. Lagi-lagi, pelakunya disebut gila. “Masa iya komandan brigade, jago bela diri dikejar, digebukin sama orang gila begitu gampang? Ah, inilah orang gila hari ini jago bunuh orang,” Ustadz Bachtiar Nasir mengomentari.

Pengamat intelijen Jaka Setiawan mengatakan bahwa peristiwa ini berpola. Ia menengarai, yang dapat melakukan hal ini adalah intelijen. Barangkali ‘ancaman’ ini merupakan pesan yang hendak disampaikan kepada kelompok tertentu, siapa lagi bila bukan kelompok Islam.

Sejak kasus Pilkada DKI, kelompok massa Islam cukup diperhitungkan. Tidak mengherankan tuduhan intoleransi, antikebhinnekaan, radikal dan sebagainya terus didengungkan. Politik belah bambu terus terlihat. Kini kelompok Islam yang menghendaki Islam tegak menghadapi satu tantangan lagi, sebut saja ‘teror psikologis’. Para ustadz dan ulama dibuat takut untuk bicara kebenaran.

Mantan Menteri Sosial, Pak Bachtiar Chamsah, bercerita bagaimana perlunya umat Islam bersatu. Menurut dia, kini tidak sedikit tokoh Islam yang sudah terbeli.

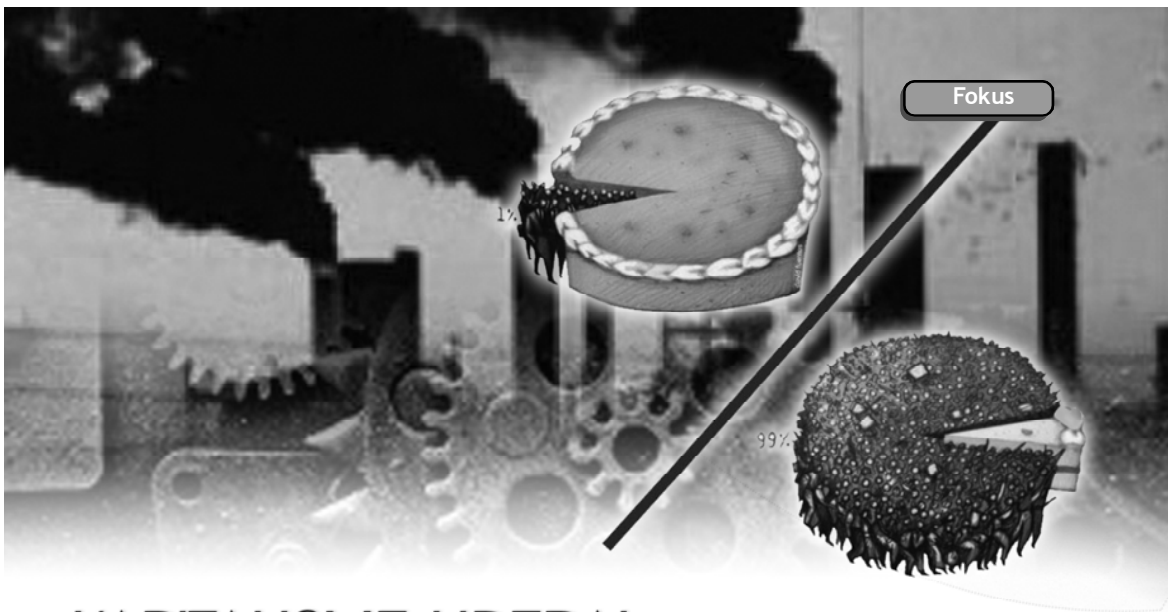
Kepentingannya adalah uang dan jabatan. Tegaknya kemuliaan Islam dan kaum Muslim hampir terlupakan. “Karena itu kita perlu bersatu. Kita harus berpegang pada Islam. Tokoh-tokoh Islam perlu menyatukan pandangan. Apalagi, ancaman dari luar amat besar,” tegasnya.

Saya sampaikan kepada beliau, “Bila yang menjadi tujuan adalah kepentingan pribadi atau kelompok, maka *homo homini lupus* akan benar-benar terjadi. Manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Siapa yang besar, sekalipun salah, akan menang. Jadilah, hukum rimba.”

Andai ini terjadi maka kita harus waspada, sebab tanda-tanda kehancuran sudah tampak. Rasulullah saw. bersabda, “*Sungguh telah binasa kaum sebelum kalian karena mereka menerapkan hukuman atas orang-orang lemah dan mereka tidak neberapkan hukum itu atas kalangan bangsawan di antara mereka.*” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Selain itu, bila kepentingan pribadi atau kelompok menjadi panglima maka lidah akan menjadi kelu. Tak lagi dapat bicara kebenaran dengan lantang. Padahal kebenaran itu harus disampaikan. Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah *rahimahullâh* berkata, “Agama dan kebaikan apalagi yang ada pada seseorang yang melihat larangan-larangan Allah dilanggar, batas-batas-Nya diabaikan, agama-Nya ditinggalkan dan Sunnah Rasul-Nya dibenci. Orang yang hatinya dingin, lisannya diam (dari menyampaikan kebenaran dan mengingkari kemungkaran, pent), dia adalah syaithan *akhras* (setan bisu dari jenis manusia), sebagaimana orang yang berbicara dengan kebatilan dinamakan *syaiṡhân nâṡhiq* (setan yang berbicara dari jenis manusia).”

Jadi, teruslah bicara kebenaran tanpa terpengaruh oleh panasnya kondisi politik yang ada. []



# KAPITALISME-LIBERAL: MUSUH SEJATI UMAT

**Hanif Kristianto**

(Analisis Politik dan Media)

**M**emahami musuh yang nyata, penting bagi umat Islam. Dengan itu umat diharapkan bersatu—dalam ikatan akidah—merumuskan perjuangan untuk menghadapi musuh nyata yang terus menggerogoti mereka. Musuh umat Islam jelas bukan sesama kaum Muslim. Musuh kaum Muslim saat ini adalah ideologi Kapitalisme-Liberal dan para pengembannya. Ideologi destruktif inilah yang terbukti menimbulkan kekacauan kehidupan umat manusia.

## Inti Kapitalisme-Liberal

Inti Kapitalisme-Liberal adalah sebagai berikut:

*Capitalism is an economic system characterized by private or corporate ownership of capital goods, by investments that are determined by private decision, and by prices, production, and the distribution of goods that are determined mainly by competition in a free market* (Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang dicirikan oleh kepemilikan barang modal atau pribadi; oleh investasi yang ditentukan oleh keputusan pribadi; juga oleh

harga, produksi dan distribusi barang yang ditentukan terutama oleh persaingan di pasar bebas) (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/capitalism>).

*Liberalism is a theory in economics emphasizing individual freedom from restraint and usually based on free competition, the self-regulating market, and the gold standard. c : a political philosophy based on belief in progress, the essential goodness of the human race, and the autonomy of the individual and standing for the protection of political and civil liberties* (Liberalisme adalah sebuah teori di bidang ekonomi yang menekankan kebebasan individu dari pengekangan dan biasanya didasarkan pada persaingan bebas, pasar yang mengatur sendiri dan standar emas; sebuah filsafat politik yang didasarkan pada kepercayaan akan kemajuan, kebaikan esensial umat manusia dan otonomi individu serta berdiri untuk perlindungan kebebasan politik dan sipil) (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/liberalism>).

Landasan Kapitalisme-Liberal adalah sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan).

Penganutnya berpendapat bahwa manusia sendirilah yang berhak membuat peraturan hidupnya. Ideologi ini menetapkan adanya pemeliharaan kebebasan manusia yang terdiri dari kebebasan berakidah, berpendapat, hak milik dan kebebasan pribadi. Dari kebebasan hak milik ini dihasilkan sistem ekonomi Kapitalisme. Inilah yang paling menonjol dalam ideologi ini. Oleh karena itu ideologi tersebut dinamakan ideologi Kapitalisme; diambil dari aspek yang paling menonjol dalam ideologi itu.

Kapitalisme-Liberal saat ini masih bisa tegak karena ditopang oleh negara. AS, Barat dan sekutunya telah menjaga ideologi ini siang-malam. Mereka pun mengekspor ideologi mereka ke negeri-negeri kaum Muslim. Tujuannya: *Pertama*, memalingkan umat Islam dari syariah *kāffah*. *Kedua*, menghegemoni dan menyedot sumberdaya alam negeri kaum Muslim. *Ketiga*, memalingkan umat Islam dari musuh mereka yang nyata. *Keempat*, menghalangi kebangkitan Islam dengan menghalangi umat untuk menegakkan kembali Khilafah.

Landasan Kapitalisme-Liberal jelas lemah dan jauh dari fitrah manusia. Pengabaian agama jelas bertolak belakang dengan Islam. Jika akar Kapitalisme-Liberal sudah rusak, tentu sistem dan aspek turunannya pun rusak. Karena itu umat Islam harus terus membongkar kerusakannya. Umat pun harus menjadikan ideologi ini sebagai musuh bersama bagi mereka.

### Mengapa Musuh?

*Pertama: Karena Kapitalisme-Liberal adalah ideologi penjajah.* Ideologi ini telah mendorong pengemban utamanya—AS dan Barat—melakukan penjajahan di seluruh dunia. Karena itu ideologi ini merupakan ideologi penjajah. Ideologi penjajah inilah yang menjadikan AS dan Barat menjadi rakus, sombong dan banyak melakukan intervensi ke berbagai negara di dunia. Negara-negara kapitalis penjajah terus mencari daerah-daerah jajahan baru untuk mengeruk kekayaannya. Upaya itu dilakukan di antaranya

melalui senjata/intervensi militer.

Fakta sejarah telah menunjukkan bahwa selama Perang Dunia I dan II tidak ada rasa aman. Huru-hara, pertumpahan darah, penghilangan nyawa dan bencana kemanusiaan tak terkira. Indonesia pun pernah menjadi korban penjajahan negara-negara imperialis.

*Kedua: Karena Kapitalisme-Liberal terus disebarkan secara paksa ke seluruh dunia melalui penjajahan.* Cara baku negara pengemban Kapitalisme-Liberal untuk mengimplementasikan ideologi mereka adalah melalui penjajahan (imperialisme). Penjajahan itu bisa dalam bentuk pemaksaan dominasi politik, militer, budaya dan ekonomi terhadap negara-negara jajahan. Jalan imperialisme ini tetap meskipun rezim dan UU di negara jajahan berubah. Alhasil, penjajahan adalah bagian integral dari Kapitalisme-Liberal.

Imperialisme adalah anak Kapitalisme. Imperialisme tua dilahirkan oleh Kapitalisme tua. Imperialisme modern dilahirkan oleh Kapitalisme modern. Watak kuno imperialisme tua itu menghantam ke kanan dan ke kiri. Menjalankan stelsel monopoli dengan kekerasan dan kekejaman. Mengadakan sistem paksa. Membinasakan ribuan jiwa manusia. Menghancurkan kerajaan-kerajaan. Membasmi miliunan cengkeh dan pala. Ia melahirkan aturan *contigenten* (pajak berupa hasil bumi) dan *levarantien* (hak monopoli hasil bumi) yang sangat berat dipikul oleh rakyat (Ir. Soekarno, *Mencapai Indonesia Merdeka*, hlm 10-11).

Gambaran negara penjajah diwakili oleh Inggris dan Amerika Serikat. Inggris dikenal sebagai Imperium Britania. Masa keemasannya pada tahun 1815-1914 saat masa kekuasaan Raja George III sampai Raja George V. Inggris mengklaim sebagai polisi dunia yang dikenal sebutan Pax Britannica. Kontrolnya di wilayah jajahan begitu kuat. Luas jajahannya 26.000.000 km<sup>2</sup> yang memiliki sekitar 400 juta penduduk bagian dari Imperium Britania. Ada sekitar 94 negara yang pernah dijajah Inggris meliputi Asia, Afrika, Amerika dan Oseania.

Amerika Serikat, pasca Perang Dunia II, dikenal begitu aktif melakukan ekspansi, baik dalam rangka hegemoni maupun penjajahan atas nama perdamaian dunia. AS berhasil masuk ke Afganistan dan Irak dengan alasan memerangi teroris dan senjata pemusnah massal. Pangkalan militernya ada di Timur Tengah dan negara-negara lainnya.

Di Dunia Islam—di Timur Tengah dan Afrika Utara, atau di Asia Tengah dan Asia Tenggara—negara-negara penjajah di bawah pimpinan AS juga memaksakan dominasi politik, militer dan ekonominya untuk mengeksploitasi manfaat-manfaat material di negara-negara tersebut. Mereka juga berupaya menyebarkan Kapitalisme pada banyak bidang. Di antaranya dengan menginisiasi berbagai konferensi internasional seperti konferensi tentang HAM, kesetaraan gender, dll.

Di Timur Tengah, AS pun memaksakan dominasi budaya melalui apa yang dikenal dengan “rekonstruksi peradaban”, “dialog antaragama”, “titik temu peradaban”, dll. AS pun berupaya intensif mengubah atau mengganti kurikulum pendidikan untuk memutuskan keterikatan kaum Muslim dengan peradaban dan budaya mereka.

*Ketiga: Karena Kapitalisme-Liberal menjadi biang persoalan di dunia.* Kapitalisme-Liberal pada masa sekarang mengubah bentuk penjajahannya menjadi penjajahan gaya baru (neo-imprialisme). Pada awalnya dominasi AS lebih bertumpu pada aspek militer. Berikutnya, AS bertumpu pada aspek ekonomi semisal utang luar negeri, tekanan politik dan embargo. Lewat banyak perusahaan multinasional, AS melakukan eksploitasi sumberdaya alam Indonesia dan negeri lainnya.

Barat dan sekutunya pun mengikuti irama AS. Perusahaan multinasionalnya melakukan akses untuk bersaing merebut lahan eksploitasi. Barat paham, negeri-negeri kaum Muslim merupakan negara kaya SDA. Semua itu dilakukan untuk memuaskan kerakusannya dan memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Kapitalisme-Liberal akhirnya memunculkan banyak persoalan baru dalam kehidupan. Di bidang ekonomi, muncul krisis berulang akibat kerapuhan ekonomi Kapitalisme. Kebebasan dalam mengeksploitasi SDA mengakibatkan kerusakan alam dan ketimpangan. Pemerintahan yang mengambil ide ini pun akhirnya rajin hutang dan memotong subsidi rakyat. Privatisasi dan swastanisasi badan usaha milik negara kerap dilakukan.

Di bidang politik, muncul sistem demokrasi yang rusak dan merusak. Aturan yang dihasilkan lebih pro kepentingan asing dan tidak pro rakyat. Politisi akhirnya bekerja tidak untuk rakyat. Mereka lebih melayani kepentingan para pemilik modal.

Selain itu, politik adu domba digunakan untuk memecah-belah persatuan. Kelompok Islam dibagi-bagi. Satu diinjak, satu diajak. Diinjak dengan sebutan tendensius dan penghilangan karakter. Diajak dengan ragam proyek kucuran dana miliaran. Tidak aneh jika kemudian muncul istilah *Islam moderat*, toleran dan rahmatan lil alamin ala tafsir Barat. Gayung bersambut. Proyek itu pun dijalankan melalui lembaga keagamaan dan pemerintahan. Tujuannya jelas untuk menyesatkan umat dari pemahaman Islam *kāffah* yang berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah.

Di bidang sosial-budaya, manusia dijauhkan dari fitrahnya. Kaum perempuan dieksploitasi. Mereka dipaksa menghamba pada Kapitalisme-Liberal. Gaya hidup manusia tak lagi mencerminkan peradaban mulia. Kebebasan bertindak, berperilaku dan berpendapat dijadikan standar kehidupan. LGBT diapresiasi. Narkoba miras difasilitasi. Penghinaan terhadap agama ditoleransi. Alhasil, agama benar-benar dijauhkan dari kehidupan dan dianggap pengegang.

*Keempat: Karena Kapitalisme-Liberal mendukung rezim represif di Dunia Islam.* AS, Barat dan sekutunya telah berhasil menancapkan kukunya di negeri-negeri kaum Muslim. Pemimpin di negeri-negeri Muslim yang diangkat sesungguhnya telah mendapatkan mandat dan

restu mereka. Karena itu para pemimpin di negeri kaum Muslim itu rela menekan dan menzalimi rakyatnya sendiri demi memuaskan tuan mereka. Bukankah ini merupakan kejahatan kemanusiaan dan pertanggungjawabannya begitu berat di akhirat kelak?

Indonesia pada Orde Baru condong pada AS dan didukung penuh oleh AS. Muncullah penindasan dan pembatasan sistemis terhadap ekspresi wacana dan gerakan Islam politik. Kebijakan ini muncul pasca Soeharto mengambil alih kekuasaan pada 1967. Banyak kebijakan antagonistik terhadap Islam politik. Misalnya, pemaksaan partai Islam untuk berfusi ke PPP dan memerintahkan semua ormas Islam agar menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Rezim Orba bahkan mengerahkan kekuatan militer dan melakukan kekerasan yang acap kali menimbulkan korban jiwa untuk menghentikan oposisi kelompok Islam.

Lalu bagaimana dengan saat ini di era reformasi? Tampaknya kebijakan penguasa saat ini kepada umat Islam meniru rezim sebelumnya. Di era ini muncul Perppu Ormas yang otoriter, pembubaran kelompok kritis, upaya kriminalisasi ulama dan aktifis serta berbagai upaya menutup kebangkitan Islam.

Tak hanya itu. Genderang ‘*War on Terrorisme* (WOT)’ menjadi alasan AS dan Barat untuk terus mendukung rezim refresif di Dunia Islam. Sesungguhnya WOT, *radicalism and extremist* tak lain topeng untuk memerangi Islam dan umatnya. Dukungan itu tampak pada pernyataan Mike Pence bahwa Amerika berdiri bahu-membahu dengan Mesir dalam perang melawan terorisme. Hal itu disampaikan pada saat bertemu dengan Presiden Abdel Fattah el-Sissi di Kairo, Sabtu (20/1/2018). Mesir pun termasuk lima negara penerima bantuan militer AS terbesar. Dilansir dari situs resmi USAID <https://explorer.usaid.gov/cd/EGY>, Mesir dilaporkan menerima bantuan dana US\$ 1,1 miliar atau sekitar Rp 14,8 triliun.

AS pun mendominasi Arab Saudi. Donald Trump membuat kesepakatan bantuan militer

sebesar US\$ 110 miliar. Hal itu ditegaskan pada kunjungan 20-21 Mei 2017. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, menyebutkan bahwa pertemuan Trump dengan Raja Salman merupakan titik balik kedua negara serta sekutu mereka di kawasan Teluk.

Di sisi lain, Pangeran Mohammad bin Salman bin Abdul Azis bakal menerapkan konsep ‘Islam moderat dan terbuka’, yang ramah bagi semua agama dan dunia. Dia juga menegaskan, Arab Saudi akan berbuat lebih banyak untuk mengatasi ekstremisme. Arab Saudi juga mendorong “Visi 2030” yang berisi kebijakan ekonomi dan sosial jangka panjang untuk menghilangkan ketergantungan pada minyak serta membuka kran bagi investasi asing.

Sikap AS, Barat dan sekutunya juga tampak dari dukungan mereka kepada rezim di Pakistan, Afganistan, Suriah dan negeri kaum Muslim lainnya. Mereka paham bahwa kebangkitan Islam harus sedini mungkin ditekan. Semua kelompok yang menyerukan syariah dan Khilafah juga harus segera diamputasi sebelum tujuan itu terwujud kembali.

## Penutup

Penderitaan dan kesengsaraan dunia yang dihasilkan oleh negara-negara kapitalis, khususnya AS, tidak akan lenyap kecuali dengan tegaknya negara Khilafah yang akan menerapkan ideologi yang *haq*. Itulah ideologi Islam yang agung, yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. sebagai *rahmatan lil ‘alamin*. Pada saat itu, keadilan Islam akan dapat menyingkapkan ketamakan Kapitalisme-Liberal yang bersifat materialistik dan metode imperialisme mereka.

Karena itu, telah jelas musuh yang nyata bagi umat Islam saat ini. Itulah Kapitalisme-Liberal. Tidak ada jalan lain untuk mengatasi Kapitalisme-Liberal ini secara fundamental, kecuali dengan melawan menghilangkan ideologi ini dari muka bumi dengan mengerahkan segala daya upaya. □

# MELAWAN IMPERIALISME BARAT

**Adi Victoria**

(Penulis dan Aktivistis Dakwah)

Tahun 1992, bertempat di American Enterprise Institute, seorang ilmuwan politik bernama Samuel P. Huntington menyampaikan pidato yang dalam paparannya tersebut. Ia menjelaskan tentang teori Benturan Peradaban atau *Clash of Civilizations* (CoC). Teori ini menyatakan bahwa identitas budaya dan agama seseorang akan menjadi sumber konflik utama di dunia pasca Perang Dingin.

Setahun kemudian, yakni ditahun 1993, teori tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah artikel *Foreign Affairs* yang berjudul, "*The Clash of Civilizations?*" Artikel ini merupakan tanggapan atas buku karya mahasiswanya, Francis Fukuyama, yang berjudul *The End of History and the Last Man* (1992). Huntington kemudian mengembangkan tesisnya dalam bukunya yang berjudul, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (1996).

Dalam tesisnya tersebut, Huntington mengelompokkan negara-negara bukan berdasarkan sistem politik-ekonominya, namun berdasarkan budaya dan peradaban. Huntington mengidentifikasi ada 9 peradaban kontemporer yakni peradaban Barat, Cina, Jepang, Amerika Latin, Afrika, Hindu, Budha,

Islam dan Kristen Ortodoks. Benturan yang paling keras menurut Huntington akan terjadi antara kebudayaan Kristen Barat dan Kebudayaan Islam.

Pasca keruntuhan ideologi Sosialis-Komunisme internasional, tampak Barat dan para pengikut mereka di negeri-negeri Islam meyakini tesis Samuel Huntington (1996) tersebut. Tesis ini menyatakan bahwa era berikutnya yang harus dihadapi Barat adalah era perbenturan budaya dengan Timur. Kekuatan Timur yang paling ditakuti adalah Islam.

Barat memang tidak pernah berhenti melakukan segala upaya untuk mencegah kebangkitan umat Islam. Bangkitnya umat Islam yang bersatu dalam naungan Khilafah Islam merupakan lonceng kematian bagi Barat. Oleh karena itu, mereka akan mengerahkan segenap kemampuan serta kekuasaan yang mereka miliki untuk mencegah kebangkitan umat Islam tersebut. Salah satunya dengan cara mengadu domba umat Islam.

Akibatnya, Barat yang seharusnya menjadi *common enemy* (musuh bersama) bagi seluruh umat Islam malah tidak tampak menjadi musuh. Sebaliknya, sebagian kelompok umat Islam menganggap kelompok umat Islam lainnya sebagai musuh. Bahkan keberadaan

kelompok selain kelompok mereka tersebut, menurut mereka, harus dilenyapkan.

Iniilah yang seharusnya disadari oleh umat Islam. Mereka harus menyadari bahwa mereka memiliki musuh bersama, yakni Barat yang menjadi pengusung ideologi Kapitalisme-sekular yang telah bercokol bertahun-tahun di negeri ini. Kesadaran ini penting. Dengan adanya kesadaran tersebut, diharapkan umat akan semakin waspada terhadap cara-cara Barat dalam mengaburkan musuh sejati mereka, yakni Barat sebagai pengusung utama ideologi Kapitalis-sekularisme.

Ideologi ini telah terbukti menjadikan negeri ini terpuruk di berbagai sisi. Tentu yang menjadi korban utamanya adalah umat Islam sebagai penduduk mayoritas negeri ini. Umat Islam kini menderita akibat kemiskinan, pengangguran, harga-harga mahal, biaya pendidikan dan kesehatan tinggi, pajak yang makin meningkat, daya beli yang makin menurun, dsb.

Di sisi lain, segelintir orang, terutama asing dan aseng, menikmati sebagian besar kekayaan negeri ini. Tentu aneh dan ironis jika kemudian ada kalangan dari umat Islam—yang sebetulnya juga menjadi korban—yang membela asing dan aseng tersebut, termasuk mendukung sistem sekular-kapitalis-liberal yang menjadi biang atas segala persoalan yang terjadi negeri ini.

### Langkah-Langkah Pengaburan oleh Barat

Ada beberapa langkah yang digunakan Barat dalam upaya menggiring pemahaman umat Islam terkait siapa musuh mereka.

#### 1. Memainkan isu terorisme dan radikalisme.

Pasca Peristiwa 9/11, Amerika Serikat (AS) melalui Presidennya kala itu, George Walker Bush, menyatakan, *“Either you are with us or with terrorist. If you are not with us, you are against us* (Apakah Anda bersama kami atau bersama teroris. Jika Anda tidak bersama kami,

berarti Anda menantang kami).”

AS menggiring opini bahwa cuma ada dua pilihan: bersama dengan Amerika memerangi terorisme atau, jika tidak, berarti bersama teroris melawan AS.

AS menjadi pemain utama dalam kampanye global *War On Terorisme* (WTO). Siapa teroris yang dimaksud oleh Barat AS? Tidak lain adalah umat Islam. Artinya, *War On Terorism* sejatinya bermakna *War On Islam*. Hal ini terbukti dengan data yang ada dalam situs resmi Pemerintah AS tentang daftar FTO (*Foreign Terrorist Organizations*) yang sebagian besarnya atau sekitar 90% adalah kelompok-kelompok Islam (Lihat juga: <http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm>).

Lebih khusus lagi, AS menggiring opini bahwa teroris itu adalah mereka yang juga memperjuangkan Khilafah. Dalam transkrip pernyataan George Walker Bush yang dilansir oleh situs *washingtonpost.com* pada 5 September 2006 dikatakan, *“This caliphate would be a totalitarian Islamic empire encompassing all current and former Muslim lands, stretching from Europe to North Africa, the Middle East and Southeast Asia* (Khilafah ini akan menjadi Imperium Islam totaliter yang meliputi semua negeri Muslim saat ini, yang dulunya adalah negeri-negeri Muslim yang membentang dari Eropa hingga Afrika Utara dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara).”

Selain terorisme, AS juga memainkan isu radikalisme. Mengapa? Karena terorisme lebih khusus terkait perbuatan secara fisik. Adapun perjuangan atau aktivis yang tidak menjerus ke arah fisik tidak bisa dimasukkan ke dalam tindakan terorisme. Karena itulah mereka juga menggunakan isu radikalisme. Radikalisme berkaitan dengan siapapun—seseorang atau sebuah kelompok—yang memiliki pemahaman untuk mewujudkan kembali Kekhilafahan Islam.

Henry Kissinger, Asisten Presiden AS untuk urusan Keamanan Nasional 1969-1975, dalam

sebuah wawancara November 2004, mengungkapkan pandangannya, "... *What we call terrorism in the United States, but which is really the uprising of radical Islam against the secular world, and against the democratic world, on behalf of re-establishing a sort of Caliphate (...Apa yang kita sebut sebagai terorisme di Amerika Serikat, tetapi sebenarnya adalah pemberontakan Islam radikal terhadap dunia sekular, juga terhadap dunia yang demokratis, atas nama pendirian semacam Kekhalifahan).*"

## 2. Memecah-belah umat Islam.

Pada tahun 2003, lembaga *think-tank* (gudang pemikir) AS, yakni Rand Corporation, mengeluarkan sebuah kajian teknis yang berjudul, "*Civil Democratic Islam*". Secara terbuka Rand Corp membagi umat Islam menjadi empat kelompok Muslim: Fundamentalis, Tradisionalis, Modernis dan Sekularis.

Kelompok fundamentalis mereka sebut sebagai kelompok yang menolak nilai-nilai demokrasi dan budaya Barat serta menginginkan sebuah negara otoriter yang puritan yang menerapkan hukum Islam yang ekstrem (baca: Khilafah). Kelompok tradisionalis adalah kelompok yang menginginkan suatu masyarakat yang konservatif. Kelompok modernis mereka identifikasi sebagai kelompok yang menginginkan Dunia Islam menjadi bagian modernitas global. Mereka ingin memodernkan dan mereformasi Islam serta menyesuaikan Islam dengan perkembangan zaman. Adapun kelompok sekular adalah kelompok yang menginginkan Dunia Islam dapat menerima paham sekular dengan cara seperti yang dilakukan negara-negara Barat yang membatasi agama pada lingkup pribadi saja.

Setelah dilakukan pengelompokan umat Islam, langkah Barat berikutnya adalah melakukan politik belah bambu; mendukung satu pihak dan menjatuhkan pihak lain serta membenturkan antar kelompok. Caranya? Yakni

dengan melakukan empat hal :

1. Mendukung kelompok modernis dengan mengembangkan visi mereka tentang Islam sehingga mengungguli kelompok tradisionalis.
2. Mendukung kelompok tradisionalis sebatas untuk mengarahkan mereka agar berlawanan dengan kelompok fundamentalis dan untuk mencegah pertalian yang erat di antara mereka; menerbitkan kritik kaum tradisionalis atas kekerasan dan ekstremisme yang dilakukan kaum fundamentalis; mendorong perbedaan antara kelompok tradisionalis dan fundamentalis; mendorong kerjasama antara kaum modernis dan kaum tradisionalis yang lebih dekat dengan kaum modernis; juga mendorong popularitas dan penerimaan atas sufisme.
3. Mendukung kelompok sekularis secara kasus-perkasus; mendorong pengakuan fundamentalisme sebagai suatu musuh bersama; mendorong ide bahwa agama dan negara dapat dipisahkan.
4. Memusuhi kelompok fundamentalis dengan menunjukkan kelemahan pandangan keislaman mereka; mendorong para wartawan untuk mengekspos isu-isu korupsi, kemunafikan dan tidak bermoralnya kaum fundamentalis, pelaksanaan Islam yang salah dan ketidakmampuan mereka dalam memimpin dan memerintah.

Pada tahun 2007, Rand Corporation juga menerbitkan sebuah dokumen setebal 217 halaman, terdiri atas 10 bab yang berjudul: *Building Moderate Muslim Networks*.

Dalam dokumen tersebut, Rand Corp mengungkapkan peta jalan (*road map*) bagaimana membangun jaringan Muslim moderat. Kerena itu mereka mulai memberikan prioritas bantuannya kepada pihak-pihak yang dinilai paling cepat memberikan dampak dalam

perang pemikiran yakni: (1) akademisi dan intelektual Muslim yang liberal dan secular; (2) mahasiswa muda religius yang moderat; (3) komunitas aktivis; (4) organisasi-organisasi yang mengkampanyekan persamaan gender; (5) wartawan dan penulis moderat.

### 3. Melakukan monsterisasi dan stigma negatif terhadap ide Khilafah.

Ketika ISIS memproklamkan pendirian “Khilafah” pada 2014, Barat menjadikan itu sebagai sebuah momentum baru untuk melakukan monsterisasi terhadap ide Khilafah. Berbagai video eksekusi tawanan perang oleh ISIS menjadi alat propaganda Barat kepada dunia, termasuk kaum Muslim. Ini menjadi salah satu opini buruk bagi dakwah penegakkan syariah dan Khilafah. Seolah-olah Barat ingin mengatakan, “Jika ingin Khilafah, lihatlah apa yang dilakukan oleh ISIS.” Padahal “Khilafah” yang dideklarasikan oleh ISIS tidak memenuhi syarat-syarat sah sebagai sebuah Khilafah.

Mereka juga membuat stigma negatif terhadap Khilafah. Beberapa waktu lalu Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, menyebut ISIS di Irak dan Suriah telah melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Kristen, Syiah, Yazidi dan lainnya.

### Menghadapi Barat

Setelah sadar bahwa musuh sejati umat Islam saat ini adalah Barat sebagai pengusung utama ideologi Kapitalisme-sekularisme, tidak ada pilihan lain bagi umat Islam selain bersama-sama berjuang untuk menghadapi upaya-upaya jahat Barat tersebut.

Minimal umat harus paham bahwa sedang ada upaya nyata dari Barat untuk mengaburkan pemahaman umat Islam terkait siapa musuh mereka. Umat harus sadar bahwa Barat tengah membenturkan umat Islam satu sama lain.

Untuk membangun kesadaran ini harus melalui penyadaran politik. Pasalnya, yang

dihadapi oleh umat adalah bagian dari politik luar negeri Barat terhadap umat Islam di negeri-negeri Muslim, termasuk di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar.

Melihat siapa musuh sebenarnya harus berdasarkan pandangan Islam. Jelas, umat Islam bukanlah musuh bagi umat Islam yang lain. Bahkan sebaliknya, sesama Muslim adalah bersaudara. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾

*Sungguh kaum Mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian dirahmat (QS al-Hujurat [49]: 10).*

Karena itu tidak layak dan tidak boleh ada permusuhan antarkelompok umat Islam.

Kaum kafir Baratlah yang menjadi musuh sejati umat Islam. Mereka melakukan imperialisme terhadap negeri-negeri umat Islam. Mereka Bahkan membunuh penduduknya sebagaimana yang terjadi di Irak, Afganistan, Suriah, Libya dan negeri Muslim lainnya. Merekalah musuh yang nyata. Demikian sebagaimana firman Allah SWT:

﴿إِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عٰدُوْا مُّبِيْنًا﴾

*Sungguh kaum kafir itu adalah musuh kalian yang nyata (QS an-Nisa' [4]: 101).*

Oleh karena itu, umat Islam harus bersatu-padu untuk melawan Barat yang terus berusaha melakukan penindasan terhadap umat Islam. Persatuan tersebut harus dalam satu kekuatan politik global. Itulah Khilafah. Hanya Khilafah yang mampu menghentikan hegemoni Barat atas Dunia Islam. Khilafah yang dimaksud adalah Khilafah *ar-Râsyidah 'ala minhâj an-nubuwwah* (Khilafah yang berdasarkan metode kenabian). Itulah Khilafah sebagaimana yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin dulu.

*Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. □*

## KETIMPANGAN KRONIS BUKTI KEGAGALAN KAPITALISME

**K**etimpangan pendapatan, kekayaan dan konsumsi masyarakat di negara-negara Kapitalisme kian hari kian parah. Menurut Oxfam, organisasi non profit yang berbasis di Inggris, sebanyak 82 persen dari kekayaan yang dihasilkan tahun lalu hanya dihasilkan oleh satu persen terkaya dari populasi penduduk dunia. Lalu ada 3,7 miliar orang yang merupakan bagian paling miskin di dunia tidak mengalami peningkatan kekayaan.

Di Indonesia, Oxfam bersama INFID juga menemukan bahwa harta empat orang terkaya di negara ini sama dengan harta yang dimiliki oleh sekitar 100 juta orang miskin. Harta empat orang terkaya itu ditaksir mencapai US\$25 miliar atau setara Rp 333,8 triliun. Adapun total kekayaan 100 juta penduduk miskin di Indonesia sebesar US\$24 miliar atau sekitar Rp 320,3 triliun. Meskipun beberapa pihak mempersoalkan data itu, secara substansi, laporan tersebut sejalan dengan laporan BPS

bahwa ketimpangan di Indonesia memang memburuk. Tahun 2017, ukuran ketimpangan ekonomi, *gini ratio* telah mencapai 0,40, naik cukup tinggi dibandingkan tahun 1999 yang mencapai 0,30.

### Distribusi Tersumbat

Banyak faktor penyebab ketimpangan dalam sistem Kapitalisme. Oxfam menyebut penghargaan kepada pemilik modal sangat berlebihan dibandingkan dengan penghargaan kepada para pekerja. Hak-hak pekerja juga semakin terabaikan (Oxfam, 2018).

Pada saat yang sama, sistem perpajakan yang menjadi satu-satunya mekanisme redistribusi pendapatan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin tersumbat oleh strategi orang-orang kaya untuk menghindari pajak. Mereka mampu menyewa konsultan pajak yang bertalenta untuk memanfaatkan celah hukum agar dapat terhindar dari pembayaran pajak yang seharusnya (Stiglitz,

*The Great Devide*, 2016).

Jutaan dokumen keuangan 'Panama Papers' dan 'Paradise Papers' mengungkap bagaimana orang-orang kaya dan perusahaan-perusahaan besar menyembunyikan kekayaan mereka di negara yang bebas pajak. Ini merupakan gambaran betapa sistem pajak di negara-negara Kapitalisme dapat dikelabui oleh para pemilik modal. Mereka juga mampu melobi pihak eksekutif dan legislatif agar memberlakukan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Dengan cara itu, uang mereka dapat kembali ke negara hanya dengan tarif pajak yang rendah.

Institusi dan kebijakan pemerintah juga berkontribusi besar dalam menciptakan ketimpangan pendapatan. Kebijakan moneter yang berbasis suku bunga membuat para pemilik modal cukup menaruh uang mereka di berbagai institusi keuangan (perbankan, asuransi, reksadana, dll) dan mendapatkan bunga setiap bulan tanpa perlu menanggung risiko. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah yang menerbitkan obligasi untuk menarik investasi dari pemilik modal, sementara sumber pembayaran bunganya berasal dari pajak yang ditarik dari rakyat.

Kebijakan investasi dan perdagangan liberal juga mendorong eskalasi ketimpangan ekonomi. Dengan kebebasan investasi, perusahaan-perusahaan multinasional dengan mudah masuk dan berkompetisi ke negara-negara berkembang. Dengan segala keunggulan yang mereka miliki, mereka mampu menekan atau bahkan mematikan pelaku usaha domestik yang kalah efisien. Perdagangan luar negeri yang semakin liberal juga mempermudah masuknya barang-barang impor bersaing dengan produsen lokal. Produsen lokal pun tertindas. Akhirnya, kekayaan semakin terkonsentrasi pada sekelompok korporasi.

Penggunaan mekanisme pasar secara murni dalam megakses kebutuhan primer,

pangan, sandang, perumahan dan layanan primer seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi penyebab melebarnya ketimpangan. Dengan mekanisme itu, peluang orang-orang kaya lebih besar mendapatkan layanan tersebut dibandingkan penduduk miskin. Kualitas pendidikan dan kesehatan mereka pun relatif lebih baik. Daya saing mereka dalam menghasilkan pendapatan menjadi lebih tinggi.

Hal yang sama juga berlaku pada modal dan aset-aset produktif seperti tanah untuk pertanian. Untuk mendapatkan itu juga bertumpu pada mekanisme pasar. Akibatnya, orang-orang kaya lebih mudah mendapatkan modal untuk menguasai aset-aset produktif seperti perkebunan dan pertambangan, juga sektor finansial. Perusahaan-perusahaan besar juga lebih mudah untuk berekspansi, termasuk melakukan merger atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain. Bisnis mereka merambah ke berbagai lini, termasuk ke sektor finansial. Dengan cara itu, mereka mampu menyedot uang dari masyarakat untuk membiayai bisnis mereka sendiri. Tidak heran jika banyak grup bisnis di negara ini seperti Djarum, Salim, Lippo, Astra, CT Corp dan MNC memiliki perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. Proses tersebut membuat banyak industri semakin terkonsentrasi pada beberapa perusahaan bahkan terjadi kecenderungan monopoli.

Sebaliknya, orang-orang menengah ke bawah sangat sulit untuk mendapatkan modal yang murah. Sumber modal usaha terbanyak saat ini adalah perbankan. Namun, untuk mendapatkan kredit, selain layak dan *bankable*, seperti memiliki jaminan, nasabah yang berskala mikro dan kecil juga harus menanggung suku bunga yang jauh lebih tinggi dari suku bunga kredit korporasi.

Demikian pula dengan tanah. Tanah semakin banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, pertambangan dan

real estate. Sebaliknya, jutaan petani tak memiliki lahan sempit. Sebagian mereka bahkan terpaksa menjual lahan mereka akibat terjepit kebutuhan hidup yang semakin mahal, baik akibat pencabutan subsidi ataupun karena ketidakberesan pemerintah dalam mengendalikan harga. Peluang petani untuk mendapatkan lahan saat ini menjadi semakin muskil. Dengan pendapatan riil yang stagnan, atau bahkan negatif akibat tergerogoti inflasi, harga tanah terus tumbuh secara eksponensial. Jadilah mereka sebatas penggarap tuna lahan yang menerima upah murah.

Demikianlah. Kegagalan sistem Kapitalisme dalam mendistribusikan kekayaan secara adil telah melahirkan ketimpangan yang akut, yang melahirkan penderitaan bagi kebanyakan manusia. Upaya untuk menutupi kelemahannya—seperti pengenaan tarif yang lebih tinggi bagi korporasi besar, regulasi sistem keuangan, perbaikan sistem pendidikan, penguatan serikat pekerja, dan sebagainya—dalam kenyataannya membuat ketimpangan dan kemiskinan di negara-negara Kapitalisme menjadi persoalan yang cukup serius.

### Pandangan Islam

Pada dasarnya adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan adalah *sunnatullah*. Allah SWT berfirman:

*Dialah Yang menjadikan kalian para penguasa di bumi. Dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian (yang lain) beberapa derajat untuk menguji kalian atas apa yang telah Dia berikan kepada kalian (QS al-An'am [6]: 165).*

Meskipun demikian, selain mengatur mengenai tatacara kepemilikan dan pengembangan harta, Islam juga memiliki seperangkat aturan yang rinci mengenai metode distribusi harta. Tujuannya agar

kekayaan tidak terkonsentrasi di kalangan tertentu saja, namun juga dapat dinikmati oleh setiap individu.

Bahkan tujuan politik ekonomi dalam Islam adalah jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu, juga pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kadar kemampuan individu bersangkutan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian aspek utama dalam Islam adalah bagaimana agar kebutuhan primer masyarakat dapat terjamin pemenuhannya. Oleh karena itu, jaring pengaman sosial dalam Islam berlapis-lapis, mulai dari individu, keluarga, masyarakat dan negara. Individu wajib bekerja. Selain bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dirinya, ia juga wajib menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti anak-anak, wanita dan orangtua.

Pada saat yang sama, Islam mendorong agar nilai-nilai kemanusiaan terus tumbuh dalam masyarakat seperti memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa memandang latar belakangnya.

Selain itu, negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, atau tidak memiliki keluarga yang mampu menanggung kehidupan mereka.

### Distribusi Barang Modal

Terkait konsumsi atas barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan maka Islam telah memerintahkan negara untuk menyediakan semua itu secara gratis untuk rakyat sebagai bagian dari bentuk pelayanan kepada mereka. Pada saat yang sama, swasta juga diberi kesempatan untuk menyediakan fasilitas tersebut baik secara gratis ataupun berbayar.

Pada distribusi barang modal, khususnya uang dan tanah, metode distribusi Islam juga unik. Pada modal, Islam melarang adanya

penimbunan uang (*kanzu al-mal*) dan mendorong untuk diinvestasikan pada kegiatan yang halal. Pengembangan modal seperti riba, penipuan dan perjudian dilarang. Demikian pula model transaksi keuangan Kapitalisme yang sangat diminati dalam melipatgandakan kekayaan seperti investasi spekulatif pada bursa saham, pasar uang dan pasar komoditas, dilarang secara tegas di dalam Islam.

Pemilik modal dilarang untuk mengeksploitasi orang dengan modal yang mereka miliki seperti dalam bentuk riba. Sebaliknya, mereka dibolehkan bekerja sama secara fair dengan pihak lain. Masing-masing pihak yang menanggung manfaat juga harus menanggung biaya atau risiko (*al-ghunmu bi al-gurmi*). Oleh karena itu, problem *rent seeking* pada Kapitalisme—seseorang mendapatkan pendapatan bukan dengan menciptakan kekayaan atau menanggung risiko, tetapi sekadar mengambil kekayaan pihak lain baik mereka berproduksi ataupun tidak (Joseph Stiglitz, *Inequality and Economic Growth*, 2015)—tidak dijumpai dalam Islam. Lebih dari itu, negara juga melakukan intervensi dengan menyediakan modal bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik dalam bentuk pinjaman tanpa riba, maupun dalam bentuk hibah.

Problem kepemilikan dan pemanfaatan lahan juga diatur oleh Islam secara apik. Pengelolaan tanah mengikuti status hukum tanah apakah masuk tanah milik individu, milik umum ataupun milik negara. Islam juga mendorong masyarakat untuk menghidupkan tanah mati agar produktif. Khalifah juga berwenang untuk memberikan tanah agar digarap oleh pihak-pihak yang membutuhkan (*iqtha'*). Tanah pertanian baik yang berstatus hak milik atau hak guna, berdasarkan Ijmak Sahabat, jika tidak digarap selama tiga tahun maka akan diambil alih oleh negara untuk didistribusikan kepada pihak lain yang membutuhkan. Dengan demikian tanah dalam

Islam akan selalu produktif.

Sistem redistribusi kekayaan di dalam Islam, selain dibangun atas fondasi *ruhiyah*, juga tidak didasarkan pada akal manusia yang dapat diubah sesukanya sehingga menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya. Ukuran zakat, selain tetap, *nishab*-nya relatif kecil jika dibandingkan dengan pajak dalam sistem Kapitalisme. Zakat harta, misalnya, hanya 2,5% dari kekayaan bersih. Pada zakat tanaman semakin besar kontribusi manusia dalam pertanian maka zakatnya semakin kecil, yakni 5% jika menggunakan pengairan buatan dan 10% jika menggunakan pengairan secara alami (Al-Mishry, *Ushûl al-Iqtishâdi al-Islâmi*, 2010).

Adapun perpajakan bersifat terbatas dan temporal. Ia hanya dikenakan atas orang kaya, diperlakukan secara temporal, yakni pada saat pendapatan negara tidak cukup untuk membiayai pengeluaran yang bersifat mandatori seperti belanja pegawai, kegiatan jihad, pembangunan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan penduduk miskin, dan sebagainya. Dengan sistem ini, kegiatan investasi akan sangat bergairah, yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Demikianlah beberapa aturan sistem Islam dalam mengatur distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Penerapan sistem tersebut tidak hanya akan mendatangkan pahala, namun juga akan rahmat bagi umat manusia sebagaimana janji Allah dalam al-Quran.

Alhasil, di sinilah pentingnya institusi yang mengadopsi Islam dalam seluruh aspek kehidupan, yang dalam khazanah pemikiran Islam diistilahkan dengan Khilafah. Dengan itu Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dapat dirasakan oleh siapapun yang hidup di dalamnya atau berinteraksi dengannya. *Wallâhu a'lam bisshawâb*. [Muis]

# KAPITALISME MENDOMPLENG ISU PEREMPUAN

*Pratma Julia Sunjandari*

**B**elum genap satu abad, kepemimpinan Kapitalisme telah menimbulkan kerusakan luar biasa atas dunia dan seisinya. Tak terkecuali kerusakan yang menimpa perempuan, generasi dan keluarga.

Perusakan Kapitalisme terhadap Islam dan kaum Muslimin dilakukan Barat melalui hegemoni politik, ekonomi dan budaya yang direpresentasikan dalam perjanjian militer-keamanan, bantuan ekonomi-keuangan dan program budaya.

Kemerdekaan yang 'diterima' Dunia Islam usai Perang Dunia II pada hakikatnya adalah kolonialisme yang dijajah dengan format baru. Demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia dan liberalisme ekonomi menjadi kendaraan utamanya. Perempuan dengan kekhususan karakternya tak luput menjadi sasaran empuk. Mereka dijadikan komoditas sesuai watak mendasar Kapitalisme itu.

## Feminisasi Politik

Barat telah menggunakan hak-hak perempuan dan idealisme feminis untuk

mengejar dan memperpanjang kepentingan penjajahan mereka di Dunia Islam. Atas nama demokrasi, perempuan diperdaya untuk memuluskan proses legislasi yang menguntungkan Kapitalisme. Indonesia, sebagai bagian Dunia Islam yang terjajah, jugaturut mengadopsi feminisasi politik. Undang-undang No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD mengharuskan parpol baru dapat mengikuti Pemilu setelah menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan. Bersama UU No.31/2002 tentang Partai Politik dan UU No.12/2003 tentang Pemilu, proporsi keterwakilan perempuan di DPR diklaim menunjukkan tren meningkat.<sup>1</sup>

Namun ternyata, peningkatan jumlah perempuan legislator tidak pernah berkorelasi langsung dengan perlindungan atas diri dan keluarganya. Mereka hanya menjadi stempel atas proses politik yang menguntungkan 'suara kepentingan' yang menguasai negeri ini. Sebut saja kasus kekerasan atas anak, khususnya kekerasan seksual, yang dianggap Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai, trennya meningkat di awal tahun 2018.<sup>2</sup> Padahal DPR telah melegislasi sederet aturan perlindungan anak yang dianggap sebagai prestasi feminisasi politik. Ada UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.23/2004 tentang PKDRT jika kekerasan seksual terjadi dalam lingkup keluarga. Tahun 2014, UU No. 23/2002 diubah menjadi UU No.35/2014; UU ini memberikan pemberatan sanksi pidana dan denda yang lebih tinggi bagi pelaku kejahatan seksual. UU ini direvisi kembali menjadi UU No.17/2016.<sup>3</sup>

Nyatanya, sekalipun didukung Pemerintah melalui Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN AKSA) dan meluncurkan PP No.43/ 2017 tentang restitusi<sup>4</sup>, kasus kekerasan seksual itu tidak mungkin bisa selesai dengan deretan regulasi. Ini mematahkan klaim pegiat gender yang menganggap arus feminisasi akan mampu melindungi perempuan dan keluarganya. Pausalnya, penyebab utama problem perempuan, anak dan keluarga—termasuk kerusakan perilaku kesusilaan—adalah buah liberalisme. Liberalisme tiada lain merupakan nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Kapitalisme.

Feminisasi politik juga dimanfaatkan bagi kepentingan rezim. Perempuan, terutama Muslimah, turut disangkutdikan dengan isu deradikalisasi. Apalagi sepanjang tahun 2017 Indonesia dibombardir dengan pernyataan dan tindakan elit politik yang menganggap Indonesia darurat radikalisme. *RAND Corporation* memang merekomendasikan kelompok perempuan sebagai komunikator utama penderasan Islam moderat<sup>5</sup>, yang pada hakikatnya adalah agenda deradikalisasi. *Wahid Foundation* dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menerjemahkan kepentingan itu melalui survei nasional tentang tren toleransi

sosial keagamaan di kalangan perempuan Muslim Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa umumnya kaum hawa di Indonesia tidak radikal, dan lebih banyak mendukung kebebasan menjalankan ajaran agama atau kepercayaan<sup>6</sup> (apapun) ketimbang lelaki.

Kaum liberal menempatkan perempuan sebagai agen utama demokratisasi dan perubahan budaya<sup>7</sup> demi mendukung klaim mereka dalam mendiskriminasi Islam. Barat membutuhkan strategi ini untuk memenangkan perang gagasan yang sedang berlangsung di seluruh Dunia Islam. Sulit bagi Barat untuk mempengaruhi persepsi Muslim tentang agama mereka sendiri. Hanya umat Islam sendiri yang dianggap layak untuk menantang “penyalahgunaan Islam” oleh kaum radikal.

### Kapitalisasi Perempuan

Isu ekonomi juga tidak pernah henti menasar perempuan dalam agenda kapitalisasi. Tanggal 22 Desember 2017 lalu *BBC Indonesia*, misalnya, menurunkan artikel bombastis, “*Hari Ibu: Ekonomi Indonesia Bisa Lebih Makmur Jika Para Ibu Tidak Berhenti Bekerja*”. Mengutip riset *Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIEPEG)* yang mengukur ‘pengorbanan’ ibu yang berhenti bekerja demi mengurus anak dan rumah tangga secara ekonomi mencapai USD 123 miliar (Rp1600 triliun). Mereka menyimpulkan, pernikahan dan punya anak bakal menghambat pertumbuhan ekonomi karena pada 2016 ada 1,7 juta perempuan dari 11 juta perempuan usia 20-24 tahun keluar dari angkatan kerja karena dua sebab itu.<sup>8</sup>

Keuletan perempuan sebagai pekerja dimanfaatkan betul oleh Kapitalisme. Padahal hal itu harus diwujudkan dalam kebijakan berisiko seperti pengiriman perempuan sebagai tenaga kerja migran. Saat ini migran internasional mampu mengirim USD 432,6 miliar ke

negara-negara berkembang. Ini hampir tiga kali lipat dari jumlah bantuan pembangunan *Official Development Assistance (ODA)*<sup>9</sup> yang mencapai USD 131,6 miliar.<sup>10</sup> Karena itu lembaga-lembaga dunia memaksa Pemerintah membuat kebijakan yang dianggap kompatibel bagi migrasi aman. Tahun 2018 dicanangkan PBB agar Pemerintah membuat kebijakan migrasi yang menjamin perlindungan sosial untuk perempuan migran.<sup>11</sup> Bahkan secara khusus, di Asia Pasifik—yang paling banyak buruh migrannya—ditargetkan memperbanyak agen yang melayani pengiriman buruh migran.<sup>12</sup>

Sesungguhnya ini adalah kezaliman luar biasa bagi keluarga dan masyarakat marjinal di Indonesia. Tidak selayaknya perempuan miskin harus turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara *gara-gara* remitansi yang mereka hasilkan. Apalagi hasil penelitian KPAI menyatakan bahwa TKI perempuan meninggalkan anaknya dengan rentang usia seminggu hingga dua tahun, dalam waktu lebih dari sepuluh tahun. Dampaknya, anak mengalami masalah sosial kompleks meskipun secara fisik kebutuhannya terpenuhi.<sup>13</sup> Padahal masalah utama merebaknya kemiskinan di negara-negara berkembang bukan terjadi karena tidak memanfaatkan potensi perempuan. Penerapan sistem ekonomi kapitalislah yang memiskinkan rakyat dan memakmurkan para kapital.

### Khatimah

Demikianlah cara Kapitalisme mendompleng isu perempuan dan memperdaya perempuan agar memperjuangkan kepentingannya melalui agenda dan program sporadis. Padahal sesungguhnya semua masalah yang menyangkut isu perempuan, generasi dan keluarga tidak bisa berdiri sendiri tanpa melibatkan paradigma mendasar yang melatarbelakangi isu tersebut.

Begitulah kelicikan Kapitalisme. Memanfaatkan apapun dan siapapun demi mencapai semua tujuannya. Inilah sistem buruk yang kebusukannya kian terungkap nyata. Hendaknya setiap Mukmin menjadikan realitas buruk peradaban Kapitalisme menjadi alasan utama untuk mencampakkan ideolog kufur ini.

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوُونَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

*Perbandingan kedua golongan itu (kafir dan Mukmin) seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Tidakkah kalian mengambil pelajaran (dari perbandingan itu)? (QS Hud [11]: 24).*

### Catatan kaki

- <sup>1</sup> [https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q?gclid=EAlaQobChMIhrHd-4WV2QIVhZKPC2fwwv4EAAYASAAEgL9BFD\\_BwE](https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q?gclid=EAlaQobChMIhrHd-4WV2QIVhZKPC2fwwv4EAAYASAAEgL9BFD_BwE)
- <sup>2</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/21041771/awal-2018-tren-kekerasan-seksual-terhadap-anak-laki-laki-naik>
- <sup>3</sup> <http://www.muslimahnews.com/2018/02/01/kapitalisme-sekulerisme-tumbuh-suburkan-kekerasaan-seksual-pada-anak/>
- <sup>4</sup> Hak-hak anak di bawah umur yang menjadi korban suatu tindak pidana terpenuhi dengan ganti rugi, denda uang, sita rumah, atau tuntutan khusus dari keluarga korban
- <sup>5</sup> Building moderate Muslim networks / Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz, Peter Sickle. Published 2007 by the RAND Corporation
- <sup>6</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/wahid-foundation-80-persen-perempuan-tak-mau-jadi-radikal-4230646.html>
- <sup>7</sup> Pernyataan Anat Lapidot-Firilla, Direktur akademik proyek "Demokratisasi dan Kesetaraan Perempuan" di University Hebrew of Jerusalem
- <sup>8</sup> <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42428508>
- <sup>9</sup> Mekanisme 'bantuan ekonomi' yang dibuat Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),
- <sup>10</sup> <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/12/compilation-international-migrants-day>
- <sup>11</sup> <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/12/statement-joint-international-migrants-day>
- <sup>12</sup> <http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2017/12/asean-agencies-from-different-sectors-join-forces-to-improve-the-protection>
- <sup>13</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-hentikan-pengiriman-tki-yang-punya-balita/>

## BAITUL MAL

**K**hilafah Islamiyah merupakan institusi yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi politik (*ri'âyah su'ûn al-ummah*). Tugas *ri'âyah* tersebut berjalan sempurna jika ada instrumen pendukungnya. Di antara instrumen penting yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengurus urusan rakyat adalah harta.

Khilafah wajib memperhatikan kondisi keuangan negara yang hendak digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mencukupi kebutuhan rakyat. Struktur Khilafah yang bertugas menangani pemasukan dan pengeluaran harta adalah Baitul Mal. *Telaah Kitab* kali mengkaji Baitul Mal mulai dari definisi, sejarah, fungsi, dan hal-hal yang terkait sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 102 Kitab *Muqaddimah ad-Dustûr*.

### Lembaga dan Tempat

Baitul Mal bisa bermakna *lembaga*, bisa juga bermakna *tempat*.

Dalam konteks lembaga, Baitul Mal adalah departemen yang berwenang mengatur pemasukan dan pengeluaran harta sesuai dengan hukum-hukum syariah, baik dari sisi pengumpulan, penyimpanan maupun pemanfaatannya. Adapun dalam konteks tempat, Baitul Mal adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan harta-harta yang dikuasai negara.

Baitul Mal merupakan struktur negara yang berdiri sendiri. Dari sisi pengaturannya bersifat sentralistik. Wali (kepala daerah) tidak memiliki kewenangan mengatur harta, peradilan dan tentara. Tiga urusan ini menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

Setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang maupun harta lain yang kaum Muslim berhak di dalamnya dan bukan milik seorang individu menjadi hak Baitul Mal. Tidak ada perbedaan, baik harta tersebut sudah masuk ke dalamnya maupun belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk



orang-orang yang berhak menerimanya— untuk kemaslahatan kaum Muslim dan pemeliharaan urusan mereka serta untuk biaya mengemban dakwah—masuk ke dalam tugas dan kewenangan Baitul Mal.

Baitul Mal dalam konteks lembaga didirikan pertama kali setelah turunnya al-Anfal turun. Saat itu para Sahabat berselisih pendapat mengenai harta *ghanimah*. Allah SWT berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ  
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

*Mereka (para Sahabat) akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang anfal, katakanlah bahwa anfal itu milik Allah dan Rasul. Karena itu bertakwalah kepada Allah, perbaikilah perhubungan di antara sesama kalian serta taatlah kepada Allah dan Rasulullah jika kalian benar-benar beriman (QS al-Anfal [8]: 1).*

Said bin Zubair berkata: *Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang Surat al-Anfal, ia menjawab, "Surat al-Anfal turun di Badar."*

*Ghanimah* Badar merupakan harta pertama yang diperoleh kaum Muslim setelah *ghanimah* yang didapat dari ekspedisi (*sarayah*) Abdullah bin Jahsyi. Pada saat itu, Allah SWT menjelaskan pembagiannya dan menjadikan harta itu sebagai hak seluruh kaum Muslim. Allah SWT memberikan wewenang kepada Rasul saw. untuk membagikan harta itu dengan mempertimbangkan kemaslahatan kaum Muslim. Oleh karena itu *ghanimah* menjadi hak Baitul Mal. Pembelanjaan harta Baitul Mal menjadi wewenang Khalifah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan kaum Muslim.

Adapun Baitul Mal dengan makna tempat penyimpanan harta, maka pada masa Nabi

saw. belum ada tempat khusus. Kadang-kadang beliau menyimpan harta di masjid, seperti yang dituturkan oleh Imam al-Bukhari dari Anas ra. Imam al-Bukhari juga menuturkan sebuah hadis dari 'Uqbah bahwa Nabi saw. pernah menyimpan harta di salah satu kamar istri beliau. Beliau pun sering menyimpan harta di tempat penyimpanan (gudang), seperti yang dituturkan oleh Imam Muslim dari 'Umar ra. Harta yang masuk pada saat itu belum begitu banyak. Selain itu, harta yang masuk selalu habis dibagikan kepada kaum Muslim, serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Pada masa itu Rasulullah saw. segera membagikan harta *ghanimah* dan seperlima bagian beliau (*al-akhmâs*) tanpa menunda-nundanya lagi.

Handhalah bin Shaif—yang juga salah seorang sekretaris Rasulullah saw.—meriwayatkan: Rasulullah saw. pernah bersabda, "*Tetapkanlah dan ingatkanlah aku (laporkanlah kepadaku) atas segala sesuatunya.*" Hal ini beliau ucapkan tiga kali."

*Handhalah pun berkata, "Suatu saat pernah tidak ada harta atau makanan apapun padaku selama tiga hari. Lalu aku melapor kepada Rasulullah. Beliau sendiri tidak tidur, sementara di sisi beliau tidak ada apapun."*

Biasanya Rasulullah saw. membagi-bagikan harta pada hari itu juga. Hasan bin Muhammad menyatakan, "*Rasulullah saw. tidak pernah menyimpan harta, baik siang maupun malam.*"

Apabila harta datang pada pagi hari, tidak sampai setengah hari harta tersebut sudah habis dibagikan. Demikian juga jika harta itu datang siang hari; tidak pernah sampai tersisa hingga malam harinya. Oleh karena itu, tidak pernah ada harta tersisa yang memerlukan tempat penyimpanan. Keadaan itu berlangsung sepanjang masa Rasulullah saw.

Ketika Abubakar menjadi khalifah, beliau juga memperlakukan harta sama seperti Nabi saw. Menurut Ibnu Saad dari Sahal bin Abi



Hatsmah dan lain-lain, di dalam *Thabaqât*-nya, bahwa Khalifah Abu Bakar memiliki Baitul Mal di daerah Sunh yang tidak dijaga oleh seorang pun. Pada tahun kedua Kekhilafahannya, Abu Bakar ra. memindahkan Baitul Mal di rumahnya untuk menyimpan harta yang masuk ke Kota Madinah. Ia membelanjakan semua harta yang ada di tempat tersebut untuk kaum Muslim dan kemaslahatan mereka

Jika harta datang kepada beliau dari sebagian daerah kekuasaannya, beliau membawa harta itu ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikan harta tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kadang-kadang Khalifah Abubakar menugaskan Abu Ubaidah bin al-Jarrah untuk melakukannya. Hal ini dapat diketahui pada saat Abu Ubaidah berkata kepada beliau, *"Aku telah memberikan (membagikan) harta (yang diberikan engkau) hingga tidak bersisa."*

Pada saat Umar menjadi khalifah, beliau mengumpulkan para bendahara, dan memasuki rumah Abubakar, seraya membuka Baitul Mal. Beliau hanya mendapatkan satu dinar di dalamnya.

Ketika penaklukan-penaklukan wilayah lain semakin banyak pada masa Khalifah Umar dan kaum Muslim berhasil menaklukan negeri Persia dan Romawi, maka semakin banyak harta yang mengalir ke Kota Madinah. Khalifah Umar lalu membuat bangunan khusus untuk menyimpan harta (Baitul Mal), membentuk bagian-bagiannya, mengangkat para penulisnya serta menetapkan santunan untuk para penguasa dan untuk keperluan pembentukan tentara. Kadang-kadang beliau menyimpan seperlima bagian dari harta *ghanîmah* di masjid dan segera membagi-bagikan harta itu tanpa menunda-nunda.

Demikianlah. Seiring dengan meluasnya kekuasaan Khilafah Islamiyah dan semakin banyaknya penaklukan, pemasukan negara Khilafah semakin membesar. Adanya Baitul Mal

dirasakan sebagai sebuah kewajiban, baik dalam konteks adanya tempat khusus penyimpanan harta maupun lembaga yang bertugas mengatur lalu-lintas harta yang menjadi hak kaum Muslim.

Pihak yang berwenang mengatur perbendaharaan Baitul Mal adalah Khalifah. Di dalam riwayat-riwayat sahih dituturkan bahwa Nabi saw.—dalam kapasitasnya sebagai kepala negara—ada kalanya mengatur urusan Baitul Mal secara langsung. Imam Ahmad dan at-Tirmidzi menuturkan sebuah riwayat dari 'Abdurrahman bin Samrah, bahwa Rasulullah saw. pernah menerima sumbangan 'Utsman bin 'Affan ra sebanyak 1000 dinar di kamar beliau.

Imam al-Bukhari juga menuturkan sebuah hadis dari Anas ra. bahwa Nabi saw. mendapatkan harta dari Bahrain. Beliau lalu memerintahkan agar harta itu disimpan di dalam masjid. Setelah selesai shalat, beliau membagi-bagikan harta tersebut kepada masyarakat.

Pada masa Khalifah Umar bin al-Khatthab ra., beliau ra. kadang-kadang juga mengatur urusan harta Baitul Mal secara langsung. Imam Syafii menuturkan sebuah riwayat di dalam Kitab *Al-Umm*, ketika terjadi bencana di Irak, beliau memerintahkan penjaga Baitul Mal untuk memerintahkan agar semua harta diletakkan di masjid lalu dibagikan.

Kadang-kadang Nabi saw. mengangkat seorang Sahabat untuk membagi-bagikan harta Baitul Mal atau untuk mengurus urusan-urusan harta. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dituturkan bahwa Nabi saw. sering memerintah Sahabat untuk membagi-bagikan harta yang tersimpan di rumah beliau. Masih banyak riwayat senada yang menunjukkan bahwa Nabi saw. kadang-kadang menunjuk Sahabatnya untuk membagi-bagikan harta Baitul Mal.

Demikianlah. Riwayat-riwayat di atas



menunjukkan bahwa keberadaan Baitul Mal dan kewajiban mendirikan Baitul Mal, baik dari sisi tempat maupun lembaga, telah ditetapkan berdasarkan riwayat-riwayat sahih.

### Pembagian Baitul Mal

Baitul Mal dibagi menjadi dua bagian: *Qism al-Waridât* (Bagian Pemasukan) dan *Qism an-Nafaqât* (Bagian Pengeluaran).

Bagian Pemasukan membawahi tiga bagian yaitu:

1. Diwan *Fai'* dan *Kharaj*. Bagian ini mengurus harta-harta *ghanîmah*, *kharaj*, *fai'*, tanah-tanah, *jizyah* dan pajak (*dlarîbah*).
2. Diwan Kepemilikan Umum (*Diwan Milkiyyah 'Ammah*). Bagian ini mengurus semua harta milik umum, mulai dari minyak, gas, listrik, mineral dan tambang, dan lain sebagainya.
3. Diwan *Shadaqât* (Diwan Yang Mengurus Zakat).

Adapun Bagian Pengeluaran membawahi delapan bagian yakni:

1. Diwan *Dâr al-Khilâfah*. Bagian yang mengatur urusan rumah tangga negara Khilafah.
2. Diwan *Mashâlih ad-Dawlah*. Bagian yang mengatur urusan dan kepentingan negara.
3. Diwan *al-'Athâ*. Bagian yang membawahi urusan harta-harta pemberian negara.
4. Diwan Jihad. Bagian yang mengatur urusan harta yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas jihad fi sabilillah.
5. Diwan *Mashârif ash-Shadaqât*. Bagian yang berwenang mengatur urusan distribusi zakat kepada pihak yang berhak menerimanya.
6. Diwan *Mashârif al-Milkiyyah al-'Ammah*. Bagian yang bertugas mengatur distribusi dan pemanfaatan harta-harta milik umum.
7. Diwan *ath-Thawâri'*. Bagian yang

**Saat Khilafah berdiri atas ijin dan pertolongan Allah SWT, Khalifah dengan segera membentuk Baitul Mal sebagai salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan urusan negara dan rakyat.**

mengurus harta-harta yang digunakan untuk menangani bencana atau musibah yang menimpa rakyat.

8. Diwan *al-Muwâzanah al-'Ammah*, Diwan *al-Muhâsabah al-'Ammah* dan *al-Murâqabah al-'Ammah*. Tiga bagian ini bertugas melakukan kontrol terhadap harta-harta yang dipergunakan oleh negara, berdasarkan arahan dari Khalifah.

Saat Khilafah berdiri atas ijin dan pertolongan Allah SWT, Khalifah dengan segera membentuk Baitul Mal sebagai salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan urusan negara dan rakyat.

*WalLâhu al-Musta'ân wa Huwa Wâliyyu at-Tawfîq.* [Gus Syams]

# BETULKAH DALIL KHILAFAH LONGGAR?

## Soal:

*Benarkah dalil tentang Khilafah—baik yang menyangkut kewajiban mendirikan Khilafah, bentuk Khilafah dan lain-lain—merupakan dalil umum, yang tidak spesifik? Dengan kata lain, benarkah dalil tentang Khilafah itu longgar sehingga bisa diterjemahkan dengan sistem apapun buatan manusia, seperti negara demokrasi? Bagaimana hukum menggunakan maqâshid syarî'ah atau ma'alat af'âl untuk membatalkan hukum yang qath'i? Bolehkah mengijtihadkan hukum yang dinyatakan oleh nas?*

## Jawab:

Sebelum menjawab pertanyaan ini, penting kita merenungkan sabda Nabi saw. tentang sosok yang lebih ditakutkan Nabi saw. menimpa umatnya ketimbang Dajjal. *Pertama:* Mereka adalah *aimmah mudhillun*, pemimpin yang menyesatkan.<sup>1</sup> *Kedua:* Orang munafik yang pintar, dan berdebat dengan menggunakan al-Quran.<sup>2</sup>

Karena itu pesan Sayyidina 'Ali penting menjadi pegangan kita:

لَا تَعْرِفِ الْحَقَّ بِالرِّجَالِ أَعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفِ أَهْلَهُ  
*Janganlah kamu mengenali kebenaran melalui orangnya. Akan tetapi, kenalilah kebenaran itu (terlebih dulu), maka kamu pasti akan mengenali orangnya (apakah dia orang benar atau salah).<sup>3</sup>*

Adapun terkait dengan pertanyaan di atas maka jawabannya sebagai berikut:

*Pertama,* mengenai dalil Khilafah, mari kita



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

bandingkan dengan dalil tentang kewajiban shalat. Ketika Nabi saw. diperintahkan mendirikan shalat, Nabi saw. naik di atas Bukit Shafa, memperagakan tatacara shalat. Setelah selesai, Nabi saw. menyatakan kepada para Sahabat:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

*Shalatlah kalian sebagaimana kalian tadi melihat aku mengerjakan sahalat (HR al-Bukhari).*

Setelah itu Nabi saw. mempraktikkan shalat tersebut sepanjang hayatnya. Lalu hal itu dilihat, didengar dan dipraktikkan oleh para Sahabat pada zaman Nabi saw. Semua tindakan, ucapan dan praktik Nabi saw. dalam mengerjakan shalat tersebut merupakan penjelasan detail tentang tatacara shalat yang diwajibkan oleh Allah SWT. Apakah setelah semuanya itu kita akan mengatakan bahwa dalil-dalil tentang shalat bersifat umum, tidak spesifik?

Sekarang mari kita bandingkan dengan Daulah Islam dan Khilafah. Nabi saw. diperintahkan oleh Allah SWT:

«وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ  
 وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ»

*Hendaklah kamu menerapkan pemerintahan di antara mereka menurut apa (wahyu) yang telah Allah turunkan. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa (wahtu) yang telah Allah turunkan kepadamu... (QS al-Maidah [5]: 49).*

Di dalam ayat ini perintah-Nya tegas,

“menerapkan hukum” yang juga berarti, “menerapkan pemerintahan”. Sebab, logikanya, bagaimana mungkin Allah SWT memerintahkan Nabi agar menerapkan hukum, tetapi tidak ada institusi yang digunakan untuk mengeksekusi perintah tersebut.

Selain itu ayat ini juga merupakan ayat yang diturunkan di Madinah ketika Nabi saw. telah mendapatkan Baiat Aqabah kedua dan telah menjadi kepala Negara Islam di Madinah. Nabi saw. pun menjalankan pemerintahannya, A sampai Z. Semuanya berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan. Semua ucapan, tindakan dan kebijakan Nabi itu diperagakan secara *live* selama 10 tahun di Madinah. Semuanya itu dilihat, didengar dan diikuti oleh para Sahabat.

Semasa hidupnya Nabi saw. pun dengan tegas berpesan agar kaum Muslim memegang teguh Sunnah beliau dan Sunnah Khulafaur Rasyidin setelah beliau. Bahkan beliau mengingatkan agar keduanya digigit dengan gigi geraham, agar tidak lepas:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ  
مَنْ بَعْدِي، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ»

*Kalian wajib berpegang teguh dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah Sunnah itu dengan gigi geraham (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).*

Selain itu bentuk dan model Khilafah juga sudah dijelaskan dengan detail. Nabi saw. menyatakan:

«تَكُونُ النَّبِيُّوَةُ فَيَنْكُمُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ  
يَرْفَعُهَا اللهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً  
عَلَى مِنْهَاجِ النَّبِيُّوَةِ...»

*Ada era kenabian di antara kalian, dengan izin Allah akan tetap ada, kemudian ia akan diangkat oleh Allah jika Allah berkehendak*

*untuk mengangkatnya. Setelah itu akan ada era Khilafah yang mengikuti metode kenabian (HR Ahmad).*

Nabi saw. telah menjelaskan praktiknya selama 10 tahun di Madinah, baik dalam ucapan, perbuatan maupun *taqrir* [pengakuan]. Setelah beliau wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh para Sahabat. Pemerintahan itu beliau sebut sebagai *Khilafah 'ala minhâj nubuwwah* karena memang mereka hanya meng-*copy paste* pemerintahan Nabi saw. Apakah semuanya ini bukan merupakan dalil yang spesifik? Tidak cukupkah praktik pemerintahan Nabi saw. selama 10 tahun bersama dengan para Sahabat?

Memang, di dalamnya ada aspek ijtihad. Itu sudah pasti, sebagaimana *furu'* shalat. Namun demikian inti, rukun dan bentuknya sudah baku. Jadi, bagaimana mungkin mengatakan dalil-dalil tentang Khilafah masih bersifat umum, tidak spesifik? Padahal dalil-dalilnya sama dengan dalil shalat. Dua-duanya juga sama-sama dipraktikkan sepanjang hidup Nabi saw. dan para Sahabat. Kalau terkait shalat, mereka tidak mempersoalkan dalil-dalil 'âm dan *takhshîsh* atau *tafshîl*-nya, mengapa dalil-dalil tentang Khilafah mereka persoalkan? Di mana nalarnya?

Lagi pula, dalil umum itu biasanya hanya satu dua. Adapun ucapan, tindakan dan *taqrîr* Nabi saw. dalam menjalankan pemerintahan, itu berlangsung selama 10 tahun. Belum lagi pemerintahan Khilafah yang telah menjadi Ijmak Sahabat yang berlangsung selama 30 tahun. Semuanya begitu detail. Lalu masihkah disebut dalil umum? Di mana nalarnya? Karena itu tidak ada ulama ushul manapun menyatakan pendapat begitu, kecuali orang buta dan tuli. Karena itu pula, wajar ketika 'Ali Abdurraziq menyatakan begitu, Hai'ah Kibar Ulama' al-Azhar, memandang dia tidak layak lagi disebut ulama sehingga status keulamaannya dicopot.<sup>4</sup> Pasalnya, pendapat



dia tidak bisa diterima akal sehat orang yang paham Islam, dalil, ushul dan bahasa Arab. Jelas memalukan.

Di antara mereka ada yang bersandar pada penjelasan as-Syathibi dalam kitabnya, *“Khilafah itu umum atau khusus, mengikuti apa yang dijelaskan oleh hadis.”* Padahal Asy-Syathibi dalam penjelasannya justru menyatakan, *“Tampak bahwa hukum tersebut bersifat “kulli” [menyeluruh] dan “âm” [umum], tidak dibatasi. Karena itu bagian-bagian dari seluruh kekuasaannya tidak boleh menyimpang darinya, baik secara umum maupun khusus. Jika demikian, yang dituntut adalah siapapun yang berada di posisi orang yang menggantikannya maka hukum-hukumnya, maqâshid dan aliran hukumnya harus diberlakukan sama.”*<sup>5</sup>

Karena itu, logika ini, yang sekaligus premis pertama, jelas batil.

*Kedua*, benarkah dalil-dalil tentang Khilafah itu longgar, sehingga bisa diadaptasi dalam

sistem pemerintahan demokrasi, yang diklaim sebagai sistem dengan nilai-nilai Islam itu sendiri? Logika ini sebenarnya dibangun dengan premis pertama, bahwa dalil-dalil Khilafah itu bersifat umum, tidak spesifik. Padahal premis ini sudah batil dan tidak bisa diterima nalar.

Selain itu harus dipahami, *Khilafah* adalah *isim syar’i* [istilah syariah]. Artinya, *Khilafah* ini bukan istilah buatan manusia. Pasalnya, istilah ini pertama kali digunakan dalam nas syariah dengan konotasi yang khas, berbeda dengan makna yang dikenal oleh orang Arab sebelumnya. Ini sebagaimana kata *shalat*, *haji*, *zakat*, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Istilah *Khilafah* dengan konotasi syariah ini digunakan dalam banyak hadis Nabi saw. dalam banyak riwayat.<sup>7</sup>

Adapun pemangkunya disebut *khalifah*, jamaknya *khulafâ’*. Istilah ini pun dinyatakan dalam banyak hadis.<sup>8</sup>

Karena itu istilah *Khilafah* dan *Khalifah* adalah istilah syariah, yang memang digunakan dalam nas syariah, yang bersumber dari wahyu. Istilah ini kemudian diadopsi para ulama ushuluddin, fikih dan *tsaqâfah* Islam yang lainnya dengan konotasi sebagaimana yang dimaksud oleh banyak hadis Nabi saw.

Konotasinya jelas sehingga tidak ada perbedaan di kalangan ulama dan umat sepanjang 14 abad.<sup>9</sup>

Dengan demikian, upaya menyerang dan mengaburkan fakta Khilafah, baik tentang dalil, bentuk dan modelnya dengan kata-kata, “dalilnya umum, tidak spesifik”, atau “tidak mempunyai bentuk dan model baku”, jelas bertolak belakang 180 derajat dengan faktanya. Ucapan ini hanya keluar dari bekas ulama, seperti ‘Ali Abdurraziq, atau kaum munafik yang pintar bersilat lidah, atau “Dajjal” yang menyesatkan sebagaimana dalam hadis Nabi saw. di atas.<sup>10</sup>

Anehnya, pada saat yang sama, pemerintahan demokrasi yang jelas-jelas tidak

**upaya menyerang dan mengaburkan fakta Khilafah, baik tentang dalil, bentuk dan modelnya dengan kata-kata, “dalilnya umum, tidak spesifik”, atau “tidak mempunyai bentuk dan model baku”, jelas bertolak belakang 180 derajat dengan faktanya. Ucapan ini hanya keluar dari bekas ulama, seperti ‘Ali Abdurraziq, atau kaum munafik yang pintar bersilat lidah, atau “Dajjal” yang menyesatkan sebagaimana dalam hadis Nabi saw. di atas.**

ada dalilnya, bahkan bertentangan dengan Islam, dijustifikasi sedemikian rupa agar bisa diterima. Demokrasi jelas sama sekali tidak ada dalilnya, jangankan *dalâlah manthûq, mafhûm*-nya saja tidak ada. Namun demikian, mereka tetap saja *ngotot* bahwa demokrasi itu identik dengan Islam. Di mana nalarnya?

Karena itu upaya mengadaptasi sistem demokrasi yang jelas bertentangan dengan Islam, dengan klaim sebagai pemerintahan Islam jelas menyalahi dalil, fakta dan nalar sehat.<sup>11</sup>

Ketiga, bagaimana kedudukan *maqâshid syarî'ah* dan *ma'alat al-af'âl* dalam merekonstruksi hukum?

*Maqâshid asy-Syarî'ah*, yaitu *jalb al-mashâlih* [mewujudkan kemaslahatan] *wa dar'u al-mafâsid* [mencegah kerusakan], ini dibahas oleh As-Syathibi, dalam kitabnya, *Al-Muwâfaqât*. Hanya saja, pendapat beliau kemudian diselewengkan, sebagai tujuan pensyariaan hukum syariah, sehingga diklaim sebagai *'illat* hukum, bahkan kemudian diklaim sebagai dalil syariah itu sendiri. Padahal *maqâshid asy-syarî'ah* itu bukan *'illat* hukum, apalagi dalil syariah. *Maqâshid asy-syarî'ah* ini adalah tujuan dari pensyariaan dan penerapan hukum syariah secara *kâffah* Allah SWT berfirman:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

*Kami tidak mengutus kamu (Muhammad)—dengan membawa syariah, red.—kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta (QS al-Anbiya' [29]: 107).*

*Rahmat[an] li al-'alamin* di sini adalah *jalb al-mashâlih* [mewujudkan kemaslahatan] *wa dar'u al-mafâsid* [mencegah kerusakan]. *Jalb al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid* ini adalah *hasil* dari penerapan syariah secara *kâffah* sehingga tidak bisa disebut sebagai *'illat* hukum, baik untuk hukum secara keseluruhan

maupun satu-persatu hukum.<sup>12</sup>

Apalagi jika dengan alasan *jalb al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid* menolak hukum yang *qath'i* atau yang telah disepakati.

Dalam konteks ini, Imam Asy-Syathibi sendiri menyatakan:

وَأِنْ قَصَدَ غَيْرَ مَا قَصَدَهُ الشَّارِعُ، فَقَدْ جَعَلَ مَا قَصَدَ الشَّارِعُ مُهْمَلًا الْإِغْتِيَابِ... وَذَلِكَ مُضَادَّةٌ لِلشَّرِيعَةِ ظَاهِرَةٌ

*Jika dia menghendaki selain apa yang dikehendaki oleh Asy-Syâri' maka dia benar-benar telah menjadikan apa yang dikehendaki oleh Asy-Syâri' itu tidak lagi diakui [diterima]...Tindakan itu jelas secara nyata bertentangan dengan syariah.<sup>13</sup>*

Kewajiban adanya Khilafah dan Khalifah, sebagaimana yang ditahkan dan dijelaskan oleh *Asy-Syâri'*, jelas-jelas hendak dideligitimasi oleh mereka dengan menggunakan *'illat* dan dalil *maqâshid asy-syarî'ah*. Beragumen dengan logika seperti ini jelas cacat. Bahkan Asy-Syathibi sendiri menolaknya.

Menolak Khilafah dengan menggunakan kaidah *ma'alat al-af'âl* [dampak perbuatan] juga tertolak. Dikatakan, misalnya, kewajiban adanya Khilafah dan Khalifah saat ini tidak wajib karena bisa menimbulkan kemadaratan yang lebih besar, perpecahan, perang saudara dan sebagainya. Kesimpulan seperti ini dihasilkan dari penggunaan kaidah *ma'alat al-af'âl* [dampak perbuatan]. Sama seperti orang yang mengatakan, memakai cadar hukumnya wajib bagi perempuan agar terhindar dari fitnah. Kesimpulan ini juga menggunakan kaidah *ma'alat al-af'âl* [dampak perbuatan]. Hukum yang ditarik dengan cara seperti ini jelas keliru karena tidak menggunakan dalil, tetapi hanya menggunakan akal murni.

*Ma'alat al-af'âl* [dampak perbuatan], baik sebagai dalil maupun kaidah, jelas tidak bisa



digunakan; kecuali dalam perkara yang dinyatakan oleh nas dan tidak membatalkan hukum yang ditetapkan oleh nas. Jika tidak, maka tidak boleh digunakan.

*Keempat*, bolehkah mengijtihadkan perkara yang telah dinyatakan oleh nas? Dalam konteks ini, ada kaidah ushul yang menyatakan:

لَا إِجْتِهَادَ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ

*Tidak boleh ada ijihad ketika [perkara] itu telah dinyatakan dalam nas.*

Khilafah, Khalifah dan sistem pemerintahan Islam ini merupakan perkara yang telah dinyatakan dalam nas sehingga tidak boleh ada ijihad, apalagi dengan tujuan menegasikan kewajibannya; menolak bentuk, sistem dan modelnya. Hanya dalam perkara yang tidak dinyatakan oleh nash, tidak ada larangan untuk dilakukan ijihad.

*Wallâhu a'lam.* □

### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> Lihat, Hr. Ahmad, Abu Dawud [4252] dan at-Tirmidzi [2229]. Menurut al-Manawi, *"Abu al-Biqā' berkata, maknanya adalah, "Aku lebih takutkan terhadap umatku, selain Dajjal, lebih aku takutkan ketimbang terhadap Dajjal."* Dalam *Syarah Shahih Muslim*, Imam an-Nawawi menyatakan, *"Maknanya adalah sesuatu yang lebih aku takutkan terhadap umatku, yang paling layak untuk ditakuti adalah para pemimpin yang menyesatkan."* [Lihat, Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz XVIII]. Sufyan bin 'Uyainah berkata, *"Mereka mengatakan, "Siapa saja ulama kita yang rusak, di dalam dirinya menyerupai Yahudi. Siapa saja ahli ibadah di antara kita yang rusak, maka di dalam dirinya menyerupai Nasrani. Tidak hanya satu ulama' salaf yang mengatakan, "Berhati-hatilah kalian terhadap fitnah orang berilmu yang rusak, dan ahli ibadah yang bodoh. Karena fitnah keduanya menjadi fitnah bagi semua orang yang terkena fitnah."* [Lihat, Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, Juz I/197]
- <sup>2</sup> Lihat, Hr. Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz I/22 dan 44; Ibn 'Abdi al-Barr, *Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadhlil*, hadits no. 1420.
- <sup>3</sup> Lihat, Imam al-Ghazali, *al-Munqidz min ad-Dhalal*, hal. . *Hujjatu al-Islam*, Imam al-Ghazali, mengutip ucapan Sayyidina 'Ali ini dalam kitab tersebut untuk mengingatkan kaum Muslim agar tidak termakan dengan fitnah para Filsuf Muslim, sehingga mereka tersesat.
- <sup>4</sup> Lihat, Dr. Sayyid Taqiuddin, *Radd Hai'ah Kibar Ulama' 'ala Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukm li as-Syaikh 'Ali Abdurrazziq*, Hadiyyah Majallah al-Azhar al-Majaniyyah, Rabiul Awwal 1414 H, hal. 46.
- <sup>5</sup> Lihat, as-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Juz II/252.
- <sup>6</sup> Lihat, al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz I/27-28.
- <sup>7</sup> Lihat, *Musnad al-Bazzar*, hadits no 1282. *Musnad Ahmad*, hadits no 2091 dan 20913. Sunan Abu Dawud, hadits no 4028. Sunan at-Tirmidzi, hadits no. 2152. *Al-Mustadrak*, hadits no. 4438.
- <sup>8</sup> Lihat, *Shahih Bukhari*, hadits no. 6682. *Shahih Muslim*, hadits no. 3393, 3394, 3395, 3396, 3397 dan 3398. *Sunan Abu Dawud*, hadits no. 3731 dan 3732. *Musnad Ahmad*, hadits no. 3394, 19901, 19907, 19943, 19963, 19987, 19997, 20019, 20032, 20041, ., 20054, 20103 dan 20137. *Sunan at-Tirmidzi*, hadits no. 2149 dan 4194.
- <sup>9</sup> Majmu'ah Muallifin, *Mu'jam Musthalahat al-'Ulum as-Syar'iyyah*, hal. 756.
- <sup>10</sup> Lihat, Hr. Ahmad, Abu Dawud [4252] dan at-Tirmidzi [2229]; Hr. Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz I/22 dan 44; Ibn 'Abdi al-Barr, *Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadhlil*, hadits no. 1420. Lihat, catatan kaki no 1 dan 2.
- <sup>11</sup> Lihat, penjelasan mendalam Kontradiksi Demokrasi dengan Islam, dalam kitab *Kaifa Hudimat al-Khilafah*, karya al-'Allamah Syaikh 'Abdul Zallum, hal. 59-69.
- <sup>12</sup> Lihat, al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiuddin an-Nabhani, *as-Syakshiyah al-Islamiyyah*, Dar al-Ummah, Beirut, Juz III/ 361-368.
- <sup>13</sup> Lihat, as-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Juz II/253.

**Khilafah, Khalifah dan sistem pemerintahan Islam ini merupakan perkara yang telah dinyatakan dalam nas sehingga tidak boleh ada ijihad, apalagi dengan tujuan menegasikan kewajibannya; menolak bentuk, sistem dan modelnya. Hanya dalam perkara yang tidak dinyatakan oleh nash, tidak ada larangan untuk dilakukan ijihad.**

# SAHKAH JUAL-BELI MESIN TANPA SERAH-TERIMA?

Soal:

Saya punya fasilitas bangunan seluas 400 meter persegi. Saya punya mesin pertukangan di situ. Datang seseorang kepada saya untuk membeli mesin tersebut dan saya setuju menjualnya. Setelah itu ia meminta saya agar menyewakan bangunan itu agar mesin yang dia beli dari saya tetap di situ dan ia pergunakan di tempat itu juga. Kesepakatan itu tercapai. Perlu diketahui, mesin itu adalah benda bergerak. Meski demikian, mesin itu tetap di dalam bangunan yang disewakan kepada orang yang membeli mesin itu. Mesin itu tidak pernah dipindahkan dari dalam bangunan itu.

Perlu diketahui pula, kunci bangunan itu ada di tangan penyewa yang juga pemilik mesin itu. Ia memiliki semua manfaat dari fasilitas bangunan itu sebagaimana mestinya. Ia bebas melakukan tasharruf atas fasilitas bangunan itu tanpa menyebabkan kerusakan atau kehancurannya bangunan itu.

Apakah akad di antara kami itu memenuhi syarat-syarat syar'i jika mesin itu tidak dipindahkan sama sekali? Ataukah akad tersebut dinilai batil karena mesin itu tidak dipindahkan dan tetap dipertahankan di dalam bangunan yang disewa oleh pembeli mesin tersebut?

Jawab:

Dalam jual beli disyaratkan serah-terima barang dan penguasaannya ke pihak pembeli. Akan tetapi, ini hanya terkait barang yang ditimbang, ditakar dan dihitung. Misalnya, Anda membeli pakaian atau makanan seperti beras, misalnya; atau Anda membeli beberapa buah semangka atau pisang. Contoh lain adalah apa saja yang ditakar, termasuk di dalamnya apa yang diukur dengan ukuran hasta, misalnya. Bisa juga yang dijual dengan hitungan jumlah satuan, yakni satu buah semangka sekian; atau dijual dengan timbangan, takaran, ukuran, atau hitungan.

Semua ini wajib dipindah tempatkan saat terjadi akad jual-beli. Jadi agar barang itu bisa dimiliki dan boleh dijual maka wajib telah dia terima dan dia pindahkan ke tokonya. Karena itu tidak sah seorang pedagang menjual barang yang tidak ia miliki, yakni tidak dia miliki di tokonya. Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»

*Siapa yang membeli makanan, janganlah makanan itu dia jual sampai dia terima (HR al-Bukhari).*

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu

Umar:

«وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَاءً فَتَهَانًا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُنْقَلَهُ مِنْ مَكَانِهِ»

*Kami pernah membeli makanan secara acak dari pedagang yang datang. Lalu Rasulullah saw. melarang kami menjual makanan itu sampai kami memindahkannya dari tempatnya.*

Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

«مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَنَاهُ»

*Siapa saja yang membeli makanan, janganlah makanan itu dia jual sampai ia dia takar.*

Hakim bin Hizam juga berkata:

«قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي بِيوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي

مِنْهَا وَمَا يُجْرِمُ عَلَيَّ قَالَ فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بِيْعًا فَلَا تَبِعْهُ

حَتَّى تَقْبِضَهُ» رواه أحمد

**Makanan itu tidak terlepas dari keberadaannya yang ditakar, ditimbang atau dihitung. Makanan itu kadang dijual secara jumlah, seperti beberapa jenis buah-buahan. Atas dasar itu, syarat serah terima terkait dengan makanan itu diestimasi dalam bentuk takaran, timbangan atau hitungan jumlah.**

*Aku berkata, "Ya Rasulullah saw., aku membeli barang. Lalu apa yang halal untukku dari barang itu dan apa yang haram atasku?" Beliau bersabda, "Jika engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau terima." (HR Ahmad).*

Zaid bin Tsabit juga berkata:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَيَّ أَنْ تُبَاعَ السِّلْعُ حَيْثُ تُبْتَاغُ

حَتَّى يَخُورَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ»

*Rasulullah saw. telah melarang barang dagangan dijual sebagaimana dibeli sampai si pedagang memiliki dan memindahkan barang itu ke atas tunggangannya (HR Abu Dawud).*

Imam Ahmad pun meriwayatkan di dalam *Musnad*-nya dari Ibnu Umar yang berkata bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى

يَقْبِضَهُ»

*Siapa saja yang membeli makanan dengan takaran atau timbangan, janganlah makanan itu dia jual sampai dia terima.*

Jelas, hadis-hadis itu menyatakan tentang takaran dan timbangan, juga menyatakan secara umum tentang makanan. Makanan itu tidak terlepas dari keberadaannya yang ditakar, ditimbang atau dihitung. Makanan itu kadang dijual secara jumlah, seperti beberapa jenis buah-buahan. Atas dasar itu, syarat serah terima terkait dengan makanan itu diestimasi dalam bentuk takaran, timbangan atau hitungan jumlah.

Adapun selain yang ditakar, ditimbang atau dihitung, ketika dijualbelikan, tidak disyaratkan serah-terima. Ini berlaku pada rumah, tanah, hewan dan semisalnya. Pasalnya, rumah dan tanah tidak bisa dipindahkan. Adapun hewan

karena adanya nas. Imam al-Bukhari telah meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia menaiki unta milik Umar yang lari kencang: *Nabi saw. bersabda kepada Umar, "Juallah kepadaku" Umar berkata, "Unta itu untuk Anda." Rasul pun membeli unta itu lalu bersabda, "Unta itu untukmu, ya Abdullah. Lakukan apa yang kamu mau!"* (HR al-Bukhari).

Menurut hadis ini, Rasul saw. membeli unta dari Umar. Lalu beliau menjual untuk itu kepada Abdullah bin Umar sebelum beliau terima dari Umar.

Jabir bin Abdullah juga telah menceritakan hadis kepada Amir: *la naik di atas unta yang letih. Lalu ia ingin menghela unta itu. Jabir berkata: Lalu Nabi saw. menghampiriku dan mendoakanku. Beliau kemudian memukul unta itu. Unta itu pun berjalan yang belum pernah seperti itu sebelumnya. Beliau bersabda, "Juallah kepadaku seharga satu wuqiyah!" Jabir berkata, "Tidak." Rasul saw. bersabda, "Juallah kepadaku dengan satu wuqiyah." Aku pun menjual unta itu dengan harga satu wuqiyah (40 dirham). Aku mensyaratkan kepada beliau untuk menunggangi unta itu ke rumahku. Ketika aku tiba, aku datang kepada Nabi saw. dengan membawa unta itu. Lalu beliau membayar harganya kemudian aku kembali. Lalu beliau mengutus orang menyusulku. Beliau bersabda, "Apakah kamu menduga aku menawar harga yang lebih murah agar aku ambil untamu. Ambillah untamu dan dirhammu. Itu untukmu."* (HR Muslim).

Menurut hadis ini Rasulullah saw. membeli unta milik Jabir dan tidak menerima unta itu, tetapi Jabir terus menunggangi unta tersebut hingga tiba di rumahnya. Setelah itu Rasul saw menghibahkan unta itu kepada Jabir.

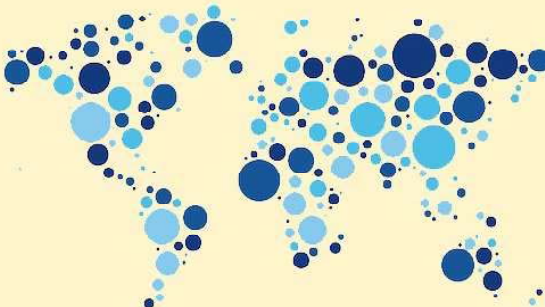
Atas dasar itu, penjualan hewan dan semisalnya yang tradisinya tidak dijual dengan timbangan, takaran atau hitungan, maka serah-terima tidak menjadi syarat dalam jual-beli itu.

**Alhasil, yang saya kuatkan, terkait mesin pertukangan yang Anda tanyakan, adalah semisal hewan. Dengan demikian dalam hal ini berlaku sepenuhnya jual-beli tanpa serah terima, yakni tanpa dipindahkan dari tempatnya.**

Alhasil, yang saya kuatkan, terkait mesin pertukangan yang Anda tanyakan, adalah semisal hewan. Dengan demikian dalam hal ini berlaku sepenuhnya jual-beli tanpa serah terima, yakni tanpa dipindahkan dari tempatnya.

Dengan ungkapan lain, akad jual-beli mesin tersebut sah baik pembeli memindahkan mesin itu ke rumahnya ataukah dia menyewa tempat di mana mesin itu berada dan membiarkan mesin itu di tempat yang sama.

*[Dari Jawab-Soal bersama Atha bin Khalil Abu ar-Rasyah, 22 Jumadul Ula 1439 H/ 08 Februari 2018 M. Sumber: <http://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/49605.html>; <https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos.128554578192107341828128484257804/765576003639473/?type=3&theater/>*



## LINTAS DUNIA

### Ini Penyebab Kebijakan Saudi Berubah di Suriah

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, pada tanggal 24 Desember 2017, seperti diberitakan majalah Amerika *Foreign Policy*, mengumpulkan para pemimpin oposisi Suriah. Dia menyampaikan pesan yang jelas kepada mereka atas nama Amerika Serikat bahwa Arab Saudi akan memperlambat dukungan oposisi jika tidak mematuhi permintaannya. Pasalnya, situasi mengharuskan untuk mengarahkan upaya oposisi guna mendapatkan sebuah kesepakatan politik dengan rezim Bashar al-Assad. Sochi adalah



tempat yang paling tepat untuk mencapai kesepakatan semacam itu. Bahkan al-Jubeir memperingatkan jika oposisi gagal atau tidak melakukannya.

“Dengan demikian, kita mendapatkan bahwa Arab Saudi melalui al-Jubeir, yang selalu menggemakan nada perlunya melengserkan al-Assad, sekarang telah mengubah sikapnya seratus delapan puluh derajat. Saudi menekan pihak oposisi untuk tunduk demi mencapai kesepakatan yang memalukan dengan rezim kriminal yang disponsori Rusia,” ujar aktivis Hizbut Tahrir Abu Hamzah al-Khatwani seperti dilansir *alraiah.net*, Rabu (7/2/2018).

Menurut Abu Hamzah, jelaslah kudeta Saudi terhadap oposisi Suriah sesuai dengan sikap Amerika. Pemerintah Amerika akhirnya menghentikan dukungannya pada musim panas lalu. Kemudian Amerika memerintahkan Rusia untuk mengatur situasi di Suriah yang dapat menjaga rezim Bashar al-Assad.

Abu Hamzah juga menyatakan Pemerintah Trump tidak lagi tertarik dengan solusi politik yang ditetapkan oleh Pemerintahan Obama sebelumnya di Konferensi Jenewa. Pemerintah Trump membebaskan tangan Rusia di Suriah secara militer dan politik. Hal itu kemudian diikuti oleh Arab Saudi, yang juga mengubah arah oposisi menuju Moskow. Pemerintah Trump tidak lagi menekankan Solusi Jenewa, namun menyerahkan semua urusan Suriah kepada Rusia. Begitu juga yang dilakukan anak angkatnya, Arab Saudi. Padahal Arab Saudi tahu bahwa Rusia adalah sekutu Iran yang merupakan musuh tradisionalnya.

“Dengan demikian, persetujuan Arab Saudi terhadap solusi Rusia sama artinya dengan Arab Saudi harus menerima peran Iran di Suriah. Padahal biasanya Arab Saudi menunjukkan permusuhan yang jelas terhadap Iran. Jadi, semua ini menegaskan kebohongan kebijakan politik Arab Saudi selama ini, dan menguatkan sejauh mana ketergantungannya secara mutlak kepada Amerika,” pungkasnya.

## Proposal Kotor Saudi Akan Menghancurkan Isu Palestina



Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina Ahmad Majdalani mengakui dalam sebuah wawancara dengan Televisi Palestina bahwa “usulan Amerika diajukan ke Otoritas melalui Arab Saudi. Arab Saudi yang mengirimkannya kepada kita.”

Dia mengatakan bahwa proposal terakhir adalah “Kesepakatan untuk melikuidasi isu Palestina. Sungguh, proposal ini akan menghancurkan isu Palestina.”

Bagian terpenting dari kesepakatan ini adalah integrasi entitas Yahudi dalam aliansi Arab untuk menyelesaikan isu Palestina. “Yang terpenting dalam kesepakatan tersebut adalah integrasi Yahudi dan bukan rincian solusinya. Mereka berkata bahwa negara Palestina terbatas di Gaza dan di daerah A, B, serta sebagian dari daerah C di Tepi Barat, yang luas wilayahnya kurang dari 40% tanpa al-Quds (Yerusalem),” ujar aktivis Hizbut Tahrir Abu Hamzah al-Khatwani seperti dilansir *alraiah.net*, Rabu (7/2/2018).

Abu Hamzah menegaskan rincian ini tidak praktis dan bukan yang dimaksudkan untuk diterapkan dari rencana tersebut, namun dimaksudkan sebagai cara untuk memasukkan entitas Yahudi ke dalam aliansi Arab, termasuk

Arab Saudi, dan negara-negara Arab lainnya. Dalihnya, ada musuh bersama Arab Saudi dan entitas Yahudi, yaitu Iran.

“Jadi yang terpenting adalah memuluskan gagasan integrasi. Inilah rencana Pemerintah Trump, yang oleh beberapa orang disebut dengan “intimidasi” (yaitu model kesepakatan abad ini). Demikianlah peran kepatuhan dan kehinaan Arab Saudi. Ini tidak lain adalah metode kotor yang memungkinkan Amerika untuk memaksakan agenda konspirasinya di kawasan Timur Tengah,” pungkasnya.

### Begini Hakikat Sebenarnya Serangan Saudi ke Yaman

Serangan udara militer Arab Saudi terhadap Yaman tidak meninggalkan sasaran sipil kecuali menghancurkannya. Serangan udara militer Arab Saudi telah membombardir sekolah, rumah, pasar, rumah sakit dan pertemuan di tempat-tempat berkabung. Segala sesuatu di Yaman dibombardir kecuali markas militer Houthi. Artinya, operasi ini justru semakin memperkuat Houthi, dan menjadikannya sebagai realita kekuatan terbaik untuk memimpin pemerintahan di banding yang lain.

“Tentu. Itulah yang Amerika inginkan untuk menyingkirkan antek-antek Inggris dan melemahkan mereka di Yaman, khususnya untuk melemahkan Abed Rabbo Mansur Hadi, simbol





legitimasi Inggris dan Eropa di Yaman,” beber aktivis Hizbut Tahrir Abu Hamzah al-Khatwani seperti dilansir *alraiah.net*, Rabu (7/2/2018).

Akibatnya, rakyat Yaman menjadi rakyat yang paling miskin di dunia akibat serangan Arab Saudi tersebut, juga yang paling menderita akibat dari kelangkaan sebagian besar kebutuhan hidup. Mereka tidak memiliki makanan. Tidak ada air bersih. Tidak ada obat-obatan. Bahkan mereka diserang penyakit yang telah dinyatakan punah dari dunia, seperti pes dan malaria.

Yang menegaskan kesimpulan yang dicapai di Yaman adalah pengakuan Kepala Staf dan Komandan Tentara Mansour Hadi kepada media bahwa negara-negara koalisi (Arab Saudi) tidak memberikan gaji, senjata atau amunisi kepada tentaranya. Padahal semua itu amat sangat mereka butuhkan.

“Pelemahan terhadap tentara Hadi oleh Arab Saudi adalah indikasi yang jelas bahwa perang Arab Saudi di Yaman hanya bertujuan untuk melemahkan antek-antek Inggris dan memperkuat Houthi. Itulah peran kucing-kucingan Arab Saudi, yang hanya melayani tujuan dari rencana-rencana Amerika. Jika Amerika serius mendukung Arab Saudi melawan Huthi, niscaya perang telah berakhir sejak lama,” tegasnya.

Dengan demikian, lanjut Abu Hamzah al-Khatwani, menjadi telanjang peran kotor Arab Saudi dalam melikuidasi isu-isu revolusi Syam, isu Palestina dan isu Yaman, dengan mematuhi instruksi-intruksi Amerika untuk memperluas dan mengokohkan pengaruh Amerika di kawasan tersebut. Fokus perhatian Raja Salman dan anaknya masih tetap sama pada tujuan rendahnya, yaitu mempertahankan takhta mereka semata.

## 100 Tahun Wafatnya Sultan Abdülhamid

Hari ini, 10 Februari 1918, dalam sejarah Khilafah Utsmani menandai 100 tahun wafatnya Sultan Abdülhamid II.

*Arsip Ottoman Imperial*, seperti dikutip *mediaumat.news*, Selasa (13/2) menyebutkan:



Dia dikenal sebagai sultan yang pendiam dan rendah hati, yang menunjukkan kepedulian yang besar terhadap kesejahteraan rakyatnya. Selama tiga puluh tiga tahun pemerintahannya, dia dapat membuka beberapa universitas, perpustakaan, dan sekolah-sekolah, di antara proyek-proyek lain dan juga melunasi 90% utang Imperium Utsmani. Dia juga dikenal memiliki sifat yang sederhana. Para penulis sejarah melaporkan bahwa dia sibuk dengan tugas sehari-hari sendiri, seperti memperbaiki dan menggunakan kembali sepatunya yang sudah rusak. Sultan Abdül Hamid dipuji karena bakat politiknya oleh orang-orang pada zamannya.

Kaisar Jerman Kaiser Wilhelm II menyatakan, “Saya telah mempelajari permainan politik Abdülhamid.”

Laksamana Inggris John Fisher menggambarkan Sultan Abdülhamid sebagai “seorang diplomat yang berpikir paling terampil dan paling cepat di seluruh Eropa.”

Kanselir Jerman Otto von Bismarck mengatakan mengenai Sultan Abdülhamid, “Dari semua intelegensia di Eropa, 90% ada pada Abdulhamid, 5% pada diri saya sendiri dan 5% pada orang lain.

## HT Inggris Bantah Fitnah *The Mirror*

Dalam artikel yang berjudul “*Tory Minister*

*backs free speech for extremist group that 'inspired Jihadi John'* (Menteri Tory mendukung kebebasan berbicara bagi kelompok ekstremis yang 'mengilhami Jihadi John')” yang terbit 22 Januari 2018, *The Mirror* dinilai banyak memberitakan kebohongan dan kecerobahan.

“Editor yang terhormat, sebagai perwakilan media Hizbut Tahrir Inggris, saya menulis kepada Anda mengenai banyak aspek kebohongan dan ceroboh dari artikel terbaru pada media Anda,” ujar Perwakilan Media Hizbut Tahrir Inggris Yahya Nisbet, Rabu (24/1/2018).

Dalam surat tersebut Yahya menegaskan adalah tidak benar bahwa Mohammed Emwazi memiliki hubungan dengan Hizbut Tahrir—lebih dari sekadar orang yang lewat di jalan. “Hal ini, saya kira, Anda sudah tahu sepenuhnya. Jadi Anda menggunakan perangkat jurnalistik yang sangat tidak jujur pada tuduhan Anda dengan menggunakan tanda petik, mungkin dengan harapan kebanyakan pembaca tidak akan memperhatikan upaya serampangan untuk tidak menerbitkan kebohongan yang memfitnah,” ungkapnya.



Selanjutnya, *The Mirror* menghubungkan tuduhan palsu *The Mirror* dengan organisasi itu dengan hanya berspekulasi bahwa dia kebetulan menghadiri pertemuan di satu universitas di

London yang mengizinkan panel di kampus tersebut yang membolehkan anggota Hizbut Tahrir untuk menjadi pembicara tamu. Sumber ini berasal dari artikel surat kabar lain yang membuat tuduhan yang benar-benar palsu tentang Hizbut Tahrir—dengan merujuk kepada seorang pria yang dikenal karena keputusasaannya untuk menarik perhatian dan tuduhan palsu, terlepas dari kebenarannya, sebagai bagian dari pekerjaannya yang terkenal menyebarkan kebohongan.

Artikel *The Mirror* kemudian mengulangi kebohongan bahwa Hizbut Tahrir bergabung dengan al-Qaeda dan bahwa partai tersebut dikaitkan dengan serangan-serangan dengan kekerasan. Sekali lagi, *The Mirror* menyamakan kebohongan yang tidak berdasar ini dengan menyembunyikannya dalam pernyataan “terkait dengan” dan “dilaporkan kepada”, dengan mengabaikan tugas jurnalistik Anda untuk memverifikasi kebenaran siapakah yang “menghubungkan” dan “melaporkan” tuduhan semacam itu.

Paling tidak, Yahya mengharapkan agar *The Mirror* menghapus artikel yang disebutkan di atas dari situs *web*-nya dan memperbaiki banyak kesalahan yang telah diterbitkan.

“Saya selanjutnya akan mendorong Anda untuk memperbaiki praktek penulisan editorial Anda dalam mengajukan tuduhan tanpa dasar dengan konstruksi bahasa yang samar-samar; dan bukannya hanya mengutip fakta-fakta yang bisa Anda hadapi setelah dilakukan penelitian yang sungguh-sungguh dan jujur,” kata Yahya.

Yahya menegaskan bukanlah Hizbut Tahrir yang menyebarkan teror dan kebencian, yang menyebabkan ketakutan dan perpecahan; melainkan akibat kebijakan pemerintah tentang liberalisme yang dipaksakan itu, orang-orang yang ada di media yang menyebarkannya, dan akhirnya sebagai akibat kegagalan sekularisme itu sendiri. [M Bajuri/Joy]



M. Ismail Yusanto:  
**KAPITALISME  
 ANCAMAN  
 NYATA**

**Pengantar Redaksi:**

Akhir-akhir ini ajaran Islam, khususnya syariah dan Khilafah, dianggap sebagai ancaman bagi negeri ini. Para pejuangnya dikriminalisasi. Umat Islam, sebagai penghuni terbesar negeri ini, pun terus disudutkan oleh rezim saat ini. Mengapa semua ini terjadi? Betulkah ajaran Islam, khususnya syariah dan Khilafah, mengancam negeri ini? Ataupun itu sekadar tuduhan yang bermotif politik tertentu? Jika demikian, apa sebetulnya yang menjadi ancaman nyata bagi negeri ini? Beberapa pertanyaan di atas, selain sejumlah pertanyaan lain, dijawab secara lugas oleh M. Ismail Yusanto dalam wawancara dengan Redaksi berikut ini.

*Saat ini terasa gencar sekali propaganda yang menyerang Islam. Islam, misalnya, dianggap sebagai ancaman. Ada apa sebenarnya di balik semua itu?*

Ini bagian dari upaya pendiskreditan Islam. Semua orang tahu, saat ini Islam sedang dalam proses kebangkitan. Fenomena Aksi 411, 212 dan lainnya adalah tanda nyata kebangkitan itu. Kebangkitan ini akan terus melaju. Tak bisa

dibendung. Namun, para pembenci Islam berusaha menghambat dan memperlambat, kalau tidak bisa menghentikan sama sekali. Caranya, ya salah satunya dengan mendiskreditkan Islam. Melabeli Islam dengan aneka sebutan seperti radikal, ekstremis, fundamentalis dan lain sebagainya. Jadi, sekarang tengah berjalan politik *labelling* (pelebelan) atau labelisasi. Setelah itu

dilakukan *monsterizing* atau monsterisasi dengan menggambarkan seolah semua orang atau kelompok yang dilabeli macam-macam itu tadi sebagai membahayakan, mengancam dan merusak negara. Harapannya, dengan semua sebutan dan monsterisasi itu, umat Islam dan umat selain Islam menjauh dari Islam. Islam yang dimaksud di sini tentu bukan Islam dalam arti umum, tetapi Islam yang menolak sekularisme, liberalisme, kapitalisme, termasuk komunisme serta menginginkan tegaknya kehidupan Islam yang di dalamnya diterapkan syariah secara *kâffah*.

***Apakah benar anggapan bahwa Khilafah mengancam masyarakat dan negara?***

Ya, *enggak lah*. Khilafah adalah ajaran Islam. Substansinya ada tiga yaitu: ukhuwan, syariah dan dakwah. Bagaimana mungkin ajaran Islam dianggap ancaman? Negara ini ada justru berkat ukhuwah, syariah dan dakwah atau perjuangan.

***Jika begitu, Islam mendatangkan kebaikan bagi negeri ini?***

Betul. Melalui penerapan syariah secara *kâffah* inilah kerahmatan Islam (rahmatan lil alamin) yang dijanjikan akan bisa diwujudkan.

***Lalu apa yang menjadi ancaman sebenarnya bagi negeri ini?***

Secara riil, ada dua ancaman utama terhadap negeri ini, yakni sekularisme dan neoimperialisme atau penjajahan model baru yang dilakukan oleh negara adikuasa, yang bila terus dibiarkan akan makin mempurukkan negeri ini ke jurang kehancuran.

Sejak Indonesia merdeka, lebih dari 70 tahun negeri ini diatur oleh sistem sekular, baik bercorak sosialistik pada masa Orde Lama maupun kapitalistik pada masa Orde Baru dan neoliberal pada masa Reformasi. Dalam sistem sekular itu lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai Islam; tatanan

ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik dan machiavellistik, budaya hedonistik yang amoralistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik serta sistem pendidikan yang materialistik.

Akibatnya, bukan kebaikan yang diperoleh oleh rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim itu, melainkan berbagai problem berkepanjangan yang datang secara bertubi-tubi. Lihatlah, meski Indonesia adalah negeri yang amat kaya dan sudah lebih dari 70 tahun merdeka, sekarang ada lebih dari 100 juta orang terpaksa hidup di bawah garis kemiskinan. Beban kehidupan bertambah berat seiring dengan kenaikan harga-harga yang terus-menerus terjadi. Bagi mereka yang lemah iman, berbagai kesulitan yang dihadapi itu dengan mudah mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan. Merebaklah tindak kriminal seperti pencopetan, perampokan maupun pencurian dengan pemberatan serta pembunuhan dan tindak asusila, budaya permisif, pornografi dengan dalih kebutuhan ekonomi terasa semakin meningkat tajam. Wajar bila lantas orang bertanya, sudah lebih 70 tahun merdeka, hidup *kok* makin susah.

Ancaman kedua, neoimperialisme. Indonesia memang telah merdeka. Namun, penjajahan ternyata tidaklah berakhir begitu saja. Melalui instrumen hutang dan kebijakan global, lembaga-lembaga dunia seperti IMF, World Bank dan WTO dibuat oleh negara-negara Barat sebagai cara untuk melegitimasi langkah-langkah imperialistik mereka. Akibatnya, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak lagi merdeka secara politik. Melalui para kompradornya di negeri ini, mereka merancang aturan-aturan seperti UU Kelistrikan, UU Migas, UU Penanaman Modal dan lainnya serta membuat kebijakan yang menguntungkan mereka seperti pengelolaan migas, juga perpanjangan selalu

kontrak untuk Freeport dan lainnya.

Neoimperialisme dilakukan melalui apa yang disebut sebagai skenario perang modern. Dalam perang ini tidak digunakan *hard power* (militer dan senjata), tetapi *soft power* bahkan *smart power*. Perang modern dilancarkan melalui sejumlah tahapan. Tahap pertama adalah infiltrasi lewat jalur intern, militer, pendidikan, politik, media massa. Di samping itu juga ada eksploitasi dan adu domba lewat pembentukan opini, penciptaan sel-sel perlawanan hingga gelar provokasi. Tahap berikutnya, adanya kegiatan cuci otak dengan mengubah cara berpikir dan paradigma, mengubah nilai-nilai yang ada ke nilai-nilai asing. Setelah itu masuk tahap penghancuran, pelemahan dan penguasaan yang dilakukan melalui operasi intelijen hingga konfrontasi. Tahap terakhir adalah sasaran direbut dan dikuasai.

Perang modern itu mirip dengan apa yang diistilahkan oleh Jean Tirole, profesor ekonomi di Universitas Toulouse, pemenang Nobel Ekonomi, sebagai *proxy war*. Inilah bentuk perang memperebutkan pengaruh ekonomi dan politik di suatu negara tanpa keterlibatan langsung negara yang melakukan agresi. *Proxy war* itu merupakan tahap lanjut dalam perang modern. Aktor-aktornya adalah korporasi multinasional, lembaga internasional dan negara-negara besar. Inilah yang saat ini terjadi. Inilah ancaman sesungguhnya buat negara kita.

### ***Namun, bukankah Kapitalisme bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi?***

Melalui penerapan sistem Kapitalisme, pertumbuhan ekonomi negeri ini memang cukup tinggi, di atas angka 5 persen. Namun, semua itu diikuti dengan kesenjangan yang makin tinggi. Hal itu bisa dilihat dari Indeks Gini yang terus meningkat. Jika pada tahun 2009 Indeks Gini 0,37, angka itu terus naik menjadi 0,413 tahun 2013 dan tahun 2014 mencapai 0,42 atau 0,43. Ini menandakan hasil

pertumbuhan dan kekayaan lebih banyak dinikmati oleh segelintir kecil orang. Hal itu dibuktikan oleh, misalnya, data distribusi simpanan di bank umum pada Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Total rekening simpanan di bank umum yang ada sebanyak 152.804.340 rekening. Jika diasumsikan satu orang memiliki satu rekening, artinya ada sekitar 100 juta penduduk Indonesia yang tidak punya rekening simpanan di Bank umum. Pemilik rekening di atas 1 miliar yang jumlahnya 409.564 rekening (rekening 1-2 M sebanyak 222.563 rekening, rekening 2-5 M sebanyak 118.077 rekening dan rekening lebih dari 5 M sebanyak 69.014 rekening) atau 0,27% dari total rekening menguasai 61,44 % dari total nominal simpanan. Pemilik rekening di atas 5 miliar yang jumlahnya hanya 60.014 rekening atau 0,05 persen ternyata menguasai 43,59 persen dari total nominal tabungan.

### ***Bukankah dengan Kapitalisme, investasi dan eksplorasi kekayaan alam khususnya migas dan tambang makin banyak?***

Betul, tetapi investasi dan eksploitasi itu dilakukan lebih banyak oleh korporasi swasta domestik dan asing, bukan oleh negara. Akibatnya, hasilnya lebih banyak dinikmati oleh korporasi-korporasi itu, bukan oleh rakyat yang notabene adalah pemilik dari sumberdaya migas dan tambang itu.

Ambil contoh hasil kekayaan alam berupa emas dan tembaga yang dikuasai oleh PT Freeport di Papua. Penerimaan pajak, deviden dan royalti Pemerintah dari PT Freeport selama 2010 (sampai bulan September) adalah sebesar Rp 11,8 triliun. Pemerintah memiliki saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 9,36 persen, sementara PT Freeport McMoran menguasai 91,64 persen saham. Karena pendapatan yang sangat besar itulah, Freeport ngotot meminta Kontrak Karyanya yang seharusnya berakhir 2021 agar diperpanjang

dua kali 10 tahun hingga 2041.

Ini baru dari satu tambang di Papua. Padahal masih sangat banyak tambang mineral di seluruh Indonesia. Potensi pendapatan dari kekayaan tambang ini sangat besar. Sebagai gambaran saja, produksi batubara, misalnya, mencapai 421 juta ton tahun 2013. Jika harga produksi rata-rata perton sebesar US\$ 20 dan harga pasar tahun 2014 US\$ 74 perton maka potensi pendapatannya mencapai Rp 250 triliun. Contoh lainnya tembaga. Pada tahun 2012, produksinya mencapai 2.4 juta ton. Biaya produksinya sebesar US\$ 1,24 per pound dan harga jualnya sebesar US\$3.6 per pound. Dengan demikian, potensi pendapatannya sebesar Rp 124 triliun. Dari dua komoditas ini saja potensi pendapatannya sudah mencapai Rp 374 triliun.

Pengelolaan SDA yang lebih banyak dilakukan oleh korporasi memang adalah cara pandang kapitalis. Menurut mereka, tidak semestinya negara terjun langsung sebagai operator. Biarkan swasta sebagai operator dan negara sebagai regulator. Toh negara akan mendapatkan pajak dari para operator. Tidak elok negara berperan ganda, sebagai regulator sekaligus operator.

Cara pandang kapitalistik ini dihembuskan oleh para ekonom kapitalis, kemudian mempengaruhi para politikus. Dari sana kemudian terlahir banyak sekali peraturan perundangan yang menguntungkan para kapitalis seperti UU Migas, UU Kelistrikan, UU SDA, UU Penanaman Modal dan lain sebagainya.

***Bagaimana dengan sektor perkebunan yang berkembang pesat, bahkan perkebunan dan industri sawit jadi nomor satu di dunia?***

Sama dengan migas dan tambang tadi, sektor perkebunan, termasuk perkebunan sawit berikut industri CPO-nya, juga dikuasai oleh korporasi swasta. Transformasi untuk Keadilan

(TuK) mengungkapkan sebanyak 25 kelompok perusahaan sawit yang dimiliki para taipan menguasai 31 persen lahan atau seluas 5,1 juta hektar dari total area penanaman kelapa sawit di Indonesia. Mereka juga telah mengantongi izin pengembangan kelapa sawit seluas 2 (dua) juta hektar yang belum ditanami.

Selain soal alokasi penguasaan lahan, pembukaan dan persiapan lahan untuk perkebunan kelapa sawit selama ini masih banyak menggunakan dengan cara membakar. Dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2006 - 2016, jumlah titik api terbanyak berada di dalam area perkebunan kelapa sawit (FWI, 2016). Menurut Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK), 2,6 juta hektar lahan dan hutan telah terbakar antara bulan Juni hingga Oktober 2015. Luasnya sebanding dengan empat setengah kali Pulau Bali. Menurut Bank Dunia, bencana kebakaran hutan yang terjadi dalam rentang waktu tersebut telah merugikan Rp 221 triliun. Nilainya setara dengan 1,9 persen dari produk Domestik Bruto (PDB).

***Apa saja akibat dari penerapan Kapitalisme yang menjadi ancaman riil itu?***

Banyak sekali. Secara politik, negara ini menuju apa yang disebut korporatokrasi. Diteorikan, melalui sistem politik demokrasi, rakyatlah yang berdaulat. Namun faktanya, yang berdaulat adalah para pemilik modal. Dengan kekuatan modalnya, mereka menguasai market dan media. Lalu dengan media mereka menguasai *mind* (pikiran) masyarakat. Kini mereka juga menguasai *state* (negara) melalui penguasaan terhadap partai politik yang dibeli atau dibiayai oleh mereka. Tengoklah partai politik sekarang, pasti di belakangnya adalah pemillik modal. Hanya ada beberapa saja yang tidak. Nah, bila partai politik sudah dikuasai, maka parlemen juga dikuasai, dan produk dari parlemen berupa peraturan perundangan juga mereka kuasai.

Bukan hanya itu, ketika parlemen memilih pejabat, mereka juga bisa atur mana yang dikehendaki dan mana yang tidak. Yang paling parah, dengan kekuatan dananya bahkan presiden juga mereka kuasai. Ketika presiden dikuasai, maka kabinet juga dikuasai, termasuk aparat penegak hukum juga mereka kuasai. Praktis negara ini dalam genggaman mereka. Hukum dikendalikan sesuai kehendak mereka. Keadilan politik dan hukum, juga keadilan ekonomi, makin jauh dari harapan.

Secara ekonomi, Kapitalisme menghasilkan kemiskinan dan ketimpangan yang sangat mengkhawatirkan. Hasil kajian Oxford Committee for Famine Relieve (Oxfam) perihal tingkat ketimpangan ekonomi Indonesia menyajikan temuan yang meresahkan. Dokumen setebal 48 halaman yang baru saja dirilis pada Februari 2017 itu dengan gamblang memaparkan potret buram ketimpangan ekonomi negeri ini.

Satu persen warga terkaya negeri ini menguasai hampir separuh (49 persen) kekayaan nasional. Berikutnya, empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang lebih besar dari 40 persen penduduk termiskin, atau sekitar 100 juta orang. Dalam satu hari, pendapatan dari bunga orang terkaya di Indonesia melampaui 1.000 kali belanja orang miskin untuk kebutuhan pokok selama satu tahun. Tidak mengherankan jika kita dinobatkan sebagai negara dengan ketimpangan ekonomi keenam tertinggi di dunia.

### ***Bagaimana dengan anggapan para elit mereka bahwa mereka menerapkan ideologi Pancasila?***

Di situ masalahnya. Ada beberapa penyebabnya mengapa hal itu terjadi. *Pertama*: Kapitalisme, termasuk Liberalisme, tidak pernah dinilai atau dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dalam penjelasan Pasal 59 UU Ormas disebutkan bahwa paham atau

**Satu persen warga terkaya negeri ini menguasai hampir separuh (49 persen) kekayaan nasional. Berikutnya, empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang lebih besar dari 40 persen penduduk termiskin, atau sekitar 100 juta orang. Dalam satu hari, pendapatan dari bunga orang terkaya di Indonesia melampaui 1.000 kali belanja orang miskin untuk kebutuhan pokok selama satu tahun. Tidak mengherankan jika kita dinobatkan sebagai negara dengan ketimpangan ekonomi keenam tertinggi di dunia.**

ajaran yang bertentangan dengan Pancasila adalah Ateisme, Komunisme, Leninisme/ Marxisme. Tidak disebut Kapitalisme dan Liberalisme. Hal ini pernah saya tanyakan kepada Pansus RUU Ormas, apakah berarti Kapitalisme dan Liberalisme itu sesuai dengan Pancasila? Tidak ada jawaban hingga sekarang.

*Kedua*: Mereka sudah menikmati Kapitalisme. Sebagai elit, mereka paling diuntungkan. Mereka bisa meraup rente dari para pemilik modal. *Ketiga*: Para kapitalis sudah demikian mencengkeram negeri ini hingga siapapun sudah tak lagi menyadari apakah ini semua masih sesuai dengan Pancasila. *Keempat*: Memang tidak jelas konsepsi Pancasila itu sendiri sehingga mudah ditarik ke kanan dan ke kiri. Bila pada masa Orde Lama ke arah Sosialisme, bahkan Komunisme, sekarang sistem politik dan ekonomi kita ditarik ke arah Kapitalisme dan Liberalisme. []



Catatan  
H.M. Ismail Yusanto

## BASIS TEOLOGI

“*ni bukan negara Islam, Saudara...*” Begitu kira-kira ungkapan seorang anggota DPR ketika pembahasan tentang RUU Zakat beberapa tahun lalu. Diusulkan agar zakat bukan diambil secara sukarela, tetapi harus diambil secara paksa oleh Negara. Alasannya, zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu.

“*Kita tidak pakai syariah...*” Ini serupa dengan yang di atas. Ketika disarankan untuk mendasarkan pada syariah dalam penetapan definisi pornografi agar lebih mudah, karena soal kepornoan itu terkait erat dengan pandangan teologis, seorang anggota Pansus RUU (Anti) Pornografi dan Pornoaksi menolak dengan alasan kurang lebih sama.

Demikianlah. Berbagai peraturan perundangan tuntas dirancang, tetapi waktu jualan yang kemudian membuktikan bahwa aneka persoalan tak terselesaikan. Bahkan muncul ragam persoalan yang lebih banyak dan lebih kompleks. Pasalnya, aturan yang dibuat tidak cukup mampu menjadi dasar penyelesaian persoalan-persoalan itu. Soal pornografi, misalnya. Meski UU Pornografi sudah lama diundangkan, tetap saja pornografi merajalela.

Salah satunya adalah akibat ketidakjelasan menyangkut definisi pornografi. Apalagi di penghujung pembahasan RUU itu kata *Anti*-nya justru dihapus. Pornoaksi juga dihapus. Jadilah sekadar UU yang mengatur soal pornografi, bukan menghapus pornografi, apalagi pornoaksi. Definisi pornografi yang dipakai juga sangat minimalis. yakni segala hal yang terkait dengan ketelanjangan dan organ vital. Di luar itu tidak dianggap porno.

Di sinilah soal basis teologis menjadi penting. Dalam hal pornografi, definisi bisa dikembalikan pada batasan dan pengertian menurut agama masing-masing. Faktanya, apa yang dianggap porno oleh satu agama, tidak oleh agama lain. Itu juga yang menjadi dasar argumen ketika Pansus RUU Pornografi hendak menetapkan definisi. Mereka beralasan, tidak semua agama mempunyai definisi yang sama soal pornografi.

Bila merujuk pada syariah Islam, batasan pornografi sangatlah jelas. Berangkat dari pengertian aurat. Bagi perempuan, aurat adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Bagi laki-laki, aurat adalah antara pusar dan lutut. Dengan demikian segala hal yang menampakkan aurat adalah porno.

## Catatan Dakwah

Pentingnya basis teologis juga tampak dari kontroversi pembahasan soal LGBT dalam RKUHP. Haruskah pelaku LGBT dipidana? Sebagian mengatakan harus. Sebagian lagi mengatakan tidak harus. Bahkan mereka bilang, LGBT harus dilindungi. Kalaupun harus dipidana, itu hanya bila dilakukan terhadap anak di bawah umur.

Kontroversi itu sangat jelas dimulai dari penilaian apakah LGBT itu baik atau buruk? Sebagian mengatakan itu sangat buruk. Sebagian lainnya mengatakan sebaliknya; mereka menjadi begitu karena takdir. Istilah-istilah seperti *born-gay* atau *gen gay* menguatkan klaim bahwa ke-homo-an mereka adalah *as given*. Bukan pilihan. Karena itu tidak bisa dianggap buruk, apalagi dipidana.

Akan tetapi, bila kita kembali ke landasan teologis, sesungguhnya tak ada satu pun agama yang membenarkan perbuatan LGBT. Dalam al-Quran surah al-Ankabut ayat 28. misalnya, perbuatan 'lelaki mendatangi lelaki

dengan syahwat dengan mengabaikan perempuan alias homoseksual disebut sebagai *fâkhisyah*. Imam Ibnu Katsir mengartikan *fâkhisyah* sebagai '*amal al-khabîts* (perbuatan buruk, menjijikkan). Sedemikian buruknya hingga Nabi Luth menyebut *mâ sabaqakum bihâ min ahad[în] min al-âlamîn* (tak seorang pun sebelum kalian melakukan hal itu).

Oleh karena LGBT adalah *fâkhisyah*, Islam tidak pernah mentolelir. Bila itu menjadi perbuatan tersembunyi, pelakunya diserukan untuk bertobat. Dengan kemauan kuat, insya Allah siapa saja bisa sembuh dari kecenderungan yang menyimpang ini. Pengalaman Sam Brodie yang selama hampir 17 tahun menjadi 'perempuan', padahal aslinya lelaki, bisa menjadi contoh. Tidak ada kata terlambat. Dengan kemauan keras dan usaha sungguh-sungguh, terbukti ia bisa normal kembali. Pintu kembali ke jalan yang benar selalu terbuka. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. 'Sam Brodie perempuan', yang pernah malang melintang di sejumlah negara Barat, bahkan pernah cukup populer di Hollywood dengan bayaran cukup besar, kini sudah menikah secara normal dengan seorang perempuan yang telah membuka kesadarannya, dan dikarunia dua anak.

Bagaimana dengan *gen gay*? Penelitian yang dilakukan oleh Prof. George Rice dari Western Ontario University, Kanada, terhadap 52 pasang homo kakak-beradik membuktikan tidak ada yang disebut *gen gay*Xq28, yang diklaim oleh komunitas LGBT sebagai pembawa sifat homoseksualitas. Dean Hamer dalam penelitian awalnya terhadap 40 pasang homo kakak-beradik sempat membenarkan adanya *gen* itu. Namun, pada penelitian lanjutannya terhadap orang tua dan buyut mereka, akhirnya *toh* juga berkesimpulan tidak ada sifat-sifat genetis yang diwariskan. Karena itu, tidak ada itu yang disebut *born gay*.

**Penelitian yang dilakukan oleh Prof. George Rice dari Western Ontario University, Kanada, terhadap 52 pasang homo kakak-beradik membuktikan tidak ada yang disebut *gen gay* Xq28, yang diklaim oleh komunitas LGBT sebagai pembawa sifat homoseksualitas. Dean Hamer dalam penelitian awalnya terhadap 40 pasang homo kakak-beradik sempat membenarkan adanya *gen* itu. Namun, pada penelitian lanjutannya terhadap orang tua dan buyut mereka, akhirnya *toh* juga berkesimpulan tidak ada sifat-sifat genetis yang diwariskan.**

Jadi jelaslah LGBT itu bukan gejala genetik, tetapi bentuk perilaku menyimpang yang dipicu oleh dorongan nafsu rendah, rusaknya pergaulan, tiadanya sanksi yang tegas serta kesalahan berpikir yang sangat fatal.

Jadi, *born-gay* atau *gen gay* adalah propaganda palsu kaum LGBT untuk mendapatkan legitimasi sosial, sebelum akhirnya mereka mendapatkan legitimasi hukum untuk legalisasi pernikahan sejenis (*same-sex marriage*). Untuk meraih tujuan itu, tidak ada jalan lain kecuali mereka harus memperbanyak jumlah. Caranya, ya dengan penularan. Tak ada lain, karena tidak mungkin penambahan jumlah itu melalui pernikahan. Selama ini, akibat permisifme publik, komunitas LGBT terus bertambah dari waktu ke waktu. Konon saat ini jumlah mereka sekitar 40 juta di seluruh dunia. Dengan jumlah yang terus membesar, mereka bisa memperkuat posisi sosial, ekonomi dan politik. Puncaknya adalah legalitas pernikahan sejenis tadi.

Saat ini lebih dari 24 negara telah melegalkan pernikahan sejenis. Tak terbayang 50 tahun lalu lelaki bisa menikah dengan lelaki, perempuan menikah dengan perempuan. Ini menunjukkan perkembangan komunitas LGBT sangat signifikan. Di sejumlah negara seperti AS, komunitas ini, oleh karena jumlahnya yang cukup besar, secara politik sama sekali tak bisa diabaikan. Secara ekonomi, tak sedikit *owner* perusahaan besar seperti Facebook, Line, Google juga mendukung LGBT.

Di sinilah hebatnya syariah Islam. Dengan ketentuannya, bertindak sangat antisipasif. Kepada siapa saja yang melakukan perbuatan LGBT secara terbuka atau terbukti melakukan perbuatan *fakhisyah* itu, Islam telah menetapkan hukuman yang setimpal: hukuman mati. Baik yang meng-homoi (subyek) maupun yang di-homoi (obyek). Dengan hukuman yang keras ini, putuslah rantai penularan LGBT, sehingga jumlahnya tidak akan bisa terus

**Hilang basis teologi, hilang pula arah penyelesaian yang bakal membuat banyak sekali persoalan tak terselesaikan, bahkan bisa mengundang persoalan baru. Inilah kiranya yang dimaksud al-Quran dalam ayat 124 surah Thaha sebagai *ma'isyat[an] dhanka*; yakni kehidupan yang sempit, ruwet, penuh persoalan yang tak terselesaikan sehingga membuat keresahan dan ketidakbahagiaan. Semua akibat meninggalkan syariah; karena meninggalkan basis teologi Islam dalam penyelesaian persoalan.**

membesar. Dengan demikian tidak akan terjadi situasi, oleh karena jumlah yang besar, lantas mereka bisa memaksakan kehendak.

+++++

Demikianlah. Betapa vital basis teologis dalam tiap usaha penyusunan peraturan perundangan dan penyelesaian persoalan. Hilang basis teologi, hilang pula arah penyelesaian yang bakal membuat banyak sekali persoalan tak terselesaikan, bahkan bisa mengundang persoalan baru. Inilah yang saat ini terjadi. Inilah kiranya yang dimaksud al-Quran dalam ayat 124 surah Thaha sebagai *ma'isyat[an] dhanka*; yakni kehidupan yang sempit, ruwet, penuh persoalan yang tak terselesaikan sehingga membuat keresahan dan ketidakbahagiaan. Semua akibat meninggalkan syariah; karena meninggalkan basis teologi Islam dalam penyelesaian persoalan. *Na'ûdzubillâhi min dâzlik!* []

## ABOLITION OF THE CALIPHATE.

### DECISION OF TURKISH ASSEMBLY.

#### ABDUL MEJID DEPOSED.

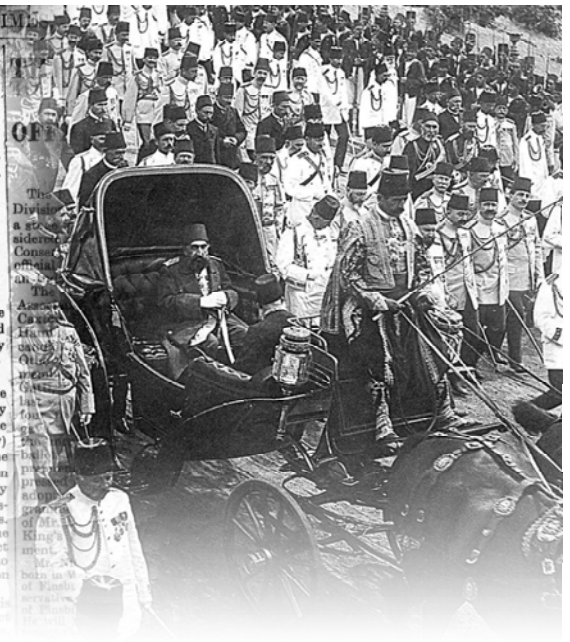
(FROM OUR OWN CORRESPONDENT.)

CONSTANTINOPLE, MARCH 3.

The motion for the abolition of the Caliphate was passed in the Grand National Assembly to-day after a stormy debate.

MARCH 2.

In the preliminary debate at the private meeting of the Popular Party (which holds the vast majority of the seats in the Grand National Assembly) the proposal for the deposition of the Caliph Abdul Mejid and the abolition of the Ottoman Caliphate was only adopted after a long and abstruse discussion which occupied several hours. Accounts of the speeches are very vague and complicated, but the obscure abstract formula adopted seems to be intended to reconcile the old theocratic conception with the modern Republican conception.



# PELAJARAN DARI KERUNTUHAN KHILAFAH (3 Maret 1924)

Sembilan puluh empat tahun lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 1924 (27 Rajab 1342 H) diumumkan bahwa Majelis Nasional Turki telah menyetujui penghapusan Khilafah dan pemisahan agama dari negara. Mustafa Kemal mengirimkan perintah kepada Gubernur Istanbul agar Khalifah Sultan Abdul Majid segera meninggalkan Turki sebelum fajar. Gubernur bersama satu pasukan dari Polisi dan Militer mandangi Khalifah. Khalifah dipaksa masuk ke dalam mobil. Ia dibawa melintasi perbatasan Swiss. Ia hanya dibekali satu kopor berisi beberapa potong pakaian dan sejumlah uang. Pelita umat itu pun telah hilang.

Khilafah Islamiyah—institusi politik pelindung umat Islam, wadah pelaksanaan hukum Allah SWT secara sempurna, sumber perundang-undangan serta pedoman hidup—dilenyapkan oleh seorang Yahudi Dumamah, Mutafa Kemal Pasya. Kemal merupakan seorang agen Inggris. Ia disusupkan ke dalam militer Turki. Ia lalu menjadi seorang jenderal untuk menusuk Kekhilafahan dari dalam. Lewat

konspirasi Yahudi Internasional inilah, Kekhilafahan Turki Utsmani akhirnya hancur, tepat 27 tahun setelah Kongres Zionis Internasional pertama.

## Faktor Penyebab

Mengenang keruntuhan Khilafah tidak bermaksud sekadar bernostalgia atas romantisme sejarah. Tujuan pentingnya adalah untuk mengambil *ibrah*; mengkaji dan memahami apa penyebab kehancuran nya, siapa saja yang berperan; juga mengingatkan umat atas dampak buruk yang terjadi, bagaimana upaya Barat menghalangi tegaknya Khilafah. Dengan begitu akan jelas bagi kita sikap apa yang harus dilakukan.

Awal petaka itu mulai terlihat sejak pertengahan abad ke-12 H (18 M). Saat itu Dunia Islam mengalami kemerosotan dan kemunduran yang paling buruk—sejak masa kejayaannya—dengan sangat cepat. Sebab kemunduran itu bertumpu pada satu hal: kelemahan pemahaman keislaman umat.

Kelemahan pemahaman Islam itu merasuk

di benak umat tatkala Bahasa Arab diremehkan peranannya untuk memahami Islam. Padahal Bahasa Arab dan Islam adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi ini terjadi pada abad ke-7 H (13 M). Saat itu kebanyakan sultan dari kaum Mamalik (Khilafah Utsmaniyah) tidak lagi menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa utama.

Ijtihad sebagai sebuah kunci kreativitas menjawab berbagai persoalan terhenti. Peralpnya, pemahaman atas Bahasa Arab lemah. Padahal ijtihad adalah rahasia kelangsungan peradaban bagi kaum Muslim. Tanpa ijtihad umat menjadi bodoh. Contoh kebodohan itu terlihat saat kaum Muslim berpolemik di seputar mesin cetak al-Quran yang ditemukan di Barat. Orang Turki Utsmani meyakini bahwa al-Quran adalah kitab suci. Ia tidak boleh dipegang oleh orang-orang kafir seperti Paganino dan Paganini. Menurut Jean Bodin (1530-1596 M) dalam bukunya, *Colloquium Heptaplomeres*, orang-orang Turki Utsmani memotong tangan kanan Alessandro Paganini dan merusak seluruh cetakannya.

Pemahaman umat semakin diperparah saat terjadi infiltrasi paham Barat yang berbahaya seperti semangat nasionalisme dan sentimen separatisme. Prancis, Inggris dan Amerika (abad 18-19 M) terus berupaya memecah-belah umat Islam dengan menabur dan menanam paham kehancuran ini. Ide nasionalisme disebarakan hingga kaum Muslim lebih bangga menjadi Arab, Turki atau Mesir daripada sebagai umat Muslim.

Proses keruntuhan Khilafah itu selanjutnya terjadi karena serangan fisik, peperangan dan rangkaian perjanjian. Semua itu seiring dengan imperialisme di berbagai belahan negeri Islam. Perjanjian Karlowitz 1699, Passarowitz 1718, Belgrade 1739 dan Küçük Kaynarca 1774; semuanya mengerat habis wilayah Khilafah Utsmani. Rusia mengerat wilayah Khilafah Utsmani di utara sampai wilayah yang

berbatasan dengan Laut Hitam di masa Catherine. Prancis menjajah Mesir pada 1698, Aljazair pada 1830, Tunisia pada 1881, Moroko pada 1912. Inggris menjajah wilayah India, Cina bagian Barat, Sudan dan akhirnya merebut Mesir dari Prancis.

Pukulan pamungkas Barat datang ketika Perang Dunia I (1914-1917). Saat itu kaum Muslim terjebak perang dalam melawan sekutu dan kalah total. Lewat Perjanjian Sykes-Picot (Inggris-Prancis) wilayah Islam secara formal dikerat penjajah, dipecah-belah. Antek Inggris Lawrence of Arabia menginisiasi pemberontakan negeri-negeri Arab di Syam pada 1916-1918. Muncullah negeri-negeri baru. Inggris menggariskan wilayah kaum Muslim dan mengerat mereka menjadi satuan-satuan yang lemah, terlepas dari persatuan. Lewat Inggris pula, Mustafa Kemal mengganti Khilafah Utsmani menjadi Republik Turki. Khilafah pun resmi dihapus pada tanggal 3 Maret 1924.

### Dampak Ketiadaan Khilafah

Belum 100 tahun bencana itu terjadi, sangat tampak derita fisik dan non-fisik umat Islam dan seluruh manusia. Dunia terasa semakin gelap. Berjalan tanpa arah. Hidup kian terbalik. Yang *haq* dihina. Yang batil dipuja. Di antara akibat ketiadaan Khilafah itu adalah:

*Pertama*, Umat Islam terpecah lebih dari 50 negara. Perpecahan mereka menjadikan mereka lemah dan tidak memiliki kekuatan. Keberadaannya bagaikan buih di lautan. Banyak, namun terombang-ambing tanpa kekuatan. Umat bagaikan hidangan yang diperebutkan oleh anjing-anjing rakus Kapitalisme.

*Kedua*, identitas Islam secara ideologis hilang dari kehidupan. Kaum Muslim tidak memiliki negara institusi politik yang menjadi wakil Islam dipercaturan politik dunia. Negara-negara Timur Tengah lebih merepresentasikan ideologi Kapitalisme penjajah. Singgasana para pemimpin negara tersebut juga tidak bisa lepas

dari pengaruh Barat. Demikian pula dengan Organisasi Islam seperti OKI, Liga Dunia Islam, IDB, Liga Arab dan lainnya. Sampai detik ini semuanya tidak pernah efektif menyelesaikan persoalan-persoalan yang menimpa umat Islam.

*Ketiga*, tiadanya pelita itu menjadikan akidah umat terkotori. Berbagai paham yang merusak keyakinan seperti sinkretisme, aliran dan kepercayaan sesat, nabi palsu, dll tumbang subur tanpa solusi tegas. Penghinaan atas Islam dan Rasulullah saw. terus berulang terjadi karena tidak ada hukum yang menindak tegas.

*Keempat*, rangkaian kewajiban syariah juga terbelengkalai dan tidak bisa terlaksana karena ketiadaan Khilafah. Alasannya, karena Khilafah adalah “*Tāj al-Furūdhi*”, mahkota kewajiban. Dengan keberadaan Khilafah akan terlaksana seluruh kewajiban. ‘*Uqubât* terhadap tindak kriminal, pelaku murtad, perilaku menyimpang seperti LGBT tidak bisa terlaksana tanpa Khilafah. Tanpa Khilafah eksistensi Islam sebagai solusi persoalan umat dan pembawa rahmat seluruh alam raib. Dunia berubah menjadi ladang penjajahan dan eksploitasi.

*Kelima*, akibat berikutnya adalah degradasi pemahaman keislaman umat yang semakin kritis. Terdapat jarak semakin jauh antara Islam dan kaum Muslim. Umat sudah mulai asing dengan ajaran Islam itu sendiri. Ajaran Islam tentang ekonomi, pendidikan, pemerintahan, hukum, sosial kemasyarakatan kian kabur. Bahkan umat kemudian menentang ajaran Islam itu sendiri, termasuk ajaran Khilafah Islamiyah. Islam yang dipahami oleh umat adalah Islam sekular dengan format Barat.

*Keenam*, absennya Khilafah ini menjadikan kemungkaran dan kerusakan merajalela di muka bumi. Keruntuhan Khilafah menjadikan hukum-hukum Allah tersingkir dan digantikan hukum kufur buatan manusia. Hukum *thâghûl* inilah yang menjadi sumber berbagai kemungkaran dan kerusakan di muka bumi. Hukum dari ideologi Kapitalisme ini terbukti

telah melahirkan kebobrokan akhlak, gurita narkoba, manusia munafik, kehancuran tatanan keluarga dan sosial, raibnya keadilan hukum serta hancurnya lingkungan hidup.

*Ketujuh*, sirnanya pelindung umat itu menyebabkan kemunduran umat Islam di berbagai sisi kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Umat Islam akhirnya identik dengan kebodohan, keterbelakangan pendidikan, ekonomi serba sulit dan status sosial yang redah.

*Kedelapan*, derita fisik di berbagai belahan dunia. Harga diri, kehormatan dan nyawa kaum Muslim tersia-siakan karena tidak ada pelindung dan pembela. Darah kaum Muslim di Palestina, Rohingya, Suriah, Xinjiang, Kasymir, dll terus mengalir tanpa ada pembelaan berarti dari umat Islam. Termasuk di negeri ini, ulama terus dikriminalisasi dan bahkan dibunuh, umat Islam tidak bisa berbuat banyak.

## Upaya Barat Menghalangi Khilafah Tegas

Barat mengetahui dan sangat yakin bahwa kekuatan Islam itu ada pada sistem Khilafah. Karena itu segala upaya mereka lakukan untuk menghalangi tegaknya kembali Khilafah. Beragam propaganda buruk mereka lakukan. Strategi lembut, kasar dan pendekatan hukum terus mereka lakukan.

Secara lembut dengan cara menyebarkan ajaran kapitalisme, demokrasi, HAM, pluralisme dan nasionalisme. Kalangan remaja Islam terus diracuni paham kebebasan. Barat dengan kaki tangannya di negeri Muslim terus mengaitkan ide Islam seperti Khilafah dengan paham radikal dan tindak terorisme. Kriminalisasi ajaran Khilafah di negeri ini pun semakin masif dilakukan oleh penguasa tanpa sedikitpun memberi ruang dialog.

Pendekatan kasar dilakukan dengan terus mengadu-domba antarkomponen umat Islam.

Mereka membenturkan antara apa yang mereka sebut Islam fundamentalis dan Islam moderat. Mereka buat istilah Islam tradisional vs Islam modernis, Islam Eksklusif kontra Islam Inklusif. Barat pun dengan strategi politiknya menciptakan pemerintah boneka di negeri kaum Muslim dengan perang dan konflik.

Pendekatan hukum (*Law Approach*) dengan menciptakan undang-undang menghambat perjuangan penegakan Khilafah ini, seperti uu anti-semit, uu keamanan nasional, uu anti diskriminasi dan yang sejenis dengan itu.

### Yang Harus Kita lakukan

Kembalinya Khilafah Islamiyah adalah janji Allah dan *bisyârah* Rasulullah saw. Keniscayaannya hanya persoalan waktu. Namun demikian, *khobar* dan janji Allah SWT itu adalah persoalan itikad atau keyakinan. Yang harus dilakukan adalah berjuang dengan metode yang dituntun oleh Rasulullah. Itulah dakwah pemikiran dan politik (non-kekerasan) untuk menyadarkan umat agar umat memahami dan menjadikan hukum Islam sebagai jalan hidup. Metode satu-satunya mengembalikan hukum-hukum Islam itu adalah dengan mengembalikan Khilafah Islamiyah.

Sungguh persoalan Khilafah Islamiyah adalah persoalan hidup dan matinya kaum Muslim. Kaum Muslim mati, sirna; tak ada nafas, kreativitas dan inovasi ketika institusi ini sirna. Ketiadaan insitusi ini menjadikan umat hidup sengsara. Ketiadaan Khilafah juga bisa menjadikan kematian mereka—jika tidak berupaya untuk menegakkan Khilafah—menjadi kematian jahiliah (HR Hakim).

Karena itu umat Islam harus berusaha keras memperjuangkan Khilafah meski risikonya mati sekalipun. Itulah juga yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. dalam perjuangan dakwahnya. Diriwayatkan bahwa beliau pernah diberitahu oleh pamannya, Abu Thalib, bahwa kaum

**Sungguh persoalan Khilafah Islamiyah adalah persoalan hidup dan matinya kaum Muslim. Kaum Muslim mati, sirna; tak ada nafas, kreativitas dan inovasi ketika institusi ini sirna. Ketiadaan insitusi ini menjadikan umat hidup sengsara. Ketiadaan Khilafah juga bisa menjadikan kematian mereka—jika tidak berupaya untuk menegakkan Khilafah—menjadi kematian jahiliah (HR Hakim).**

Quraisy menginginkan agar beliau menghentikan dakwahnya kepada kaum Quraisy. Abu Thalib berkata, “Kaumku telah datang kepadaku dan mengatakan begini dan begitu. Karena itu selamatkan diriku dan dirimu. Jangan engkau bebani diriku dan dirimu. Jangan bebani aku dengan (masalah) yang tidak sanggup aku hadapi.”

Mendengar itu Rasulullah saw. lalu bersabda, “*Paman, demi Allah, apabila mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan dakwahku, aku tidak akan menghentikannya sampai Allah memberikan kemenangan atau aku mati karenanya.*” (HR ath-Thabarani).

Demikian juga seharusnya umat Islam dalam berdakwah memperjuangkan tegaknya Khilafah Islamiyah ini. Alasannya, karena Khilafah menyangkut soal hidup dan matinya kaum Muslim. □



## Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.É.I.



# SAAT HARI KEPUTUSAN TIBA

(Tafsir QS 'al-Mursalat [77]: 8-15)

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ  
وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ  
أُفِتَّتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفُصْلِ  
وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمِ الْفُصْلِ وَيَا  
يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

*Jika bintang-bintang telah dihapuskan; jika langit telah dibelah; jika gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu; jika para rasul telah ditetapkan waktu (mereka) niscaya dikatakan kepada mereka, "Sampai hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang kafir itu)?" Sampai Hari Keputusan. Tahukah kamu apakah Hari Keputusan itu? Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan (QS al-Mursalat [77]: 8-15).*

### Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman: *Faidzâ an-nujûm thumisat* (Jika bintang-bintang telah dihapuskan). Kata *an-nujûm* merupakan bentuk jamak dari kata *an-najm* (bintang). Makna asalnya adalah *al-kawâkib ath-thâli'* (bintang yang terlihat atau terbit).<sup>1</sup>

Menurut ayat ini, ketika itu bintang-bintang tersebut *thumisat* (dihapuskan). Secara bahasa, kata itu berarti berarti menghilangkan bekas atau jejak dengan menghapusnya.<sup>2</sup>

Makna ini pula yang dikemukakan oleh para mufassis tentang ayat ini. Menurut sebagian, yang terhapus pada bintang-bintang itu adalah sinar dan cahayanya. Ibnu Jarir ayy-Thabari berkata, "Ketika bintang-bintang hilang sinarnya sehingga tidak ada lagi memiliki sinar dan cahaya."<sup>3</sup>

Imam al-Qurthubi juga berkata, "Telah hilang

cahayanya dan terhapus terangnya, seperti terhapusnya kitab."<sup>4</sup>

Menurut Ibnu Katsir menurut ayat ini berarti, "Telah hilang cahayanya."

Pendapat senada juga dikemukakan oleh al-Khazin, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Ada juga yang mengatakan bahwa yang terhapus dan lenyap adalah bendanya. Di antara yang berpendapat demikian adalah Fakhruddin ar-Razi. Menurut ar-Razi, penafsiran ini lebih sesuai dengan QS at-Takwir [81]: 2 dan al-Infithar [2]: 2.<sup>6</sup>

Meski begitu, menurut ar-Razi, terbuka pula kemungkinan makna: dihapuskan cahayanya, kemudian jatuh berserakan sehingga cahayanya pun padam.<sup>7</sup>

Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh az-Zamakhshari dan Syihabuddin al-Alusi.<sup>8</sup>

Syihabuddin al-Alusi berkata, “Dihilangkan bekasnya dengan menghilangkan cahayanya atau dengan melenyapkan bendanya; dan menghilangkannya secara keseluruhan. Kedua peristiwa itu akan terjadi dan itu bukan merupakan perkara yang mustahil.”<sup>9</sup>

Kemudian Allah SWT berfirman: *wa idzâ al-samâ'u furijât* (jika langit telah dibelah). Kejadian dahsyat juga terjadi pada langit; ketika itu langit *furijât* (dibelah). Menurut Ibnu Katsir, langit terbelah, terpecah dan ujung-ujungnya digulung.<sup>10</sup>

Syihabuddin al-Alusi dan al-Khazin menafsirkan dengan kata: *syuqqat* (dibelah). Ini sebagaimana diberitakan dalam QS al-Insyiqâq [84]: 1 dan al-Furqan [25]: 25).<sup>11</sup>

Imam al-Qurthubi dan asy-Syaukani juga memaknai kalimat tersebut dengan: *futihât wa syuqqat* (dibuka dan dibelah). Ini sebagaimana dalam QS an-Naba' [78]: 19).<sup>12</sup>

Semua penjelasan para mufassir itu berdekatan; bahwa ketika itu langit pecah, terbelah, terbuka dan menjadi pintu-pintu.

Kemudian Allah SWT berfirman: *wa idzâ al-jibâl nusifat* (jika gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu). Kata *al-jibâl* merupakan bentuk jamak dari kata *al-jabal* (gunung). Diberitakan: ketika itu gunung-gunung *nusifat*. Menurut Fakhruddin ar-Razi, ayat ini mengandung dua makna. *Pertama*, dihancurkan. Gunung-gunung tersebut dihancurkan seperti biji yang dihancurkan dengan alat ayakan. Di antara yang berpendapat demikian adalah al-Alusi dan lain-lain.<sup>13</sup> Menurut al-Razi, kata *nusifat* dengan makna ini terdapat dalam QS Thaha [20]: 97, al-Waqi'ah [56]: 5, al-Muzzammil [73]: 14 dan Thaha [20]: 105).<sup>14</sup>

*Kedua*, bermakna dicabut dengan cepat dari tempatnya.<sup>15</sup> Penafsiran ini juga dikemukakan oleh banyak mufassir lainnya. Menurut asy-Syaukani, kata *nusifat* bermakna dicabut dari tempatnya dengan cepat.<sup>16</sup>

Kedua makna tersebut tidak harus dipertentangkan atau dipilih salah satunya. Bisa

saja semuanya terjadi. Setelah gunung-gunung itu dicabut dari tempatnya dengan cepat, kemudian dihambur-hamburkan dan diterbangkan hingga bekasnya tak bersisa. Menurut Ibnu Katsir, pengertian *nusifat* adalah tidak ada sedikit pun sisa dan bekasnya. Ini sebagaimana dalam QS Thaha [20]: 105-107 dan al-Kahfi [18]: 47).<sup>17</sup>

Kemudian Allah Swt berfirman: *wa idzâ ar-rusulu uqqitat* (jika para rasul telah ditetapkan waktu (mereka)). Kata *ar-rusul* merupakan bentuk jamak dari kata *al-rasûl* (utusan). Yang dimaksud adalah utusan Allah SWT. Adapun kata *uqqitat* berasal dari *al-waqt* (waktu), sehingga aslinya adalah *wuqqitat* (ditetapkan waktunya). Huruf *wâwu* di awalnya diganti dengan huruf hamzah.<sup>18</sup> Dalam konteks ayat ini, setidaknya ada dua penafsiran tentang makna kata tersebut. Ada yang menafsirkan kata itu dengan *ujjilat* (ditangguhkan). Mujahid berkata, “Makna *uqqitat* adalah *ujjilat* (ditangguhkan).”<sup>19</sup>

Menurut sebagian lainnya, kata itu bermakna *jumi'at* (dikumpulkan). Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Zaid, makna tersebut sebagaimana diberitakan dalam firman Allah SWT dalam QS al-Maidah [5]: 109).

Al-Khazin berkata, “Para rasul dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan, yakni pada Hari Kiamat, untuk menjadi saksi atas umat manusia.”<sup>20</sup>

Pendapat senada juga dikemukakan oleh al-Qurthubi, az-Zuhaili dan lain-lain.<sup>21</sup>

Lalu dilanjutkan dengan firman-Nya: *li ayyi yawm ujjilat* ([niscaya dikatakan kepada mereka]: “Sampai hari apakah ditangguhkan [mengazab orang-orang kafir itu])?” Kata *ayy* merupakan *istifhâm* (kalimat tanya). Dalam konteks ayat ini, *istifhâm* tersebut memberikan makna *li at-ta'zhîm wa at-ta'jîb* (mengagungkan dan memunculkan rasa takjub). Demikian menurut asy-Syaukani.<sup>22</sup>

Abdurrahman as-Sa'di menyebut kata itu sebagai kata tanya untuk mengagungkan, memuliakan dan memunculkan rasa takut.

Adapun *ujjilat* bermakna *ukhkhirat* (ditangguhkan). Artinya, sampai hari apa ditunda dan ditangguhkan untuk memberikan kesaksian atas umat-umat dengan tablig (penyampaian dakwah). Perkataan ini merupakan pengagungan terhadap hari tersebut dan menimbulkan keheranan pada kengeriannya.<sup>23</sup>

Menurut Fakhruddin ar-Razi, seolah-olah Allah SWT memunculkan rasa takjub pada hamba terhadap keagungan hari tersebut sehingga dikatakan, “Sampai hari apakah semua urusan yang berkaitan dengan mereka ditangguhkan?”<sup>24</sup>

Kemudian diberitakan tentang hari tersebut dengan firman-Nya: *li yawm al-fashl* (*sampai Hari Keputusan*). Artinya, semua urusan itu akan diputuskan pada *yawm al-fashl* (Hari Keputusan). Pada hari itulah semua urusan manusia diberi keputusan. Ibnu Abbas berkata, “Pada hari ketika Ar-Rahman memutuskan perkara di antara makhluk-makhluk-Nya. Ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS ad-Dukhan [44]: 40).<sup>25</sup>

Penjelasan yang sama dikemukakan oleh Qatadah, bahwa yang dimaksud dengan *yawm al-fashl* adalah hari ketika diputuskan antara manusia dan amal-amal mereka, ke surga dan ke neraka.<sup>26</sup> Itulah Hari Kiamat. Pada hari itulah manusia mendapatkan keputusan atas semua amal yang dikerjakan di dunia dan diputuskan pula di mana akan tinggal, di surga atau di neraka. Ini adalah peristiwa besar. Karena itu hari itu pun menjadi hari besar; hari agung, yang memutuskan nasib seluruh manusia.

Kemudian Allah SWT berfirman: *wa mâ adrâka mâ yawm al-fahsl* (*tahukah kamu apakah Hari Keputusan itu?*). Ayat ini berbentuk *istifhâm* (kalimat tanya). Menurut az-Zuhaili, ayat ini bermakna: “Apa yang memberitahumu tentang Hari Kiamat, alangkah dahsyat dan mengerikannya?” Maksudnya, inilah perkara yang dahsyat yang tidak diketahui sifatnya dan kadar ukurannya.<sup>27</sup>

Menurut Imam al-Qurthubi, pengagungan ini mengiringi pengagungan. Artinya, “Apa yang memberitahukan kepadamu tentang apa itu Hari

Keputusan.”<sup>28</sup>

Kemudian Allah SWT berfirman: *Wayl’un’ yawmaidzjin li al-mukadzdzibîn* (*Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi para pendusta*). Menurut asy-Syaukani, pengertian *al-wayl* adalah *al-halâk* (kehancuran, kecelakaan). Bisa juga, sebuah nama lembah di Neraka Jahannam.<sup>29</sup>

Menurut ayat ini, kecelakaan dan kehancuranlah yang akan menimpa para pendusta). Menurut ar-Razi dan al-Khazin, mereka adalah orang-orang yang mendustakan tauhid, kenabian, Hari Kiamat dan semua yang dibawa dan dikabarkan oleh para nabi.<sup>30</sup>

## Beberapa Pelajaran Penting

Ayat-ayat ini mengandung banyak pelajaran. Di antaranya: *Pertama*, memastikan kejadian Hari Kiamat dan berbagai kejadian dahsyat yang mengiringi hari itu. Bintang-bintang yang biasa bercahaya pada malam hari, ketika tiba Hari Kiamat, cahayanya meredup, bahkan padam dan lenyap. Terhapus tak berbekas. Bahkan dalam ayat lainnya diberitakan bahwa bintang-bintang itu juga jatuh berserakan.

Demikian pula langit yang kini terlihat seperti kubah menutupi bumi. Tampak utuh dan tak berlobang sama sekali. Ketika datang Hari Kiamat, langit itu pun pecah dan terbelah. Dalam ayat lain diberitakan bahwa langit tersebut menjadi pintu-pintu yang terbuka.

Tak kalah dahsyat, gunung-gunung pun mengalami peristiwa dahsyat. Jika selama ini gunung-gunung tampak tegak dan berdiri kokoh, ketika itu semuanya dicabut dari tempatnya. Lalu dihancurkan dan diterbangkan bagaikan debu beterbangan.

Peristiwa lainnya yang amat penting bagi nasib manusia adalah kedatangan waktu yang ditangguhkan bagi para rasul. Para rasul berurusan dengan umat-umatnya masing-masing yang ditangguhkan hingga pada hari itu untuk diselesaikan dan diberi keputusan. Ke mana mereka ditempatkan selanjutnya, di surga atau di neraka.

*Kedua*, Hari Kiamat adalah Hari Keputusan atau *Yawm al-Fashl*. Sebagaimana diterangkan para mufassir tentang ayat di atas, pada hari itulah seluruh urusan diputuskan. Jika benar, pelakunya mendapatkan pahala. Sebaliknya, ketika salah, pelakunya mendapatkan dosa. Yang berat timbangan kebbaikannya dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, yang banyak timbangan keburukannya ditempatkan ke dalam neraka.

Patut dicatat, Hakim Pemutus semua perkara itu adalah Allah SWT (lihat QS Yunus [10]: 93 dan al-Jatsiyah [45]: 17). Hukum yang digunakan untuk memutus perkara pun hukum-Nya (Lihat: QS al-Naml [27]: 78).

*Ketiga*, ancaman keras bagi para pendusta. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah SWT, Hari Kiamat dan perkara lain yang wajib untuk diimani. Semua orang yang mendustakan perkara tersebut, baik sebagian maupun semuanya, terkatagorikan sebagai para pendusta. Mereka itu akan mendapatkan kecelakaan. Menurut para ulama, kata *way*/dalam ayat di atas bisa berarti kecelakaan dan kehancuran, bisa juga merupakan sebuah nama lembah di neraka.

*Keempat*, keagungan Hari Kiamat. Setidaknya, hal itu ditunjukkan oleh tiga hal. *Pertama*, hari itu merupakan hari yang ditetapkan sebagai hari keputusan seluruh urusan manusia, termasuk urusan para rasul dengan umatnya yang ditangguhkan. Semuanya diselesaikan pada hari itu. Itu menunjukkan bahwa hari itu adalah hari agung dan amat penting

*Kedua*, dalam ayat ini disebutkan firman Allah SWT: *Wa mā adrāka mā yawm al-fashl*. Menurut para ulama, penggunaan *istiḥām* dalam bentuk seperti ini memberikan makna untuk mengagungkan sesuatu. Dengan bentuk kalimat tanya seperti ini, perasaan dapat tergugah dan mengundang penasaran untuk membayangkan peristiwa besar, agung dan dahsyat yang akan terjadi.

*Ketiga*, ancaman keras bagi para pendusta. Hari Kiamat adalah hari agung yang pasti terjadi. Karena itu celakalah mereka yang mendustakan Hari

Kiamat. Sengsaralah orang yang meremehkan dan menganggap enteng Hari Kiamat.

Hari Kiamat adalah hari yang agung. Semua manusia semestinya menyiapkan kedatangan hari agung itu. Caranya adalah dengan mengokohkan iman dan memperbanyak amal. Itulah jalan yang wajib ditempuh oleh siapa saja yang tidak ingin mendapatkan kebahagiaan abadi.

*WaL-lâh a'lam bi ash-shawâb. □*

### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> Al-Asfahani, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân* (Beirut: Dar al-Qalam, 1992), 781.
- <sup>2</sup> Al-Asfahani, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân*, 524.
- <sup>3</sup> Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 129.
- <sup>4</sup> Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 157.
- <sup>5</sup> Al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 383.
- <sup>6</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 297.
- <sup>7</sup> Ar-Razi, *Mafâtîḥ ala-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 768.
- <sup>8</sup> Az-Zamakhshari, *al-Kaysyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1987), 678; al-Alusi, *Rûḥ al-Ma'ânî*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 191.
- <sup>9</sup> Al-Alusi, *Rûḥ al-Ma'ânî*, vol. 15, 191.
- <sup>10</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 297.
- <sup>11</sup> Al-Alusi, *Rûḥ al-Ma'ânî*, vol. 15, 191. Lihat juga al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 383.
- <sup>12</sup> Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 157; al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994), 431.
- <sup>13</sup> Al-Alusi, *Rûḥ al-Ma'ânî*, vol. 15, 191.
- <sup>14</sup> Ar-Razi, *Mafâtîḥ ala-Ghayb*, vol. 30, 768-769.
- <sup>15</sup> Ar-Razi, *Mafâtîḥ ala-Ghayb*, vol. 30, 769.
- <sup>16</sup> Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 431.
- <sup>17</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 297-298.
- <sup>18</sup> Ar-Razi, *Mafâtîḥ ala-Ghayb*, vol. 30, 769; al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 431.
- <sup>19</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 298.
- <sup>20</sup> Al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 383.
- <sup>21</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 298.
- <sup>22</sup> Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 431.
- <sup>23</sup> Az-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 314.
- <sup>24</sup> Ar-Razi, *Mafâtîḥ ala-Ghayb*, vol. 30, 769.
- <sup>25</sup> Ar-Razi, *Mafâtîḥ ala-Ghayb*, vol. 30, 770.
- <sup>26</sup> Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 431.
- <sup>27</sup> Az-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 316.
- <sup>28</sup> Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 154.
- <sup>29</sup> Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 431.
- <sup>30</sup> Ar-Razi, *Mafâtîḥ ala-Ghayb*, vol. 30, 770; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 383.



## ABDULLAH BIN AL-MUBARAK

**N**ama lengkapnya adalah Abdullah bin al-Mubarak bin Wadhih, Abu Abdurrahman al-Handzali. Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu al-Mubarak. Ayahnya berasal dari Turki. Ibunya dari Persia. Ia lahir pada tahun 118 H.

Abdullah bin al-Mubarak adalah seorang ahli fikih, ahli hadis, seorang yang *wara'*, terpercaya dalam bidang hadis, zuhud, gemar berjihad, sangat alim, pemberani, dermawan, ahli sejarah, dan lain-lain (Al-Barmaki, *Wafayât al-A'yan*. 3/32).

Ibnu al-Mubarak mulai mencari ilmu sejak umur 20 tahun di daerahnya, Marwa. Lalu pada tahun 141 H ia melakukan perjalanan ke berbagai wilayah lain seperti: Yaman, Mesir, Syiria, Irak, dll. Dalam perjalanan mencari ilmu, ia beguru kepada tak kurang dari 4000 ulama, 800-an di antaranya adalah ulama hadis.

Seluruh hidupnya, selain dihabiskan untuk mencari ilmu, juga digunakan untuk berjihad, berniaga, berinfak dan ibadah haji (Adz-

Dzahabi, *Siyar A'lâm an-Nubalâ'*. 7/365).

Ibnu al-Mubarak meninggalkan banyak karya tulis yang sangat berharga di antaranya: *Tafsir al-Qur'an*, *Ad-Daqâ'iq fî ar-Raqâ'iq*, *Riqâ' Al-Fatawa*, *Al-Musnad*, *Al-Jihâd*, *Az-Zuhd* dan masih banyak yang lainnya. (Adz-Dzahabi, *Tadzkiarah al-Huffâzh*, 1/275).

Ibnu al-Mubarak juga dikenal kaya dan amat dermawan. Imam adz-Dzahabi, misalnya, berkisah: Pernah datang seorang laki-laki meminta bantuan keuangan untuk membayar utangnya. Ibnu al-Mubarak lalu menulis surat kepada bendaharanya. Tatkala surat tersebut sampai kepada sang bendahara, dia bertanya kepada orang itu, "Berapa sebenarnya jumlah hutang yang engkau minta untuk dilunasi?" Orang itu menjawab, "Tujuh ratus dirham (sekitar Rp 35 juta)." Ternyata Ibnu al-Mubarak telah menulis kepada bendaharanya itu agar memberi orang tersebut sebanyak 7.000 dirham (Rp 350 juta) (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm an-Nubalâ'*, 4/256).

Ibnu al-Mubarak juga pernah membebaskan seorang pemuda yang dipenjara karena tidak sanggup bayar utang sebesar 10 ribu dirham (sekitar Rp 500 juta). Utang itu dilunasi oleh Ibnu al-Mubarak tanpa sepengetahuan pemuda tersebut (Ibnu Asakir, *Târîkh Dimasyqi*, 8/387).

Dikisahkan pula: Jika telah datang musim haji, sebagian kaum Muslim dari penduduk Marwa datang menemui beliau seraya menyatakan bahwa mereka ingin berhaji bersama beliau. Mendengar hal itu, Ibnu al-Mubarak berkata, "Kalau begitu, berikan kepadaku uang yang kalian alokasikan untuk biaya haji."

Tentu mereka sudah mempersiapkan uang untuk biaya melakukan ibadah tersebut. Kemudian beliau mengambil sekaligus memasukkan uang mereka dalam sebuah kotak yang kemudian dikunci. Selanjutnya beliau menyewa kendaraan yang bisa membawa mereka dari Marwa ke Baghdad. Beliau pun

menjamu mereka dengan makanan yang paling enak selama membawa mereka keluar dari Baghdad.

Setibanya di Madinah, setiap orang yang turut dalam rombongan ditanya oleh beliau, "Barang apa yang menjadi pesanan keluargamu agar bisa engkau beli di Madinah?"

Masing-masing dari mereka menyebutkan pesanan keluarganya. Ia lalu berbelanja memenuhi semua pesanan tersebut.

Selanjutnya mereka bertolak ke Makkah. Setelah mereka menunaikan ibadah haji, ia berkata lagi, "Barang apa yang menjadi pesanan keluargamu agar bisa engkau beli di Makkah?"

Masing-masing dari mereka menyebutkan pesanan keluarganya. Ia berbelanja memenuhi semua pesanan mereka. Kemudian mereka kembali ke Marwa.

Di sepanjang perjalanan Ibnu al-Mubarak terus memenuhi segala kebutuhan mereka. Setibanya di Marwa, Ibnu al-Mubarak merenovasi rumah-rumah mereka. Lalu tiga hari setelah pelaksanaan haji tersebut ia mengundang mereka untuk makan bersama dan memberi mereka pakaian yang bagus. Setelah mereka selesai makan dan merasa senang, Ibnu al-Mubarak mengambil kotak tempat penyimpanan uang haji mereka. Semua uang itu dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing (*Al-Mizzi, Tahdzīb al-Kamâl*, 16/21).

Menurut Imam adz-Dzahabi pula, Ibnu al-Mubarak biasa berinfak untuk fakir miskin sebanyak 100 ribu dirham (sekitar Rp 5 miliar) pertahun.

Ibnu al-Mubarak juga dikenal sebagai mujahid sejati di medan tempur. Dalam kitab *Talbīs Iblīs* karya Ibnu Jaui dinukilkan sebuah kisah penuturan Abdah bin Sulaiman. Ia berkata: Kami pernah tergabung dalam sebuah rombongan pasukan bersama Abdullah bin al-Mubarak ke Romawi. Saat itu kami bertemu dengan musuh. Ketika kedua pasukan sudah

saling berhadapan, tiba-tiba ada seorang lelaki dari pasukan musuh yang tampil ke depan untuk mengajak perang tanding (satu lawan satu). Bangkitlah seorang prajurit dari pasukan kami lalu menerjang musuh, namun dalam sekejap sang musuh mampu membunuhnya. Lalu bangkitlah prajurit Muslim berikutnya. Namun, ia pun terbunuh. Disusul oleh prajurit berikutnya. Ia juga terbunuh. Akhirnya, majulah seorang laki-laki yang dengan sekali tebas mampu membunuh prajurit Romawi tersebut. Serentak kaum Muslim pun berdesak-desakan mengelilingi dia, termasuk saya. Anehnya, segera laki-laki itu menutup wajahnya dengan lengan bajunya. Lalu saya pegang dan saya tarik ujung lengan bajunya. Ternyata ia adalah Abdullah bin al-Mubarak (Lihat juga: *Al-Khathib al-Baghdadi, Târîkh Baghdâd*, 10/167).

Meski seorang pemberani di medan jihad, Ibnu al-Mubarak adalah seorang ulama yang memang memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah SWT. Ia banyak beribadah pada malam hari dan banyak menangis karena rasa takutnya kepada Allah SWT (Lihat: Ibnu Asakir, *Târîkh Dimasyqî*, 38/240).

Karena rasa takutnya yang luar biasa kepada Allah SWT, wajar jika Abdullah bin al-Mubarak merupakan sosok yang amat *wara'*.

Begitulah keagungan kepribadian Abdullah bin al-Mubarak. Tentang keagungannya, cukuplah kata-kata Sufyan, "Aku senang andai semua umurku bisa menyamai setahun saja dari umur Abdullah bin al-Mubarak. Namun, aku tidak akan bisa menyamai dia walaupun sekadar tiga hari dari umurnya (*Al-Khathib al-Baghdadi, Târîkh Baghdâd*, 10/165).

Ibnu al-Mubarak wafat di Hait pada tahun 181 H dalam usia 63 tahun. Saat Khalifah Harun al-Rasyid mendengar Ibnu al-Mubarak, ia berkata, "Telah wafat penghulu para ulama." (Lihat: Adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm an-Nubalâ*, 8/422). [Arief B. Iskandar]

# ISTINBATH HUKUM KEWAJIBAN MENEGAKKAN KHILAFAH

**Yuana Ryan Tresna**

Islam adalah sistem kehidupan yang lengkap. Ajaran Islam itu mencakup semua hal (Lihat: QS an-Nahl [16]: 89). Tentu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Itulah pemerintahan Islam. Hanya saja, pemerintahan Islam—sebagai salah satu simpul penting—justru yang pertama kali lepas. Akibatnya, umat menjadi asing dengan salah satu ajaran Islam ini. Nabi saw. bersabda:

«لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ، عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ، فَكُلَّمَا  
انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، تَشَبَّهَتِ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوْلَاهُنَّ  
نَقْضًا الْحُكْمَ، وَأَخْرَجْنَهُنَّ الصَّلَاةَ»

*Sungguh simpul-simpul Islam akan terurai satu-persatu. Setiap kali satu simpul terlepas, manusia akan bergantung pada simpul berikutnya. Simpul yang pertama lepas adalah al-hukm (pemerintahan) dan yang terakhir adalah shalat (HR Ahmad).*

Pemerintahan di dalam Islam tidak lain

adalah Khilafah

## Definisi Khalifah dan Khilafah

*Al-Khalifah* berasal dari kata *khalafa*, yang secara bahasa bermakna *pengganti*.<sup>1</sup> Jamak dari kata khalifah adalah *khulafā'* dan *khalā'if*. Kata ini bisa kita temukan dalam beberapa ayat al-Quran (Lihat, antara lain: QS al-Baqarah [2]: 30; QS al-An'am [6]: 165; dan QS an-Naml [27]: 62).

Saat menafsirkan QS al-An'am ayat 165, Imam ath-Thabari menjelaskan, "Allah menjadikan di antara kalian para pemimpin yang hidup setelah masa kepemimpinan pemimpin kalian (sebelumnya) di muka bumi, yang menggantikan mereka."<sup>2</sup>

Adapun makna *syar'i* istilah *khalifah* identik dengan *Al-Imâm al-A'zhâm* (pemimpin agung). Imam ar-Ramli mendefinisikan:

الْخَلِيفَةُ هُوَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ الْقَائِمُ بِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي  
حِرَاسَةِ الدِّينِ وَ سِيَاسَةِ الدُّنْيَا

*Khalifah adalah pemimpin agung yang menduduki jabatan Khilafah Nubuwwah dalam melindungi agama serta pengaturan urusan dunia.*<sup>3</sup>

Penulis Kitab *Ajhizah ad-Dawlah al-Khilafah* menampilkan definisi yang lebih praktis:

الْخَلِيفَةُ هُوَ الَّذِي يُنُوبُ عَنِ الْأُمَّةِ فِي الْحُكْمِ وَ  
السُّلْطَانِ وَ فِي تَنْفِيزِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ

*Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syariah.*<sup>4</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Imam al-Mawardi<sup>5</sup> dan Imam al-Juwaini.<sup>6</sup>

Asal-usul kata *khilafah* kembali ke ragam bentukan kata dari kata kerja *khilafa*. Kata *khilafah* merujuk pada sosok pemimpin. Adapun kata *khilafah* digunakan untuk menunjuk konsep kepemimpinannya. Istilah *khilafah*, *imam* dan *amirul mukminin* adalah kata yang sinonim. Demikian juga dengan istilah *Khilafah* dan *Imamah*.<sup>7</sup>

Definisi Khilafah yang *jâmi'* dan *mâni'* adalah:

الْخِلَافَةُ هِيَ رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا فِي الدُّنْيَا  
لِإِقَامَةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ الْإِسْلَامِيِّ وَ حَمْلِ الدَّعْوَةِ  
الْإِسْلَامِيَّةِ إِلَى الْعَالَمِ

*Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.*<sup>8</sup>

### Kewajiban Menegakkan Khilafah

Kewajiban menegakkan Khilafah didasarkan pada perintah yang tegas di dalam al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak Sahabat.

#### 1. Dalil al-Quran.

Di dalam al-Quran Allah SWT berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah serta taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian (QS an-Nisa' [4]: 59).*

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kita menaati pemimpin (*ulil amr*). Tentu Allah tidak pernah memerintahkan taat kepada yang tidak ada. Karena itu berdasarkan *dalâlah al-iltizâm*, perintah menaati *pemimpin* sekaligus merupakan perintah mewujudkan sosok pemimpin itu agar kewajiban tersebut terlaksana. Ayat tersebut juga mengandung *dalâlah* (petunjuk) bahwa keberadaan *ulil amri* (khalifah) adalah wajib dan wajib pula mengadakan *ysistem syar'i*-nya (khilafah). Adanya *ulil amri* berkonsekuensi pada tegaknya hukum syariah. Sebaliknya, ketiadaannya, berkonsekuensi pada lenyapnya hukum syariah.

Pada ayat yang lain Allah SWT berfirman:

﴿ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا  
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾

*Hukumilah mereka menurut apa (wahyu) yang telah Allah turunkan. Janganlah kamu (Muhammad) mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu (QS al-Maidah [5]: 48).*

Seruan Allah SWT kepada Rasulullah saw. pada ayat di atas juga merupakan seruan untuk umatnya. *Maftûm*-nya, hendaknya kaum Muslim mewujudkan seorang hakim (penguasa) setelah Rasulullah Saw untuk menghukumi manusia berdasarkan wahyu Allah SWT. Perintah dalam ayat ini bersifat

tegas karena adanya satu *qarīnah* (indikasi), yakni yang menjadi objek seruan adalah kewajiban. Penguasa yang memutuskan perkara berdasarkan wahyu-Nya di tengah-tengah umat setelah Rasul saw. wafat tidak lain adalah khalifah dan sistem pemerintahannya adalah Khilafah.

Selain itu terdapat ratusan ayat yang berhubungan dengan masalah politik (kenegaraan) secara langsung, juga terkait dengan ekonomi, hukum pidana atau perdata; terkait dengan hubungan kemasyarakatan, akhlak, kenegaraan, militer, muamalah, dan lain-lain. Kewajiban untuk menerapkan seluruh hukum Islam yang berkaitan dengan semua perkara ini tidak akan mungkin terwujud dengan sempurna tanpa keberadaan penguasa yang menerapkan syariah secara *kāffah*. Penguasa yang dimaksud tidak lain adalah khalifah. Atas dasar itu, mengangkat seorang khalifah atau mendirikan Khilafah yang menerapkan syariah secara *kāffah* merupakan kewajiban.

## 2. Dalil as-Sunnah.

Di dalam as-Sunnah banyak dituturkan riwayat yang menjelaskan secara rinci tentang kewajiban kaum Muslim mengangkat seorang khalifah yang akan mengurus urusan mereka. Semua riwayat tersebut diriwayatkan dalam banyak kitab hadis. Rasulullah saw., misalnya, bersabda:

«مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقِيَّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً»

*Siapa saja yang melepaskan tangan (diri)-nya dari ketaatan, dia akan menjumpai Allah pada Hari Kiamat tanpa memiliki hujjah. Siapa saja yang mati, sementara di atas pundaknya tidak ada baiat, maka matinya dalam keadaan mati jahiliah (HR Muslim).*

Baiat adalah akad penyerahan mandat Kekhilafahan dari umat yang hanya diberikan kepada seorang khalifah. Dalam hadis di atas, Nabi saw. telah mewajibkan adanya baiat di pundak setiap Muslim. Kewajiban ini ditunjukkan oleh adanya *qarīnah jāzimah* (indikasi yang teas), yakni frasa “*mati dalam keadaan mati jahiliah*”. Mati jahiliah, menurut penjelasan para ulama, adalah mati dalam keadaan bermaksiat<sup>9</sup> atau tersesat.<sup>10</sup>

Hadis ini sekaligus merupakan dalil (penunjukkan) yang jelas, bahwa jika tidak ada khalifah, maka umat wajib untuk segera mewujudkan seorang khalifah di tengah-tengah mereka agar baiat terwujud.

Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda:

«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»

*Sungguh imam (khalifah) itu perisai; orang-orang akan berperang mendukung dia dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya (Muttafaq ‘alayh).*

Hadis ini mengandung pujian terhadap sosok imam atau khalifah, yakni sebagai *junnah* (perisai) atau *wiqāyah* (pelindung).<sup>11</sup> Pada hadis ini juga terdapat *qashr* (pengkhususan) dan *tasybīh mu’akkad* (penyerupaan tegas) yang menyerupakan khalifah sebagai perisai kaum Muslim. Al-Hafizh Ibn al-Atsir menjelaskan bahwa *junnah* dalam hadis ini, berkonotasi sebagai pelindung dari kezaliman dan penangkal dari keburukan.<sup>12</sup>

Menurut Al-Hafizh an-Nawawi. *junnah* itu seperti *as-sitr* (pelindung), karena Imam (Khalifah) mencegah musuh dari perbuatan mencelakai kaum Muslim, mencegah sesama manusia (saling berbuat zalim), memelihara kemurnian ajaran Islam, rakyat berlindung kepada dia dan mereka tunduk pada kekuasaannya.<sup>13</sup>

Ini merupakan *ikhbār* (pemberitahuan) yang

mengandung pujian atas keberadaan imam (khalifah). Karena mengandung pujian, *ikhbâr* di sini bermakna *tuntutan untuk melakukan*. Demikian Karena pelaksanaan aktivitas yang dituntut tersebut berkonsekuensi pada tegaknya hukum syariah, maka pujian tersebut merupakan *qarînah jâzimah* (indikasi tegas) bahwa keberadaan khalifah yang akan menjadi *junnah* (perisai) adalah wajib.

Selain itu, khalifah harus satu untuk seluruh kaum Muslim di dunia, tidak boleh banyak. Dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.:

«وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَتَمَرَةً قَلْبِهِ  
فَلْيُطِيعْهُ إِنَّ اسْتِطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرَ يُنَازِعُهُ فَأَضْرِبُوا  
عُنُقَ الْآخَرِ»

*Siapa saja yang telah membaiai seorang imam (khalifah), lalu ia memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaknya ia menaati imam (khalifah) itu jika ia mampu. Jika ada orang lain hendak merebut kepemimpinan Imam (khalifah) itu, maka penggallah lehernya (HR Muslim).*

Perintah Rasulullah saw. ini berarti perintah untuk mengangkat dan menaati khalifah sekaligus menjaga eksistensi Kekhilafahan. Hadis ini juga mengandung indikasi (*qarînah*) yang tegas mengenai keharusan mewujudkan hanya satu orang khalifah saja.

### 3. Dalil Ijmak.

Sungguh para Sahabat ra. telah berijmak atas kewajiban mengangkat seorang khalifah. Al-Qadhi Abu Ya'la al-Farra mengomentari peristiwa yang terjadi di Tsaqifah Bani Saidah dengan menyatakan, *“Jika Imamah (Khalifah) itu tidak wajib, tentu tak akan berlangsung diskusi alot tersebut dan dialog tentang perkara tersebut.”*<sup>14</sup>

Indikasi atas kewajiban ini adalah ketika

para Sahabat lebih mendahulukan pemilihan dan pengangkatan khalifah daripada pemakaman jenazah Rasulullah saw.

Imam al-Khatthabi menegaskan, *“Ijmak Sahabat merupakan sejelas-jelasnya dalil atas kewajiban menegakkan Khilafah...”*<sup>15</sup>

Imam al-Haitami juga menyatakan, *“Ketahuilah, para Sahabat ra. telah bersepakat bahwa hukum mengangkat imam (khalifah) setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka telah menjadikan hal ini sebagai kewajiban yang terpenting. Buktinya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban tersebut dan menunda penguburan jenazah Rasulullah saw.”*<sup>16</sup> □

*Penulis adalah Pengasuh Majelis Kajian Hadis Khadimus Sunnah Bandung dan Peneliti Raudhah Tsaqafiyah Jawa Barat.*

### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> Abu Manshur Muhammad bin Ahmad bin al-Azhari, *Tahdzib al-Lughah*, VII/168-174.
- <sup>2</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Tâ'wil al-Qur'ân*, 19/485.
- <sup>3</sup> Al-Ramli Muhammad bin Ahmad bin Hamzah, *Nihâyah al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj fi Fiqhi 'alâ Madzhab al-Imâm asy-Syâfi'i*, 7/289.
- <sup>4</sup> Atha bin Khalil Abu al-Rasyah, *Ajhizah Dawlah al-Khilâfah fi al-Hukm wa al-Idârah*, hlm. 20.
- <sup>5</sup> Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*, hlm. 5.
- <sup>6</sup> Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Ghiyâts al-Umam fi at-Tiyâtsi azh-Zhulâm*, hlm.15.
- <sup>7</sup> Yahya bin Syaraf a-Nawawi, *Rawdhah ath-Thâlibîn wa Umdah al-Muhtâj*, X/49; Khatib al-Syarbini, *Mughn al-Muhtâj*, IV/132.
- <sup>8</sup> Mahmud Abd al-Majid Al Khalidi, *Qawâ'id Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm*, hlm. 225-230.
- <sup>9</sup> Ahmad bin Ali al-Asqalani, *Fath al-Bâri*, XIII/7.
- <sup>10</sup> Imam as-Sindi, *Syarh Sunan an-Nasâ'i*, VI/434.
- <sup>11</sup> Ali bin Sulthan Muhammad Abu al-Hasan al-Mala al-Qari, *Mirqât al-Mafâtiḥ Syarh Misykât al-Mashâbih*, VI/2391.
- <sup>12</sup> Majduddin Abu al-Sa'adat al-Mubarak Ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl fi Ahâdîts ar-Rasûl*, IV/63.
- <sup>13</sup> Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Minhâj Syarh Shahîḥ Muslim*, XII/230.
- <sup>14</sup> Abu Ya'la al-Farra, *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*, I/19.
- <sup>15</sup> Abu Sulaiman al-Khatthabi, *Ma'âlim as-Sunan*, III/6.
- <sup>16</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Ash-Shawâ'iq al-Muhriqah*, hlm. 17.

# KEBOHONGAN 'GARIS MERAH' MENGEKIK RAKYAT SURIAH

Prancis mengklarifikasi sikapnya terhadap penggunaan senjata kimia di Suriah. Sebelumnya, Prancis menyatakan akan menyerang jika senjata kimia digunakan untuk melawan warga sipil dalam konflik Suriah yang melanggar perjanjian internasional. Namun, pihak Prancis belum melihat bukti bahwa penggunaan senjata kimia telah terjadi.

Menteri Luar Negeri Prancis pada Rabu (14/2) berusaha untuk mengklarifikasi posisi pemerintahannya mengenai penggunaan senjata kimia di Suriah. Ia mengatakan bahwa Paris hanya akan menyerang jika senjata kimia Suriah terbukti mematikan dan dilakukan oleh pasukan Pemerintah.

Presiden Emmanuel Macron mengatakan pada Selasa (13/2), bahwa "Prancis akan menyerang" jika senjata kimia digunakan untuk melawan warga sipil dalam konflik Suriah yang melanggar perjanjian internasional. Namun, dia belum melihat bukti bahwa itu terjadi.

Macron mengatakan pada bulan Mei lalu, bahwa penggunaan senjata kimia akan menjadi "garis merah" yang membatasi. Dalam sebuah pembicaraan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat (9/2), ia menyatakan keprihatinannya atas tanda-tanda bahwa bom klorin telah digunakan terhadap warga sipil di Suriah.

"(Presiden) mengkonfirmasi bahwa dia akan

melanjutkan serangan militer melawan instalasi rezim tersebut jika penggunaan senjata kimia baru oleh pasukan Bashar al-Assad saat serangan ini terbukti mematikan dan rezim tersebut terbukti bertanggung jawab," ujar Jean-Yves Le Drian kepada para anggota parlemen.

Pengertian "garis merah"—sebatas batas kapan akan melakukan intervensi militer untuk menghentikan rezim Basyar—juga digunakan Obama. Pada masa pemerintahannya, Obama mengumumkan bahwa kimia merupakan garis merah. Obama menggunakan istilah tersebut pada tahun 2012 terkait kemungkinan intervensi militer Amerika di Suriah.

"Garis merah bagi kita adalah saat kita melihat sejumlah senjata kimia bergerak atau sedang digunakan," tegas Obama.

Dia menambahkan, "Untuk semua kekuatan di wilayah ini dan untuk kita, ini adalah garis merah yang akan memiliki konsekuensi yang sangat besar." (*France24.com*).

Namun demikian, istilah "garis merah" hanya kebohongan yang dilakukan negara-negara Barat untuk mendapatkan simpati dunia. Tidak benar-benar ada rencana intervensi militer ke Suriah untuk menghentikan rezim Basyar Assad. Padahal telah banyak bukti bahwa rezim Basyar menggunakan senjata kimia secara brutal.

Beberapa organisasi dunia telah memberikan laporan yang jelas bahwa rezim Basyar menggunakan senjata kimia.

Laporan Dewan Keamanan PBB menegaskan bahwa rezim Bashar al-Assad menggunakan senjata kimia terhadap warga sipil. Berarti hal itu merupakan pelanggaran atas perjanjian yang dimediasi Pemerintahan Obama dengan bantuan Rusia pada tahun 2013.

Pada bulan Agustus 2015, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komite ahli untuk menyelidiki penggunaan bahan kimia dalam perang di Suriah. Laporan dari komite tersebut menegaskan bahwa ada dua insiden serangan gas klorin oleh rezim Bashar al-Assad, satu di tahun 2014, dan satunya lagi di tahun 2015. Organisasi Hak Asasi Internasional Human Rights Watch juga menegaskan, mereka memiliki “bukti-bukti kuat” bahwa pasukan rezim telah melakukan serangan kimia terhadap al-Ghouta.

Kebohongan tentang garis merah ini juga diungkap dalam laporan yang dipublikasikan oleh situs *Businessinsider.com*, pada hari Senin (29/8/2016). Laporan itu mengutip Fred Hoff, seorang anggota Dewan Atlantik dan mantan penasihat khusus untuk proses transisi di Suriah di bawah naungan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, yang mengatakan, “Rezim Bashar al-Assad telah belajar selama lima tahun terakhir bahwa Pemerintahan Obama tidak akan pernah melakukan apapun untuk melindungi warga sipil Suriah dari pembunuhan massal.”

Dia menambahkan, “Kemungkinan rezim akan menggunakan kembali bahan kimia sebagai senjata, sama sekali tidak mengejutkan.”

Begitu juga dengan laporan PBB pada hari Kamis (26/10/2017). Laporan tersebut menegaskan bahwa rezim Bashar al-Assad bertanggung jawab atas serangan gas sarin pada bulan April di Kota Khan Shaykhun. Dalam laporan tersebut, sebagaimana

diungkapkan oleh Agence France-Presse (AFP), Komisi Penyelidikan “meyakini bahwa Republik Arab Suriah bertanggung jawab atas peluncuran gas sarin di Khan Sheikun pada tanggal 4 April 2017.”

### Pengkhianatan Saudi dan Turki

Omong-kosong “garis merah” menunjukkan kebijakan umum negara-negara Barat dan sekutunya terhadap krisis Suriah. Mereka lebih memilih mempertahankan rezim Bashar (sampai ada penggantinya) daripada memberikan ‘kemerdekaan’ kepada rakyat Suriah untuk bebas dari rezim diktator. Keinginan rakyat Suriah untuk bukan sekadar menumbangkan rezim Basyar, tetapi juga untuk menjadikan Islam sebagai pedoman hidup mereka, termasuk dalam bernegara, dianggap merupakan ancaman besar bagi Barat.

Berbagai upaya dilakukan Barat di bawah pimpinan Amerika untuk membendung keinginan rakyat Suriah kembali pada Islam. Mereka, antara lain, membiarkan rezim Bashar untuk melakukan kegiatan keji: membantai rakyatnya sendiri. Amerika pun membiarkan Iran dan partainya dari Libanon untuk memperkuat Bashar. Ketika Bashar sudah tersudut, Amerika membiarkan Rusia untuk membela rezim Bashar dengan membombardir rakyat Suriah.

Peran lain dilakukan boneka regional Amerika di kawasan itu melalui Turki dan Saudi Arabia. Awalnya, Amerika mendorong Saudi dan Turki untuk ‘mengasuh’ kelompok oposisi, termasuk faksi bersenjata untuk bersebrangan dengan Basyar. Tujuannya, walaupun Basyar jatuh oleh kelompok oposisi, Amerika masih punya kendali terhadap kawasan tersebut melalui Turki dan Saudi. Namun demikian, saat ini kebijakan Amerika berubah. Posisi Amerika mendukung penuh rezim Bashar. Untuk itu Amerika menekan Turki dan Saudi agar memainkan peran barunya. Tujuannya,

menundukkan oposisi, termasuk faksi bersenjata, agar menerima solusi Amerika.

Sebelumnya Presiden Erdogan mengumumkan bahwa Hama adalah garis merah, kemudian Homs, lalu Aleppo, Al-Qaseer dan Ain Al-Arab, dan akhirnya Idlib. Setiap kali dia mengumumkan garis merah, pasukan rezim dengan cepat menguasai daerah tersebut melalui konspirasi dengan Pemerintah Turki dan bekerjasama dengan para oknum revolusi bayaran.

Dalam “Operasi Perisai Efrat”, misalnya, Turki mengabaikan Aleppo dengan memfasilitasi rezim Assad menguasai Aleppo. Erdogan dengan sengaja menarik faksi-faksi yang berkiblat kepada Turki untuk keluar dari Aleppo, bukannya berperang mempertahankan di wilayah mereka (Aleppo). Akibatnya, rezim Assad dengan mudah menguasai Aleppo dan menghancurkan kota itu.

Erdogan mengulang skenario yang sama dalam “Operasi Cabang Zaitun”. Operasi diluncurkan pada 20 Januari lalu dengan alasan mendesak milisi Kurdi YPG keluar dari Afrin. Turki menganggap YPG (Unit Perlindungan Rakyat) sebagai kelompok teroris dan perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdi (PKK) yang telah dilarang dan telah memperjuangkan otonomi wilayah Kurdi di bagian tenggara Turki selama tiga dekade. Tujuannya, untuk memudahkan rezim Assad masuk ke Idlib. Alih-alih mempertahankan Idlib, Turki malah membuat medan perang baru dengan menyerang Afrin sebagai pengalihan.

Peran kucing-kucingan yang dimainkan oleh Arab Saudi dalam melayani rencana Amerika di banyak kawasan di dunia semakin meningkat, terutama di kawasan Arab. Di Suriah, majalah Amerika *Foreign Policy* menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, pada tanggal 24 Desember 2017 mengumpulkan para pemimpin oposisi Suriah. Dia menyampaikan pesan yang jelas kepada

mereka atas nama Amerika Serikat bahwa Arab Saudi akan memperlambat dukungan oposisi jika tidak mematuhi permintaannya. Bahkan al-Jubeir memperingatkan jika oposisi gagal atau tidak melakukannya.

Arab Saudi, melalui al-Jubeir, yang selalu menggemakan nada perlunya melengserkan al-Assad, telah mengubah sikapnya seratus delapan puluh derajat. Saat ini justru Saudi menekan pihak oposisi untuk tunduk demi mencapai kesepakatan yang memalukan dengan rezim kriminal yang disponsori Rusia.

Jelaslah bahwa kudeta Saudi terhadap oposisi Suriah sesuai dengan sikap Amerika. Pemerintah Amerika akhirnya menghentikan dukungannya pada musim panas lalu. Kemudian Amerika memerintahkan Rusia untuk mengatur situasi di Suriah yang dapat menjaga rezim Bashar al-Assad.

Pemerintah Trump tidak lagi tertarik dengan solusi politik yang ditetapkan oleh pemerintahan Obama sebelumnya di konferensi Jenewa. Pemerintah Trump membebaskan tangan Rusia di Suriah secara militer dan politik. Hal itu kemudian diikuti oleh Arab Saudi, yang juga mengubah arah oposisi menuju Moskow. Pemerintah Trump tidak lagi menekankan Solusi Jenewa, namun menyerahkan semua urusan Suriah kepada Rusia.

Begitu juga yang dilakukan anak angkatnya, Arab Saudi. Padahal Arab Saudi tahu bahwa Rusia adalah sekutu Iran yang merupakan musuh tradisionalnya. Dengan demikian, persetujuan Arab Saudi terhadap solusi Rusia sama artinya Arab Saudi harus menerima peran Iran di Suriah. Padahal biasanya Arab Saudi menunjukkan permusuhan yang jelas terhadap Iran. Jadi, semua ini menegaskan kebohongan kebijakan politik Arab Saudi selama ini, dan menguatkan sejauh mana ketergantungannya secara mutlak kepada Amerika. [Abu al-Fath, dari berbagai sumber] []



## KLASIFIKASI AS-SUNNAH

### أَقْسَامُ السُّنَّةِ

Dalam konteks ushul fikih, as-Sunnah baik sunnah *qawliyah*, *fi'liyah* ataupun *taqririyah*, dari sisi sanad bisa diklasifikasikan menjadi tiga: mutawatir, masyhur dan ahad.

Pengklasifikasian tersebut secara umum *mu'tabar* menurut para ulama ushul, meski ada perbedaan mereka dalam ungkapan. Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi* menjelaskan bahwa as-Sunnah menurut sanad terbagi menurut jumhur menjadi dua klasifikasi: mutawatir dan ahad, baik khabar ahad itu *mustafidh*, yaitu yang perawinya lebih dari tiga, seperti yang ditetapkan oleh al-Amidi dan Ibnu Hajib, atau *ghayru mustafidh* yaitu masyhur, yakni yang perawinya tiga orang atau lebih kemudian menjadi terkenal (masyhur); meski pada abad kedua atau ketiga sampai batas

dinukilkan oleh para perawi *tsiqah* yang tidak dibayangkan mereka sepakat atas kebohongan (Lihat: Al-Amidi, *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, al-Ghazali, *Al-Mustashfâ*, I/93; Asy-Syaukani, *Irsyâd al-Fuhûl*, hlm. 41 dst; Ali asy-Syasyi, *Ushûl asy-Syâsyî*, hlm. 81; As-Subki, *Al-Ibhâj*, ii/186).

Menurut Hanafiyah, as-Sunnah berdasarkan sanadnya terbagi ke dalam tiga klasifikasi: mutawatir, masyhur dan ahad (Lihat: Ibnu Amir al-Haj, *At-Taqrîr wa at-Tahbîr*, II/225; *At-Talwîh 'alâ at-Tawdîh*, II/2).

Dua macam pengklasifikasian itu tidak berbeda banyak. Khabar wahid *mustafidh* itulah yang disebut masyhur.

Jadi hadis itu, jika dinukilkan oleh jamaah (sekelompok) orang dari *tâbi' at-tâbi'in*, dari jamaah *at-tâbi'in*, dari jamaah (sekelompok) Sahabat, dari Nabi saw., maka itulah mutawatir. Jika dinukilkan oleh jamaah *tâbi' at-tâbi'in*, dari jamaah *at-tâbi'in*, dari satu atau lebih Sahabat yang jumlah mereka tidak sampai pada batas *tawâtur*, maka itu adalah hadis *masyhûr* karena diterima oleh umat dan terkenal di tengah mereka. Jika diriwayatkan oleh satu perawi atau lebih dan jumlah mereka tidak mencapai batas *tawâtur* sejak masa Sahabat, *at-tâbi'in* dan *tâbi' at-tâbi'in* maka itu disebut *khabar ahad*.

Adapun dari sisi berfaedah yakin atau *zhann*, maka as-Sunnah hanya ada dua kasifikasi: (1) berfaedah *yaqîn/qath'i/al-ilmu*, (2) berfaedah *zhann*.

Hadis *masyhûr*, dari sisi ini, termasuk hadis *ahad*. Hadis itu, jika diriwayatkan oleh sejumlah *tâbi' at-tâbi'in* yang aman dari bersepakat atas kebohongan, dari sejumlah *at-tâbi'in* yang aman dari bersepakat atas kebohongan, dari sejumlah sahabat yang tegak *hujjah qath'i* dengan ucapan mereka, maka hadis demikian adalah hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu, jika pada tiga tingkatan (Sahabat, *at-tâbi'in* dan *tâbi' at-tâbi'in*) jumlah perawinya mencapai batas



tawatur pada setiap tingkatannya. Jika salah satu dari tiga tingkatan itu tidak mencapai batas *tawâtur* maka termasuk khabar *ahad*, baik yang tidak terpenuhi itu pada tingkat Sahabat, *at-tâbi'în* atau *tâbi' at-tâbi'în* atau di semua tingkatan itu, maka termasuk *khabar ahad*; tidak berfaedah yakin, melainkan berfaedah *zhann*. Hanya saja, jika yang tidak mencapai batas *tawâtur* itu hanya pada tingkat Sahabat, sementara pada tingkat *at-tâbi'în* dan *tâbi' at-tâbi'în* mencapai batas *tawâtur*, maka disebut hadis *masyhûr* karena kemasyhurannya di tengah umat. Namun, dari sisi faedahnya tidak berbeda dengan *khabar ahad*, yaitu tidak berfaedah yakin, melainkan hanya berfaedah *zhann*.

### Hadis Mutawatir

*At-Tawâtur* secara bahasa artinya mengikutnya sesuatu setelah yang lain dengan masa jeda di antara keduanya. Makna itu dinyatakan di dalam al-Quran: "*tsumma arsalnâ rusulanâ tatrâ*" (Kemudian Kami mengutus (kepada umat-umat itu) para rasul Kami berturut-turut (TQS al-Mu'minun [23]: 44).

Adapun dalam istilah ulama ushul, hadis mutawatir adalah *khabar* jamaah (sekelompok perawi) yang banyak jumlahnya sampai batas tercapai keyakinan (*al-'ilmu*) dengan ucapan mereka. Hal itu tidak akan tercapai, artinya tidak mutawatir, kecuali jika mereka yakin dengan apa yang mereka beritakan dan bukan dugaan (*zhann*). Keyakinan mereka itu disandarkan pada penginderaan langsung (mendengar atau melihat). Kelompok perawi yang terpenuhi syarat tersebut ada pada tingkat Sahabat, *at-tâbi'în* dan *tâbi' at-tâbi'în*.

Dengan demikian *khabar mutawâtir* itu harus memenuhi syarat: *Pertama*, perawinya harus berjumlah banyak. Banyaknya jumlah perawi harus disertai kondisi dan keadaan yang memustahilkan mereka bersepakat atas kebohongan. Ini berbeda-beda dari sisi sosok pribadi perawi, tempat dan keadaan. *Kedua*, jumlah dan keadaan yang memustahilkan untuk

bersepakat atas kebohongan itu terpenuhi pada semua tingkatan: tingkat Sahabat, *at-tâbi'în* dan *tâbi' at-tâbi'în*. *Ketiga*, pada tingkat Sahabat, apa yang mereka beritakan harus bersandar pada penginderaan baik mendengar atau melihat langsung atau lainnya; bukan bersandar pada penetapan akal sebab penetapan akal bisa salah (Lihat: Al-'Allamah Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, I/332; Al-Ghazali, *Al-Mustashfâ*, I/86; Ibnu Amir al-Haj, *At-Taqrîr wa at-Tahbîr*, II/233; Al-Laknawi al-Anshari, *Fawâtih ar-Rahamût*, II/115; as-Subki, *Al-Ibhâj Syarh al-Minhâj*, ii/187; Asy-Syaukani, *Irsyâdu al-Fuhûl*, hlm. 41).

Mengenai jumlah yang mengantarkan pada keyakinan atau *tawâtur*, para ulama ushul berbeda pendapat berapa minimalnya. Ada yang mengatakan lima, dua belas, dua puluh, empat puluh, tujuh puluh, 313 orang dan lainnya. Sebagiannya mengemukakan dalil yang mendukung pendapatnya. Hanya saja, Syaikh Wahbah az-Zuhaili mengatakan, semua dalil itu lemah, tidak merujuk pada akal maupun *naql*, tidak ada di antara dali-dalil itu dan obyek perselisihan sesuatu yang menghimpun atau pengikat. Yang *râjih*, patokan *at-tawâtur* adalah tercapainya *al-'ilmu* (kepastian) dan keyakinan terhadap ucapan orang yang memberitakan, tanpa batasan jumlah tertentu (Lihat: *Syarh al-Jalal al-Mahali 'alâ Jam' i al-Jawâmi'*, 2/106; Ibnu Amir al-Haj, *At-Taqrîr wa at-Tahbîr*, As-Subki, *Al-Ibhâj*, II/189; Sayid al-Katani, *An-Nazhmu al-Mutanâtsir min al-Hadîts al-Mutawâtir*, hlm. 10).

Semua pendapat yang menentukan jumlah minimal tercapainya *tawâtur* itu tidak memiliki sandaran dari akal maupun *naql*. Peralnya, tidak ada nas yang menyatakan jumlah tertentu. Akal juga tidak me-*râjih*-kan jumlah tertentu. Patokan *khabar mutawâtir* adalah tercapainya *al-'ilmu al-yaqîn*, bukan riwayat jumlah tertentu. Sebab, bersama jumlah itu ada indikasi yang menunjukkan kuat atau lemahnya khabar. Kadangkala khabar itu diriwayatkan oleh jumlah tertentu yang dengan riwayat mereka tidak

tercapai kepastian dan keyakinan. Kadang *khobar* diriwayatkan oleh kelompok lain dengan jumlah yang sama dan tercapai kepastian dan keyakinan. Pasalnya, penilaian *khobar* itu berbeda menurut indikasi-indikasi yang menyertai meski jumlahnya sama. Atas dasar itu, hadis mutawatir yang menghasilkan kepastian dan keyakinan harus diriwayatkan oleh sejumlah orang, bukan jumlah tertentu. Jumlah orang itu, juga tempat mereka yang saling berjauhan, memustahilkan mereka bersepakat atas kebohongan. Patokan jumlah hanya didasarkan pada kemustahilan mereka bersepakat atas kebohongan. Jadi hadis mutawatir itu haruslah diriwayatkan oleh jamaah (sekelompok perawi) dan jumlah mereka harus menghalangi mereka bersepakat atas kebohongan. Hal itu berbeda-beda, bergantung pada orang yang memberitakan, fakta-fakta dan indikasi-indikasi yang menyertai (Al-'Allamah Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, III/82-83).

Menurut kesepakatan para ulama, hukum hadis mutawatir adalah *qath'i tsubûti* berasal dari Rasul saw. Hadis mutawatir berfaedah *al-'ilmu* (kepastian) dan *al-yaqîn* (keyakinan). orang yang mengingkari hadis mutawatir dikafirkan (Syaikh Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqhi al-Islâmi*, I/453).

Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah* (I/332) menyatakan bahwa hukum hadis mutawatir berfaedah *al-'ilmu adh-dharûri* (kepastian yang bersifat mutlak). Artinya, manusia dipaksa yakin dan tidak mungkin bisa menolak. Bersifat *dharûri* tidak lain karena tidak memerlukan *nazhar* (penelaahan). Artinya, *khobar mutawatir* berfaedah pada kepastian.

*Khobar mutawatir* ada dua jenis: *mutawatir lafzhanj* (mutawatir redaksi [ungkapan]-nya) dan *mutawatir ma'nfanj* (mutawatir maknanya). Kedua jenis tersebut ada. Diriwayatkan banyak hadis mutawatir, meski ada perbedaan tentang penilaian hadis sebagai mutawatir menurut para ulama sesuai perbedaan pandangan mereka

tentang mutawatir.

Contoh hadis mutawatir *lafzhanj*: sabda Rasul saw.:

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَبِئُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

*Siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, hendaklah ia siapkan tempat duduknya di neraka.*

Hadis ini diriwayatkan oleh 70-an Sahabat. Contoh lain hadis mutawatir adalah *hadis al-hawdh*, hadis mengusap kaus kaki, hadis mengangkat tangan di dalam shalat (Dr. Mahmud Thahhan, *Taysîr Mushthalah al-Hadîts*, hlm. 21).

Contoh hadis mutawatir *lafzhanj*, menurut sebagian pen-*tahqîq*, adalah sabda Rasul saw.:

«لَا وَصِيَّةَ لِي وَارِثٍ»

*Tidak ada wasiat untuk ahli waris (HR Ahmad dan Ashhâb as-Sittah dari Anas).*

Hadis ini diriwayatkan oleh dua belas Sahabat. Di antara mereka apa yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ad-Daraquthni dan Ibnu Adi dari Ali ra (Syaikh Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqhi al-Islâmi*, I/452).

Adapun contoh hadis mutawatir maknawi adalah shalat sunnah shubuh dua rakaat (Al-'Allamah an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, I/333).

Contoh lainnya adalah hadis tentang mengangkat kedua tangan saat berdoa. Ada sekitar 100 hadis tentang ini. Masing-masing menyatakan Rasul saw mengangkat kedua tangan saat berdoa dalam berbagai masalah meski masing-masing hadis itu tidak mutawatir (Dr. Mahmud Thahhan, *Taysîr Mushthalah al-Hadîts*, hlm. 21, mengutip dari As-Suyuthi, *Tadrîb ar-Râwî*, II/180).

Masih banyak lagi hadis mutawatir yang lain.

*Wallâh a'lam bi ash-shawâb.* [Yahya Abdurrahman]

## MENGUTAMAKAN RIDHA ALLAH DI ATAS RIDHA MANUSIA

«مَنْ التَّمَسَ رِضَاءَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَّاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنْ التَّمَسَ رِضَاءَ  
النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ»

*Siapa saja yang mencari ridha Allah dengan risiko dimurkai oleh manusia maka Allah akan mencukupi dirinya sehingga tidak memerlukan bantuan manusia. Siapa saja yang mencari ridha manusia dengan sesuatu yang bisa mengundang kemurkaan Allah maka Allah akan membiarkan dirinya dikuasai manusia.*” (HR at-Tirmidzi, Ibnu al-Mubarak).

Ibnu Hibban meriwayatkan hadis di atas di dalam *Shahîh Ibni Hibbân* dengan dua redaksi yang sedikit berbeda. *Pertama*, riwayat dari jalur Urwah, dari Aisyah, dari Rasul saw. yang bersabda:

«مَنْ التَّمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ وَمَنْ التَّمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ  
اللَّهِ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ»

*Siapa saja yang mencari ridha Allah dengan risiko dimurkai manusia maka Allah meridhai dia dan akan membuat manusia pun ridha kepada dirinya. Siapa saja yang mencari ridha manusia dengan sesuatu yang bisa mengundang murka Allah maka Allah murka kepada dia dan membuat manusia bisa marah kepada dirinya* (HR Ibnu Hibban).

Riwayat *kedua*, dari jalur al-Qasim dari Aisyah ra., dari Rasul saw. yang bersabda:

«مَنْ أَرْضَى اللَّهُ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَّاهُ اللَّهُ وَمَنْ  
أَسْخَطَ اللَّهُ بِرِضَا النَّاسِ وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ»

*Siapa saja yang membuat ridha Allah meski bakal mengundang kemarahan manusia maka Allah akan menyelamatkan dirinya. Siapa saja yang membuat Allah murka semata-mata demi meraih keridhaan manusia maka Allah akan membiarkan dirinya dikuasi oleh manusia* (HR Ibnu Hibban).

Al-Mubarakfuri di dalam *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarhi Jâmi' at-Tirmidzi* menjelaskan: Sabda Rasul saw., “*Man iltamasa*” bermakna *thalaba* (mencari). Maknanya, siapa saja yang mencari ridha Allah “*bi sakhathi an-nâsi*” (dengan sesuatu yang bisa memancing kemarahan manusia). *As-Sakhathu, as-sukhuthu, as-sukhthu* dan *al-maskhathu* bermakna *al-karâhah li asy-syay' i wa 'adamu ar-ridhâ bihi* (ketidak-sukaan dan ketidakridhaan terhadap sesuatu). “*Kafâhullâh mu' nata an-nâs*” (Allah mencukupi dirinya sehingga tidak membutuhkan bantuan manusia) karena ia telah menjadikan dirinya sebagai bagian dari *hizbulLâh* (partai Allah). Siapa saja yang berlindung kepada Allah tidak gagal. Ingatlah bahwa mereka yang masuk ke dalam partai Allah adalah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, siapa saja yang mencari ridha manusia dengan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah maka “*wakalahu ilâ an-nâsi*”, yakni Allah akan menjadikan manusia berkuasa atas dia hingga manusia itu menyakiti dan menzalimi dirinya.

Mula Ali al-Qari di dalam *Mirqâtu al-Mafâtiḥ Syarḥu Misykâti al-Mashâbiḥ* menjelaskan hadis di atas. Siapa saja yang mencari ridha Allah meski bisa mendatangkan kemarahan manusia, yakni mencari ridha Allah dalam sesuatu yang menyebabkan manusia tidak suka kepada dia, maka Allah menyelamatkan dia dari kejahatan mereka

berupa kezaliman dan perlakuan buruk kepada dirinya. Siapa saja yang mencari ridha manusia dengan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah maka Allah akan membiarkan dia dan tidak menolong dia. Allah membiarkan dia dikuasi oleh manusia. Ini merupakan pesan yang komprehensif untuk semua manusia.

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah di dalam *Al-Fawâ'id* menyatakan "*Man ardhâllâh wa askhatha an-nâs*" merupakan prinsip agung yang harus diketahui oleh orang berakal. Ini berlaku untuk setiap orang. Peralnya, manusia adalah makhluk sosial yang harus hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia mempunyai keinginan dan imajinasi yang tentu ingin disetujui oleh manusia lainnya. Jika orang-orang tidak setuju, mereka bisa menyakiti dan menyiksa dirinya. Sebaliknya, jika dia membuat manusia setuju maka serangan dan siksaan itu juga terjadi, kadang dari mereka dan kadang dari selain mereka.

Ibnu al-Qayyim juga menyatakan, jadi yang wajib dijadikan pegangan adalah sabda Rasul saw. dalam hadis Aisyah yang dikirim kepada Muawiyah, yang diriwayatkan secara *marfû'* dan *mawqûf*. Ini berlaku pada orang yang menolong raja dan pemimpin atas keinginan rusak mereka, juga pada orang yang menolong pelaku bid'ah yang bernisbat pada ilmu dan agama atas klaim bid'ah mereka. Siapa saja yang ditunjuki oleh Allah, dia terhalang dari perbuatan haram dan dia bersabar atas serangan dan permusuhan mereka, kemudian kesudahan yang baik adalah untuk dia di dunia dan akhirat.

Di antara manusia yang biasanya banyak dicari ridhanya adalah penguasa. Peralnya, di tangannya ada kekuasaan dan alat kekuasaan yang siap dia gunakan, bisa saja untuk mengebuk siapa saja yang tidak dia sukai atau yang membuat dia marah. Namun, perilaku sekadar menyenangkan penguasa, tanpa peduli membuat murka Allah SWT, tentu menyimpan bahaya besar. Apalagi jika itu dilakukan oleh orang yang memiliki agama, khususnya ulama.

Dalam hal itu Imam al-Ghazali di dalam *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn* mengutip ucapan Ibnu Mas'ud ra.: "Seseorang yang sungguh-sungguh masuk ke istana (penguasa) dengan membawa agamanya, tetapi dia kemudian keluar tanpa membawa agamanya." Ditanyan, "Mengapa begitu?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Sebab dia telah berusaha menyenangkan penguasa itu dengan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah."

Imam al-Ghazali juga menyatakan, bahwa siapa yang menyibukkan diri mencari ridha manusia dan memperbagus keyakinan mereka tentangnya, mereka tertipu. Sebabnya, seandainya dia makrifat kepada Allah dengan sebenarnya niscaya dia tahu bahwa makhluk tidak berguna sedikit pun dalam menghindarkan sesuatu dari Allah, juga bahwa madarat dan manfaat makhluk itu ada di tangan Allah. Tidak ada yang memberi manfaat dan tidak pula memadaratkan selain Dia. Dia pun sadar bahwa siapa saja yang mencari ridha dan kecintaan manusia dengan sesuatu yang bisa mengundang murka Allah, niscaya Allah murka terhadap dirinya dan Allah akan membuat manusia marah terhadap dirinya. Bahkan ridha manusia itu merupakan tujuan yang tidak bisa diraih. Jadi ridha Allah lebih utama dicari.

Alhasil, seseorang wajib menjadikan rasa takutnya kepada Allah berada di atas semua rasa takut. Hendaknya dia tidak mepedulikan siapapun dalam menjalankan syariah Allah. Hendaknya dia tahu bahwa siapa saja yang mencari ridha Allah, meski manusia tidak sukai padanya, maka kesudahan adalah untuk dirinya. Sebaliknya, jika dia mencari ridha manusia dan bergantung pada manusia dengan sesuatu yang bisa membuat Allah murka, maka kondisinya akan berbalik, dan dia tidak meraih maksudnya. Bahkan yang terjadi justru berlawanan dengan maksudnya, yaitu Allah murka kepada dirinya dan Allah akan menjadikan manusia juga marah atau tidak suka kepada dirinya.

*Wallâh a'lam bi ash-shawâb.* □



## “ANA MUSLIM...!”

**M**enarik untuk menjadi evaluasi kita bersama. Ketika kita sudah akil balig kemudian mengenal Allah SWT dan Islam, apa yang selanjutnya kita lakukan? Bagaimana pemahaman dan sikap diri yang langsung kita lakukan? Apakah kita langsung bergiat diri mempelajari Islam, sekuat tenaga mengamalkan syariah Islam atau bahkan menjadi pembela agama Allah yang terpercaya? Ya. Apakah kita mengikrarkan dalam tutur kata dan sikap di depan khalayak ramai, “*Ana Muslim qabla kulla syay’[in]* (Saya Muslim sebelum yang lain).” Sudahkah kita konsisten terhadap keimanan kita?

Apa yang di alami oleh Sahabat Umar bin al-Khatthab ra. sewaktu baru masuk Islam menjadi pelajaran sangat berharga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku *The Great Leader of Umar bin Al Khathab* (Kisah Kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah Kedua), sikapnya langsung menunjukkan

keislaman dan pembelaan pada Islam. Beliau memahami betul konsekuensi dari makna syahadat: satu kata dan perbuatan; satu iman dan amal; satu pemahaman dan perilaku. Beliau pun sekaligus menjadi pembela Islam terpercaya. Beliau dengan lugas dan tegas mengimplementasikan “*Ana Muslim...*” setelah bersyahadat di depan Nabi saw.

Umar ra. masuk Islam dengan hati yang tulus. Ia berusaha mengokohkan agama Islam dengan segenap kekuatan yang ia miliki. Ia pernah mengatakan kepada Rasulullah saw., “Ya Rasulullah, bukankah kita berada di pihak yang benar bila kita mati dan bila kita hidup?” Beliau menjawab, “*Benar. Demi Zat Yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh kalian berada di pihak yang benar bila kalian mati dan bila kalian hidup.*” Umar lalu berkata, “*Lantas mengapa dakwah Islam kita lakukan secara sembunyi-sembunyi?*” Demi Zat Yang mengutus Anda dengan kebenaran, kami semua akan

keluar dari rumah ini.”

Inilah sikap Umar yang luar biasa. Setelah bersyahadat dan meyakini kebenaran Islam, ia berkeinginan agar kebenaran Islam itu diketahui oleh orang banyak. Kebenaran harus disampaikan dan ditampakkan secara terbuka kepada khalayak ramai walau dengan risiko sangat besar.

Apa yang disampaikan oleh Umar ra., ditambah oleh bimbingan wahyu, Rasulullah *saw.*, melihat bahwa telah tiba saatnya untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah Islam telah kuat dan dapat membela dirinya sendiri. Karena itu beliau pun mulai berdakwah secara terang-terangan. Beliau keluar dari Darul Arqam bersama kaum Muslim dengan membentuk dua barisan. Satu barisan dipimpin oleh Umar ra. Barisan lainnya dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Tatkala orang-orang Quraisy melihat Umar dan Hamzah memimpin barisan kaum Muslim, mereka tertimpa kesedihan yang belum pernah mereka alami selama ini. Rasulullah saat itu memberi Umar gelar *Al-Faruq* (pemisah antara yang hak dan yang batil). (HR Ahmad).

Allah SWT telah mengokohkan agama Islam dan kaum Muslim dengan masuk Islamnya Umar. Umar adalah orang yang sadar akan harga diri. Ia tidak peduli apa risiko yang akan terjadi di belakang dirinya. Allah SWT telah melindungi para Aahabat Nabi saw. melalui Umar dan Hamzah.<sup>1</sup>

Lihatlah apa yang dilakukan oleh Umar. Ia menantang orang-orang musyrik Quraisy. Ia melawan atau memerangi mereka hingga akhirnya ia dan kaum Muslim dapat menunaikan shalat di Ka’bah.<sup>2</sup> Umar tetap berusaha dengan sungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya untuk melawan dan memerangi musuh musuh Islam. Tentang dirinya, ia bercerita:

Aku bertekad ingin dilihat mereka sebagai

orang Islam. Aku pergi menemui pamanku, Abu Jahal. Ia termasuk orang terpendang di mata mereka. Kuketuk pintu rumahnya. “Siapa yang mengetuk pintu?” tanya Abu Jahal.

Kujawab, “Umar bin al-Khaththab.”

Ia pun keluar menemuiiku. Kutanyakan kepada Abu Jahal, “Apakah Anda sudah tahu kalau aku telah murtad (telah masuk Islam)?”

Abu Jahal balik bertanya, “Apakah Anda serius telah murtad?”

Kujawab, “Ya, aku serius.”

“Jangan lakukan itu,” pinta Abu Jahal.

Lalu ia masuk ke dalam rumahnya. Ia menutup pintu dan tidak menghiraukan ku.

Setelah itu, aku pergi menemui salah seorang tokoh terpendang Quraisy. Sesampai di sana, kuketuk pintu rumahnya. “Siapa di luar?” Tanya dia.

Kujawab, “Umar bin al-Khaththab.”

Ia keluar menemuiiku. Kutanyakan kepada dia, “Apakah Anda sudah tahu kalau aku telah murtad?”

Ia balik bertanya, “Apakah Anda serius setelah murtad?”

“Ya, saya serius,” jawabku.

“Jangan lakukan itu!” pinta dia. Lalu ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu.

Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar:

Tatkala Umar masuk Islam orang-orang Quraisy belum mengetahui keislamannya. Umar bertanya, “Siapa di antara penduduk Makkah yang dapat menyebarkan informasi tentang keislamanku?”

Dikatakan pada Umar, “Jamil bin Ma’mar Al-Jamhi.”

Umar keluar dan aku mengikuti di belakangnya. Aku perhatikan apa saja yang dilakukan Umar. Saat itu aku masih anak-anak, tetapi aku sudah dapat memahami apa yang kulihat dan kudengar. Umar menemui

## Tarikh

Jamil dan menyampaikan padanya, “Jamil, aku telah masuk Islam.”

Demi Allah tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya hingga ia menarik sorbannya. Umar mengikuti Jamil dan aku pun mengikuti Ayahku, Umar. Setiba di Masjid, Jamil berdiri tepat di pintu masjid dan berteriak dengan suara lantang, “Wahai orang-orang Quraisy—saat itu orang-orang Quraisy sedang berada di sekitar Ka’bah. Ketahuilah, bahwa Umar bin al-Khatthab telah murtad.”

Umar berujar, “Jamil telah berdusta. Yang benar, aku telah masuk Islam. Aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.”

Setelah itu orang-orang Quraisy menyerang Umar bin al-Khatthab. Umar lalu menangkap ‘Utbah bin Rubaiyah. Umar memasukkan ke dua jari tangannya tepat di mata ‘Uthbah. ‘Uthbah berteriak. Orang-orang Quraisy pun menjauhi Umar. Umar lalu berdiri dan tidak ada seorang pun yang berani mendekati dirinya hingga akhirnya orang-orang Quraisy bubar. Umar mengikuti majelis-majelis mereka dan menampakkan keislamannya di dalam majelis-majelis tersebut.<sup>3</sup>

Umar terus menyerang mereka hingga mentari berada tepat di atas kepala mereka. Umar merasa lelah, lalu duduk dan beristirahat. Tidak lama kemudian orang-orang Quraisy menghampiri dia. Kepada mereka, Umar mengatakan, “Lakukanlah apa yang hendak kalian lakukan. Demi Allah, sekiranya kami berjumlah 300 orang laki-laki, niscaya kalian akan membiarkannya untuk kalian.”

Tidak lama kemudian, datanglah orang seorang laki-laki yang mengenakan Sutra dan gamis berbordir. “Apa yang sedang kalian lakukan?” tanya laki-laki itu kepada mereka.

Mereka menjawab, “Umar bin al-Khatthab telah murtad.”

Laki-laki itu mengatakan, “Biarkanlah dia! Ia telah memilih agama untuk dirinya sendiri. Apakah kalian mengira bahwa Bani Adi akan menyerahkan begitu saja anggota suku mereka pada kalian?”

Setelah di Madinah, aku bertanya kepada Umar, “Ayahku, siapa nama orang yang dulu pernah mencegah ayah dari amukan orang-orang Quraisy?”

Umar menjawab, “Wahai anakku, ia adalah Al-‘Ash bin Wail As-Sahmi.” (HR Imam Ahmad).

Demikianlah sikap luar biasa Umar. Tidak takut sama sekali mengenalkan identitasnya sebagai seorang Muslim walau taruhannya nyawa sekalipun.

Sikap ini sangat tepat dalam kondisi sekarang. Kita sebagai seorang Muslim, apalagi pengemban dakwah, harus berani menampilkan identitas kita bahwa kita adalah para pemeluk Islam yang taat dan pembela agamanya yang terpercaya walau ancaman kriminalisasi dan penjara menanti.

Fragmen di atas juga menjelaskan bahwa suatu saat nanti akan ada *ahlul quwwah* yang secara terang-tearangan membela agama Allah dengan semua potensi dan jabatan yang dia miliki. Dia tidak peduli lagi dengan kekayaan, jabatan bahkan nilai sosial yang diterimanya saat itu. Bagi dia Islam jauh lebih mulia dan berharga jika dibandingkan dengan itu semua. Bisa jadi, Andalah *ahlul quwwah* itu. Karena itu buktikanlah pembelaan Anda: “*Ana Muslim...!*”

*Wallâhu a’lam bi ash-shawâb. [Abu Umam]*

### Catatan kaki:

<sup>1</sup> *Al-Khalifah Al Faruq Umar bin Al Khattab*, hlm. 26-27.

<sup>2</sup> *Ar-Riyadh an-Nadhrah*, 1/257.

<sup>3</sup> *Ar-Riyadh an-Nadhrah*, hlm. 319

# AGENDA UMAT



Bogor. Forum Ulama Aswaja Kota Bogor menyelenggarakan Ijtima Ulama di Pesantren Miftahul Falah, Jl. Layungsari, Bogor Selatan, Bogor, Ahad [18/2]. Ijtima' ulama ini dilakukan terkait maraknya penganiayaan, penyiksaan, bahkan pembunuhan ulama di sejumlah daerah akhir-akhir ini. Tak kurang 100 habib, ulama, kyai, dan asatidz hadir dalam Lailatul Ijtima' ini.



Ponorogo. Jumat [26/1], Forum Komunikasi Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah (FKU Aswaja) Mataraman kembali menggelar mudzakah. Koordinator FKU Aswaja Mataraman, KH. Anas Karim, dalam sambutannya menegaskan bahwa seorang hamba tidak akan pernah mencapai ridlo Rabbnya jika tidak mematuhi perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-larangannya, meski lisan hamba tersebut senantiasa menyebut-nyebut keagungan dan kesucian Rabb-nya.



Mojokerto. Subhanallah, ratusan jamaah dengan khusu' mendengar wejangan para ulama. Hal itu terjadi pada acara Jalsah Ammah, Ahad [11/2]. Agenda rutin yang diadakan di halaman RM Kembangan itu dihadiri oleh: KH Akhmad Robithoh, Kyai Djoko S, Kyai Maslikhan, Gus Maulana, KH. Abdurrahman Salam, Gus Sam, Kyai Lukman Hakim, KH Abdul Khaliq, Kyai Suhardi Anwar dan Ustadz Heru Ilyasa. Tegas disampaikan oleh Kyai Maslikhan bahwa mereka yang berani membunuh para ulama pantas disebut orang fasik, bahkan kafir.



Sumenep. Prihatin sekaligus geram. Itulah sikap yang ditunjukkan oleh ulama dan tokoh Madura. Selasa [30/1] Mudzakah Ulama dan Tokoh Madura digelar di PP Nurul Ihsan, Lenteng, Sumenep. Tema yang pas dan mengglobal menjadi tajuk acara, yakni "Solusi Tuntas Permasalahan Palestina". Acara ini sekaligus kepedulian para tokoh dan ulama terhadap persoalan Palestina. Lebih dari 50 Ulama dan Tokoh dari Sumenep dan Pamekasan hadir beramai-ramai.



Tulungagung. Masjid al-Mubari, desa Besole, Tulungagung, ramai dipenuhi jamaah, ustadz dan muhibbinnya, Sabtu malam [3/2]. Menurut ustadz Ahmad, masalah utama Palestina adalah penjajahan Israel terhadapnya. Israel menjajah wilayah Palestina atas dukungan PBB, AS, dan negara Barat serta pengkhianatan dari para penguasa Muslim.

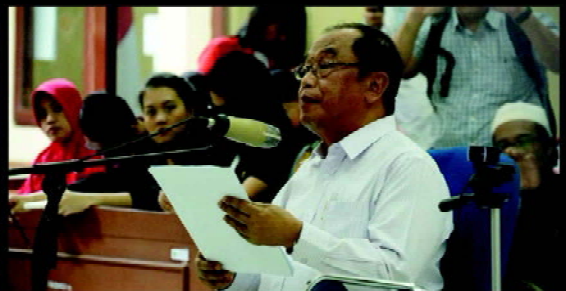
## AGENDA UMAT



Jakarta. Kamis [18/1], sidang lanjutan gugatan perkaratan pembubaran ormas HTI melawan Kemenkumham di PTUN Jakarta Timur digelar kembali. Agenda sidang adalah pemaparan bukti-bukti yang disampaikan oleh tergugat (Kemenkumham). Namun, Gugum Ridho Putra, selaku pengacara HTI, memaparkan kelemahan bukti-bukti yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Pemerintah tersebut. "Semua bukti video kita tolak semua, karena kejadian itu jauh semua sebelum Perppu terbit, Perppu Ormas diterbitkan 10 Juli 2017," ungkap Gugu



Jakarta. Keterangan Ahli kedua yang dihadirkan HTI dalam lanjutan sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur hari Kamis [8/2] adalah Drs. Moeflich Hasbullah, MA. Beliau adalah ahli sejarah dan sosiologi Islam dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Moeflich Hasbullah dalam keterangan di sidang PTUN hari ini menyampaikan bahwa Kesultanan Nusantara adalah bagian dari Khilafah Turki Usmani.



Jakarta. Keterangan Ahli Hukum Administrasi Tata Negara Prof. Dr. Zainal Arifin, yang dihadirkan HTI di persidangan PTUN hari ini, Kamis [15/2], menegaskan pencabutan SK BHP HTI tidak sesuai dengan hukum dan administrasi negara. "Dasar pencabutan itu berupa Perppu sudah salah. Seharusnya Pemerintah melewati proses sesuai hukum dan administrasi negara," ujarnya saat memberikan keterangan di depan majelis hakim di PTUN Jakarta Timur.



Jakarta. "Khilafah adalah ajaran Islam yang sudah dikenal sejak dulu dan hal itu sudah diketahui para ulama sejak lama dan disampaikan dalam banyak hadits", demikian keterangan ahli, DR. Daud Rosyid, saat diminta keterangan di sidang PTUN hari Kamis [8/2]. Beliau menambahkan, HTI hanya menyampaikan ajaran Islam yang itu semua tertulis dalam kitab-kitab ulama, sudah sesuai. Menurutnya, ajaran HTI bukan ancaman, tetapi memiliki fungsi untuk menjaga Indonesia.



Sumedang. Menyikapi maraknya penganiayaan, pembunuhan ulama di Jawa Barat akhir-akhir ini, telah dilaksanakan 'ijtima' ulama di Ponpes Darul Bayan Sumedang, Jumat [16/2]. KH Ali Bayanullah al-Hafizh (Pimpinan Ponpes Darul Bayan), menyampaikan perbandingan posisi ulama dalam sistem Islam dan demokrasi.